


GREENPEACE

BANKIR KOTOR

BAGAIMANA  HSBC MENDANAI
PERUSAKAN HUTAN UNTUK
KELAPA SAWIT



Ucapan terima kasih:

Laporan ini dibuat berdasarkan informasi dan penelitian asli yang dipublikasikan oleh berbagai individu, layanan informasi, konsultan nirlaba dan organisasi masyarakat sipil lainnya – baik organisasi dari Indonesia maupun organisasi internasional. Pihak-pihak ini termasuk Aidenvironment, awasMIFEE, Center for Orangutan Protection, Climate Advisors, Environmental Investigations Agency, FERN, Friends of the Earth, International Animal Rescue, Mighty Earth/Waxman Strategies, Pusaka, Rainforest Action Network, dan WALHI.

16 Oktober 2008, Papua:

Sungai yang membelah hutan yang masih asli.

©RANTE/GREENPEACE

CONTENTS

MINYAK SAWIT: RISIKO BAGI LINGKUNGAN, MASYARAKAT, PERUSAHAAN DAN BANK	1	STUDI KASUS	12	IMPLIKASI BAGI SEKTOR PERBANKAN	54
SEKTOR KEUANGAN GAGAL MENDUKUNG AKSI UNTUK MENGATASI MASALAH DEFORESTASI	1	BUMITAMA	15	Perusakan hutan – bisnis yang berisiko	56
HSBC – JANGAN PERCAYA PADANYA	2	Studi kasus: Penawaran saham perdana Bumitama Agri Ltd pada tahun 2012 mengakui adanya ilegalitas	17	Beberapa jasa yang disediakan bank	56
HSBC terus menyokong perusakan lingkungan dan eksploitasi	3	Studi kasus: PT Karya Bakti Agro Sejahtera	18	Other banks' links to case study companies	58
Sekilas tentang HSBC	3	Pernyataan	19	Keterlibatan bank-bank lain dengan minyak sawit	60
Kaitan HSBC dengan kelompok usaha minyak sawit perusak	4	GOODHOPE/CARSON CUMBERBATCH	21	Model untuk perbankan yang bertanggung jawab	60
Kebijakan-Kebijakan HSBC Tahun 2014	6	Studi kasus: PT Nabire Baru	23	Prinsip-prinsip untuk perbankan, pembiayaan dan investasi yang bertanggung jawab	60
Implementasi kebijakan dan tanggung jawab – pertanyaan kelompok	7	Pernyataan	25	Elemen-elemen pokok dari kebijakan NDPE	61
Tanggapan HSBC	7	IOI	27	CATATAN AKHIR	64
RSPO – bukan pendekatan untuk kepatuhan	8	Studi kasus: Pengaduan RSPO tidak sesuai untuk tujuannya	28	AKRONIM	70
Metodologi data keuangan	10	Pernyataan	29	METODOLOGI	71
Izin hukum yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit	11	GRUP NOBLE	31	REFERENSI	74
		Studi kasus: PT Henrison Inti Persada, Kabupaten Sorong, Papua Barat, dan PT Pusaka Agro Lestari, Kabupaten Mimika, Papua	33		
		Pernyataan	35		
		POSCO DAEWOO CORPORATION	37		
		Studi kasus: PT Bio Inti Agrindo, Papua	39		
		Pernyataan	41		
		GRUP SALIM/INDOFOOD	43		
		Studi kasus: Isuy Makmur/Kedang Makmur	45		
		Studi kasus: konsesi-konsesi PT Lonsum	46		
		Studi kasus: PT Gunta Samba Jaya	46		
		Struktur korporasi PT Gunta Samba dan PT Gunta Samba Jaya	48		
		Manajemen bersama atau kontrol penuh – apakah Anthoni Salim mengendalikan PT Gunta Samba Jaya?	50		
		Ringkasan	53		
		Pernyataan	53		



22 Oktober 2015, Kalimantan Tengah:
Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kapuas.
©RANTE/GREENPEACE

MINYAK SAWIT: RISIKO BAGI LINGKUNGAN, MASYARAKAT, PERUSAHAAN DAN BANK

Dalam dua dekade terakhir ini, sektor perkebunan telah menghancurkan hutan dan lahan gambut Indonesia. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi konsesi pulp dan kelapa sawit. Kerusakan ini menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada satwa liar, iklim dan masyarakat.¹

Sebuah penelitian dari Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang dewasa di kawasan yang terbakar telah meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai akibat polusi dari asap kebakaran hutan dan lahan gambut.²

Kerugian keuangan juga tidak kalah besarnya. Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar – dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia di tahun 2014 – dan mengakui bahwa ‘dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi’.³ Pada September dan Oktober 2015, emisi gas rumah kaca (GRK) harian dari kebakaran tersebut terus melampaui emisi gas rumah kaca harian Amerika Serikat.⁴

Tidak dapat disangkal lagi, ini adalah krisis – dan para perusahaan di sektor perkebunan di Indonesia berada dalam pusat krisis ini. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa di provinsi Riau dan Kalimantan Barat yang merupakan provinsi kunci penghasil minyak sawit, sekitar setengah dari titik api kebakaran yang tercatat pada tahun 2015, teridentifikasi berada di dalam konsesi bubur kertas atau kelapa sawit.⁵ Di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, 48%-nya berada dalam konsesi kelapa sawit saja.⁶ Ekspansi perkebunan juga mengancam keanekaragaman hayati. Misalnya, pada tahun 2016, IUCN telah mengubah klasifikasi Orangutan Kalimantan dari ‘terancam’ menjadi ‘nyaris punah’, dan menyatakan bahwa ‘perusakan, degradasi dan fragmentasi habitat mereka’ termasuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan, adalah penyebab utama penurunan populasi mereka.⁷ Sebagian dari industri ini juga terlibat dalam kasus eksploitasi, termasuk eksploitasi pekerja anak, serta pengambil alihan lahan tanpa persetujuan dari masyarakat setempat, atau perusakan lahan mata pencaharian seperti perkebunan sagu (lihat studi kasus).

SEKTOR KEUANGAN GAGAL MENDUKUNG AKSI UNTUK MENGATASI MASALAH DEFORESTASI

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penanam, pedagang dan perusahaan konsumen kelapa sawit telah menerbitkan kebijakan yang berupaya membebaskan rantai pasok mereka dari kelapa sawit yang terkait dengan perusahaan nakal yang melakukan ekspansi destruktif dan eksploitasi sosial. Masih menjadi pertanyaan seberapa efektif implementasi kebijakan ‘Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi’ (NDPE) mereka ini. Pada September 2016, laporan Greenpeace⁸ menunjukkan bagaimana para pemasok beberapa pedagang minyak sawit terbesar di dunia, terlibat deforestasi, perusakan lahan gambut, eksploitasi pekerja – termasuk anak-anak – dan konflik masyarakat atau tindakan represif seperti penggunaan aparat keamanan negara. Senada dengan itu, pada bulan Desember 2016, Amnesty International melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia marak terjadi di perkebunan yang dikuasai oleh Wilmar, pedagang minyak sawit terbesar di dunia.⁹

Meskipun demikian, setidaknya ada suatu konsensus yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan, menjual atau memperdagangkan minyak sawit (dan komoditas risiko tinggi lainnya) harus mengambil tindakan yang berarti untuk memastikan bahwa rantai pasok mereka tidak mengakibatkan deforestasi ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk bank-bank yang terus memberikan layanan keuangan ke dan berinvestasi di sektor kelapa sawit. Meskipun lembaga-lembaga keuangan telah mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial dari produksi minyak sawit,¹⁰ di dunia perbankan, keprihatinan ini belum diterjemahkan dalam komitmen NDPE yang rinci yang sudah diadopsi oleh sektor-sektor lainnya. Dengan menyediakan pembiayaan tanpa proses kajian yang cukup terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, bank-bank tersebut memungkinkan berlanjutnya praktik-praktik destruktif sektor minyak kelapa sawit, dan di saat yang sama, menempatkan risiko finansial jangka panjang bagi diri mereka sendiri (lihat ‘Perusakan hutan – sebuah bisnis berisiko’).

Sulit untuk mengukur skala bank yang mendanai sektor kelapa sawit, karena kurangnya penyingkapan informasi baik oleh pihak bank maupun perusahaan, tetapi bukti yang ada menunjukkan bahwa skalanya sangat signifikan. Data dari Bloomberg dan laporan-laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa sejak 2012, ke-18 bank global yang tercantum dalam tabel ‘Bank-bank lain’ terkait dengan perusahaan-perusahaan dalam studi kasus, telah terlibat menyediakan pembiayaan, paling tidak sebesar US\$23,6 milyar kepada enam perusahaan yang diulas dalam laporan ini, dalam bentuk pinjaman dan fasilitas kredit lainnya.

Dengan tingkat paparan informasi sejauh ini, adalah menjadi tanggung jawab dari lembaga keuangan untuk menggunakan pengaruh mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka danai atau tempat mereka berinvestasi untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan sosial mereka.

Laporan ini memiliki fokus utama pada peran bank sebagai penyedia fasilitas kredit dan jasa keuangan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang praktik merusaknya dijabarkan di sini. Laporan ini juga menetapkan prinsip-prinsip agar diadopsi oleh lembaga investor pada bagian penutup, ‘Model untuk perbankan yang bertanggung jawab’.



HSBC

JANGAN PERCAYA PADANYA



2013, Kalimantan Timur:
Seorang pengasuh memeluk orangutan muda
yang diselamatkan oleh Center for Orangutan
Protection dari konsesi PT Gunta Samba Jaya
di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
©COP

HSBC Holdings plc, yang berkantor pusat di Inggris, saat ini adalah salah satu penyedia jasa keuangan terbesar bagi industri kelapa sawit.¹¹ HSBC memiliki kebijakan yang lengkap terkait komoditas kehutanan dan pertanian (termasuk bagian spesifik mengenai minyak sawit). Mereka mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan ini 'melarang pembiayaan (yang menyebabkan) deforestasi', meskipun banyak perusahaan yang mereka daniai terus menghancurkan hutan.

Kebijakan HSBC diranking cukup tinggi dibandingkan dengan kebijakan bank-bank lain,¹² namun masih berada di bawah apabila dibandingkan dengan kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi' yang telah menjadi standar di sektor lain. Kebijakan komoditas pertanian HSBC gagal mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang terlibat deforestasi, dan mereka sepenuhnya mengandalkan keanggotaan dan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai tanda kepatuhan terhadap keberlanjutan¹³ meskipun banyak kritikan yang luas terhadap standar RSPO dan penagakannya (lihat 'RSPO – buka proxy untuk keberlanjutan'). Menariknya, laporan oleh analis HSBC sendiri pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pihak bank sudah menyadari kelemahan-kelemahan RSPO dan perlunya tindakan untuk memperkuat kebijakan, terutama untuk melampaui RSPO, dengan mewajibkan lebih dari sekadar keanggotaan RSPO sebagai bukti komitmen terhadap keberlanjutan, menjadikan lahan gambut sebagai 'daerah terlarang' dan memastikan transparansi dan asal usul rantai pasok sepenuhnya.¹⁴ Rekomendasi-rekomendasi ini tampaknya tidak diperhitungkan, ketika kebijakan HSBC direvisi pada tahun 2014.

HSBC TERUS MENYOKONG PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN EKSPLOITASI

Meskipun telah menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan, beberapa tahun belakangan ini, HSBC sudah memulai atau tetap mempertahankan hubungan finansial (termasuk menyediakan atau mengatur pinjaman) dengan perusahaan maupun kelompok usaha yang mengoperasikan konsesi kelapa sawit yang terkait dengan aspek yang paling tidak berkelanjutan dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2012, bank ini telah terlibat dalam mengatur pinjaman dan fasilitas kredit lainnya dengan US\$16,3 milyar untuk enam perusahaan yang diulas dalam laporan ini, serta mengucurkan US\$2 milyar dalam obligasi korporat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus ini, selain kebijakan HSBC yang tidak memadai, bank ini juga memberikan layanan kepada perusahaan yang melanggar kebijakan-kebijakan mereka. Kaitannya ke beberapa perusahaan paling merusak di sektor ini membawa risiko serius pada reputasi HSBC, selain risiko keuangan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.

Bukti bahwa perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima ini tersedia luas di ranah publik: perusahaan-perusahaan ini telah ditegur atau dibekukan operasinya oleh RSPO, pernah disebut oleh Pemerintah Indonesia terkait kebakaran yang tak terkendali,¹⁵ dan/atau menjadi subyek dari banyak laporan kritis dari Lembaga non pemerintah (NGO) sosial dan lingkungan.

Bahkan uji kelayakan yang paling mendasar pun pada perusahaan-perusahaan ini seharusnya telah memberi peringatan, yang menimbulkan pertanyaan: apakah HSBC gagal dalam menerapkan seluruh kebijakannya atau hanya gagal untuk menerapkan penelitian yang memadai ketika menilai apakah nasabah mereka saat ini atau calon nasabah mereka mematuhi kebijakannya?

Bumitama, Indofood, IOI, Noble dan Goodhope, kesemuanya adalah anggota RSPO, namun strategi pengembangan minyak sawit mereka masih bergantung pada konversi lahan gambut dan hutan, termasuk daerah-daerah bernilai konservasi tinggi (NKT). Penggunaan sertifikasi

RSPO oleh HSBC sebagai cara pendekatan untuk keberlanjutan, berarti memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut menerima pinjaman tanpa pemeriksaan lebih lanjut, meskipun dalam semua kasus terbukti Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan telah dilanggar (lihat studi kasus). POSCO Daewoo bahkan bukan anggota RSPO dan tampaknya HSBC mengabaikan operasi kelapa sawit mereka beserta dampaknya ketika menyetujui pinjaman kepada bagian-bagian lain dari konglomerasi.

Pernyataan HSBC pada bulan Oktober 2016 tentang perubahan iklim dengan sungguh-sungguh mengklaim bahwa bank tersebut telah 'berhenti memberikan layanan perbankan kepada beberapa nasabah (seperti beberapa perusahaan sektor kehutanan)' berdasarkan standar bank, namun tidak mengatakan perusahaan-perusahaan mana saja yang dimaksud.¹⁶ Ketika Greenpeace mengarahkan dugaan-dugaan dalam laporan ini kepada HSBC, pihak bank menolak untuk berbicara tentang klien-klien tertentu, menyatakan bahwa 'praktik kerahasiaan klien membatasi kami dalam memberikan rincian tentang hubungan-hubungan tertentu.'¹⁷

Dengan terbukanya hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, HSBC harus menjelaskan bagaimana mereka berniat merevisi kebijakannya yang sudah ada agar sejalan dengan standar 'Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi' (NDPE) yang telah menjadi norma untuk sektor-sektor lain. HSBC harus transparan tentang perusahaan-perusahaan kelapa sawit (dan konglomerasi yang berminat pada kelapa sawit) dalam basis kliennya, harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini dan menetapkan tenggat waktu bagi mereka untuk menerapkan kebijakan NDPE yang mencakup seluruh operasi mereka.

Perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengadopsi standar yang kuat untuk mencegah pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia harus dikeluarkan dari pembiayaan kembali (*refinancing*) dan dari penerimaan jasa keuangan baru atau perpanjangan layanan keuangan.

SEKILAS TENTANG HSBC

Kantor Pusat: Inggris, kantor di 71 negara¹⁸

Terdaftar di: Inggris

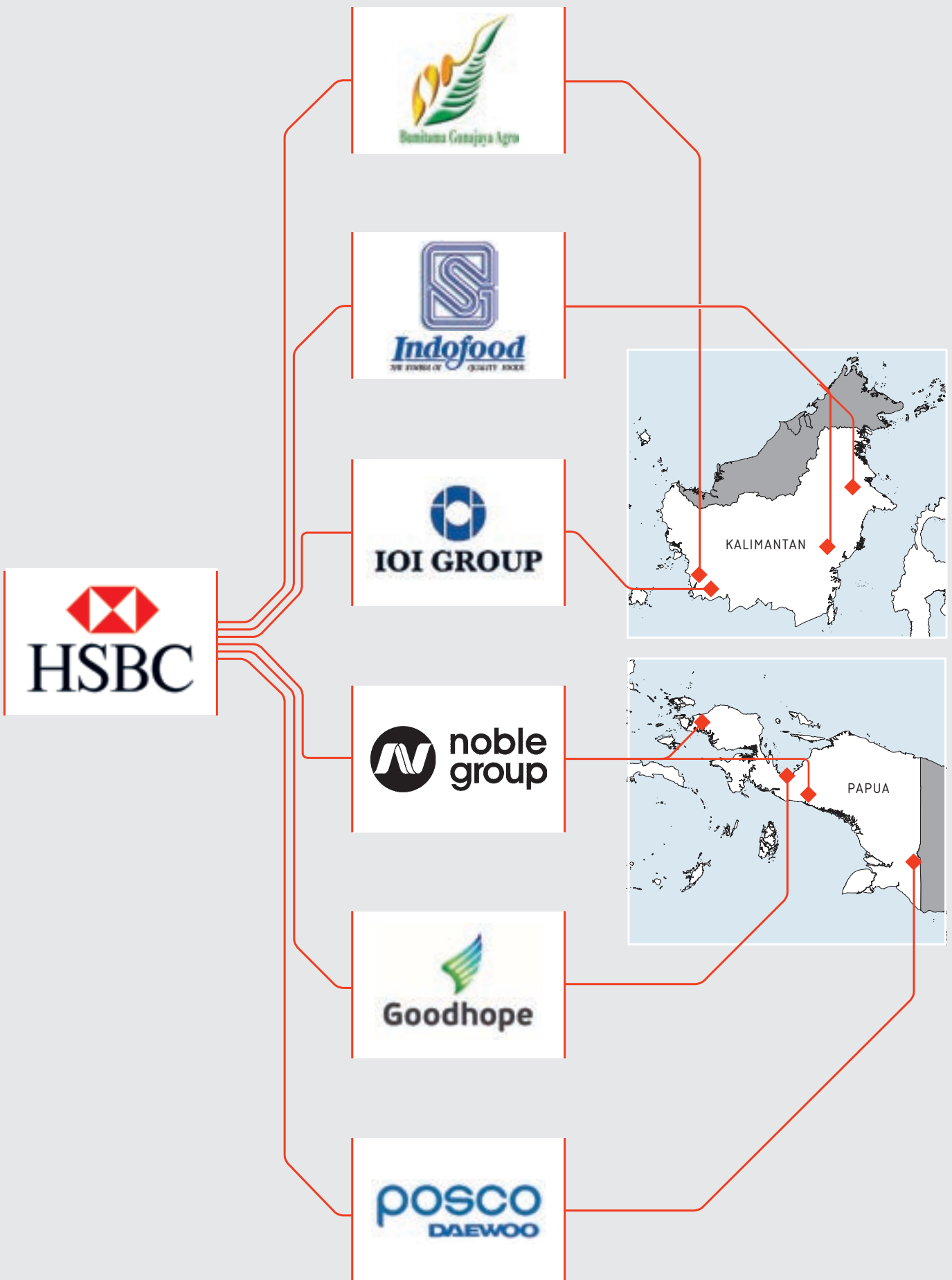
Nilai: US\$2.557 milyar akhir bulan September 2016¹⁹

HSBC adalah salah satu dari sepuluh bank terbesar di tahun 2016, dan bank terbesar yang berbasis di Eropa.²⁰ Bank ini juga merupakan perusahaan publik terbesar ke-14 di dunia pada tahun 2015.²¹

Bank ini telah memiliki kebijakan keberlanjutan yang meliputi sektor kehutanan dan pertanian sejak tahun 2004, dan pada tahun 2016 mengakui perlunya untuk beralih ke ekonomi rendah karbon.²² Bank ini juga diranking tinggi untuk kebijakan lingkungan dan deforestasinya dalam survei oleh organisasi-organisasi lain, terakhir oleh prakarsa Forest 500 dari Global Canopy Program.²³ Meskipun demikian, bank ini masih terus mendanai perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek di sektor tinggi karbon termasuk batu bara²⁴ dan kelapa sawit.



KAITAN HSBC DENGAN KELOMPOK USAHA MINYAK SAWIT PERUSAK



BUMITAMA

HSBC memberikan pinjaman (sebagai bagian dari konsorsium bank) kepada anak perusahaan kelapa sawit.

PT Andalan Sukses Makmur (PT ASMR), Kalimantan Tengah; PT Karya Bakti Agro Sejahtera (PT KBAS) dan PT Ladang Sawit Mas (PT LSM), Kalimantan Barat

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (PT ASMR, PT KBAS, PT LSM)
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (PT ASMR, PT LSM)
- Pembangunan di lahan gambut (PT ASMR, PT LSM), terutama di satu lahan basar Ramsar (PT ASMR)
- Operasi ilegal: penyimpangan izin termasuk melakukan pembangunan tanpa izin (PT KBAS)
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)

GOODHOPE/CARSON CUMBERBATCH

HSBC memberikan pinjaman (sebagai bagian dari konsorsium bank) kepada anak perusahaan kelapa sawit.

PT Nabire Baru (PT NB), Papua

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan perkebunan di atas lahan gambut
- Operasi ilegal: penyimpangan izin termasuk melakukan pembangunan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- Eksploitasi: mengambil alih tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan menggunakan aparat keamanan negara untuk menindas pihak setempat yang menentang
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)

IOI

HSBC memberikan pinjaman (sebagai bagian dari konsorsium perbankan) kepada induk kelompok usaha.

PT Berkat Nabati Sejahtera (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) dan PT Sukses Karya Sawit (PT SKS), Kalimantan Barat dan Pelita, Sarawak, Malaysia

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan di atas lahan gambut
- Kebakaran: kebakaran yang meluas pada tahun 2014 dan 2015, dan penanaman di lahan bekas kebakaran
- Operasi ilegal: penyimpangan izin termasuk pembangunan tanpa izin dan menanam di luar batas konsesi
- Pelanggaran hak-hak masyarakat atas lahan
- Penangguhan sementara sertifikasi RSPO
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)

GRUP NOBLE

HSBC memberikan pinjaman (sebagai bagian dari konsorsium perbankan) kepada induk kelompok usaha.

PT Henrison Inti Persada (PT HIP), Papua Barat; PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL), Papua

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (PT HIP, PT PAL)
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (PT PAL)
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat dan tidak terpenuhinya prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) (PT HIP)
- Konflik sosial yang signifikan (PT HIP, PT PAL)
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)

POSCO DAEWOO

HSBC memberikan pinjaman (sebagai bagian dari konsorsium perbankan) kepada beberapa bagian dari konglomerasi.

PT Bio Inti Agrindo (PT BIA), Papua

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Penggunaan api untuk pembukaan lahan
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat dan tidak terpenuhinya prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
- Bukan anggota RSPO

GRUP SALIM/INDOFOOD

HSBC memberikan pinjaman sebagai penyedia pinjaman tunggal; induk perusahaan juga menerima pinjaman dari HSBC.

Isuy Makmur/Kedang Makmur dan PT Gunta Samba Jaya (PT GSJ), Kalimantan Timur; konsesi-konsesi PT Lonsum, Sumatera Utara

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (Isuy Makmur/Kedang Makmur, PT GSJ)
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (Isuy Makmur/Kedang Makmur, PT GSJ)
- Kemungkinan deforestasi di lahan gambut (Isuy Makmur/Kedang Makmur)
- Eksploitasi: penggunaan pekerja anak, membayar di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan (konsesi-konsesi PT Lonsum)
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN HSBC TAHUN 2014

NOL DEFORESTASI

Sebelum tahun 2014, HSBC hanya memiliki satu 'kebijakan untuk lahan hutan dan hasil hutan', yang menyatakan bahwa 'HSBC tidak akan membiayai pembangunan perkebunan yang merupakan hasil konversi dari hutan alam sejak bulan Juni 2004 ... kecuali perkebunan-perkebunan tersebut telah disertifikasi secara independen atau dipastikan tidak memiliki dampak negatif pada hutan dengan nilai konservasi tinggi (NKT).'²⁵

Pada tahun 2014, kebijakan ini digantikan oleh dua kebijakan terpisah: yaitu mengenai komoditas pertanian, yang meliputi minyak sawit, sedangkan lainnya mengenai sektor kehutanan, yang meliputi usaha di bidang penebangan, pengolahan kayu serta bubur kertas.

Kebijakan komoditas pertanian HSBC menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan 'Bisnis yang dilarang' adalah:

HSBC tidak akan dengan sengaja memberikan layanan keuangan kepada penanam dan pabrik yang terlibat dalam: operasi ilegal; pembukaan lahan dengan api; konversi kawasan-kawasan (yang seringkali merupakan hutan) yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai konservasi tinggi; eksploitasi dan menggunakan buruh anak atau kerja paksa; pelanggaran hak-hak masyarakat setempat, seperti prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan; dan operasi-operasi di mana terdapat konflik sosial yang signifikan. HSBC memperluas kebijakan ini untuk para penyuling dan pedagang, di mana dapat dilakukan pemeriksaan.⁰

Dengan hanya melindungi daerah dengan nilai konservasi tinggi, kebijakan HSBC ini masih jauh di bawah standar 'nol deforestasi' yang diadopsi oleh para penanam, pedagang dan pengguna akhir kelapa sawit terkemuka, yang melindungi semua hutan alam, sebagaimana didefinisikan menggunakan pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT).²⁷

Bagaimanapun, kebijakan tersebut juga jauh lebih lemah dari kebijakan sektor kehutanan HSBC. Kebijakan ini meletakkan 'hutan yang dikonversi menjadi perkebunan atau untuk penggunaan non kehutanan (deforestasi)' di bawah 'Bisnis yang dilarang'.²⁸ P&C RSPO juga mengeluarkan penanaman yang menggunduli hutan primer.²⁹

Pernyataan HSBC bulan Oktober 2016 tentang perubahan iklim mengabaikan kontradiksi ini dan menyatakan bahwa 'Kebijakan Kehutanan dan Komoditas Pertanian tahun 2014 kami melarang pembiayaan deforestasi'.³⁰ Bank ini mengakui deforestasi 'sangat penting' sebagai sumber emisi dan penyerap karbon serta untuk keanekaragaman hayati.³¹

PERLINDUNGAN LAHAN GAMBUT

Pengantar kebijakan komoditas pertanian HSBC dengan tepat menyatakan bahwa 'pengeringan lahan gambut dapat mendorong perubahan iklim dengan melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca'.³² Meskipun demikian, kebijakan yang dikeluarkan setelahnya tidak berisi ketentuan khusus yang menentang perkebunan di atas lahan gambut, meskipun lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 m di Indonesia secara otomatis digolongkan sebagai nilai konservasi tinggi.³³

Lebih lanjut, ketika berbicara tentang implementasinya, kebijakan komoditas pertanian HSBC sepenuhnya mengandalkan keanggotaan dan sertifikasi di bawah RSPO. Bank ini mewajibkan semua kliennya

untuk menjadi anggota RSPO sebelum tanggal 20 Juni 2014, untuk memiliki setidaknya satu unit manajemen yang tersertifikasi sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan untuk memiliki rencana bertenggat waktu untuk 100% sertifikasi unit manajemen sebelum tanggal 31 Desember 2018. Ini secara efektif memasukkan prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO ke dalam standar kebijakan.

Prinsip dan Kriteria mengarahkan perusahaan untuk menghindari 'penanaman ekstensif di ... tanah rapuh, termasuk gambut' untuk pembangunan baru,³⁴ disertai panduan agar hal ini seharusnya tidak melebihi 100 hektar dalam suatu pengembangan.³⁵ Standar ini juga menegaskan bahwa penggunaan api untuk persiapan lahan harus dihindari.³⁶

Sebuah kebijakan terpisah HSBC mencakup Situs Warisan Dunia dan lahan basah yang memiliki kepentingan internasional yang tercantum di bawah Konvensi Ramsar 1971. Kebijakan ini menyatakan bahwa 'HSBC tidak ingin mendukung proyek-proyek yang dapat mengakibatkan ... karakteristik-karakteristik khusus dari lahan basah Ramsar terancam'.³⁷ Meskipun daftar lahan basah Ramsar tidak mencakup sebagian besar lahan gambut Indonesia, Indonesia memiliki sembilan situs Ramsar yang meliputi lahan gambut penting di daerah-daerah dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang luas, seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jambi (Sumatera), menjadikan masalah ini relevan dengan hubungan bank dengan perusahaan kelapa sawit.³⁸

Kegagalan HSBC untuk memasukkan pengeringan dan pembangunan di atas lahan gambut di bawah tajuk 'bisnis yang dilarang' bertentangan dengan pernyataannya di tahun 2016 tentang perubahan iklim, yang menunjukkan bahwa bank ini bertujuan menghindari pembiayaan 'infrastruktur ... yang bisa "mengunci" tambahan emisi gas rumah kaca selama bertahun-tahun'.³⁹ Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter telah lama dilindungi oleh hukum Indonesia,⁴⁰ dan banyak peraturan Kementerian Pertanian⁴¹ tidak mengizinkan penerbitan izin pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, meskipun penegakan hukum-hukum tersebut amat kurang. Sejak tahun 2011, Indonesia telah memiliki moratorium penerbitan konsesi baru yang mencakup hutan primer atau lahan gambut.⁴² Larangan yang jelas terhadap setiap pembukaan baru atas lahan gambut terlepas berapapun kedalamannya, termasuk di konsesi yang ada, telah dikomunikasikan kepada industri perkebunan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggal 3 November 2015,⁴³ dan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian dua hari kemudian.⁴⁴ Revisi terhadap peraturan gambut⁴⁵ yang dilakukan Indonesia di bulan Desember 2016 menyatakan kembali hal ini melalui moratorium pengembangan baru di atas lahan gambut, termasuk di konsesi yang ada, sambil melaksanakan pemetaan lahan gambut dan menetapkan zonasi untuk wilayah konservasi atau pengembangan. Ini adalah sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, yang berarti bahwa pembangunan di atas lahan gambut adalah melanggar hukum untuk waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Mengingat komitmen iklim HSBC, pengakuannya yang jelas bahwa 'pengeringan lahan gambut' adalah salah satu dampak negatif dari pengembangan kelapa sawit⁴⁶ dan standar RSPO di mana bank ini menerapkan kebijakannya, studi-studi kasus dalam laporan ini memperlakukan pembangunan di lahan gambut sebagai pelanggaran terhadap kebijakan HSBC.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB – PERTANYAAN KELOMPOK

Kerangka-kerangka kerja yang ada untuk keberlanjutan di sektor keuangan, seperti Prinsip-prinsip Equator⁴⁷ dan sebagian besar kebijakan bank-bank (lihat tabel kebijakan 'Bank-bank lain'), melihat keberlanjutan pada tingkat proyek, dengan tujuan untuk menghindari proyek-proyek tertentu yang memiliki dampak negatif besar. Pendekatan ini gagal untuk menaruh tanggung jawab atas dampak-dampak itu kepada perusahaan dan kelompok usaha di balik proyek-proyek ini dan memungkinkan bank untuk melanjutkan hubungan dengan bagian-bagian lain dari kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan ini juga mengabaikan pengaturan kelompok yang kompleks yang dapat dirancang untuk menghindari tanggung jawab.

Dalam konteks ini, tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa bagian atau anak perusahaan tertentu dari suatu perusahaan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merusak. Tanggung jawab perlu diterapkan di tingkat kelompok, dan melampauinya ke pemegang saham yang memegang kendali (mayoritas), untuk mencegah terciptanya bagian perusahaan yang merusak namun menguntungkan. Ini berarti penapisan untuk menerapkan kebijakan bank harus memperlakukan konglomerasi sebagai satu kesatuan berdasarkan keterkaitan kontrol dan kepemilikan, daripada hanya melihat nama, merek atau lokasi tertentu.

Prinsip tanggung jawab tingkat kelompok ditunjukkan dalam keputusan Dana Pensiun Global Pemerintah negara Norwegia tahun 2015 untuk mengecualikan kelompok POSCO dari Korea serta anak perusahaannya Daewoo dari investasi negara Norwegia menyusul adanya bukti bahwa anak perusahaan kelapa sawit Daewoo PT Bio Inti Agrindo membuka hutan primer di Indonesia:

Dewan mengikuti prinsip pemandu bahwa jika induk perusahaan adalah pemilik yang mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan juga harus dikecualikan jika anak perusahaannya melanggar pedoman ini. Sebagai pemilik yang memegang kendali, induk perusahaan memiliki pengaruh untuk menentukan kegiatan anak perusahaannya.⁴⁸

Dalam industri minyak sawit, beberapa pedagang (seperti Wilmar⁴⁹), dan perusahaan konsumen telah memasukkan prinsip tanggung jawab tingkat kelompok dalam kebijakan keberlanjutan mereka ketika menerapkan kebijakan ini kepada operasi pemasok pihak ketiga. Implementasinya masih problematis, di mana para pedagang dan perusahaan konsumen masih belum secara efektif mengecualikan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan, namun prinsip ini tengah diperkenalkan dan bank-bank juga seharusnya tidak boleh ketinggalan dengan menerapkan hal yang serupa.

TANGGAPAN HSBC

Ketika diperlihatkan data-data keuangan dan bukti-bukti pelanggaran kebijakan yang didokumentasikan dalam laporan ini, HSBC menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tinjauan terhadap terbukanya hubungan bank dengan sektor minyak kelapa sawit menyusul permintaan dari pihak yang berkepentingan, termasuk Greenpeace.⁵⁰ angka-angka awal dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 bank telah menghentikan hubungan dengan 93 klien di sektor kelapa sawit, yang dalam sebagian besar kasus disebabkan karena pelanggan 'tidak atau tidak ingin memenuhi kebijakan HSBC'. Namun, HSBC tidak mau menyebutkan nama-nama klien ini, menyatakan bahwa 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk menanggapi hubungan-hubungan tertentu'.⁵¹ Delapan puluh tiga (83) pelanggan lainnya dinilai telah memenuhi atau 'berada di jalur yang kredibel' menuju pemenuhan kebijakannya. HSBC tidak menyatakan berapa banyak klien yang dimiliki secara keseluruhan di sektor kelapa sawit.

HSBC menegaskan kembali bisnis yang dilarang yang tercantum dalam kebijakan komoditas pertaniannya,⁵² menyatakan bahwa mereka 'tidak menyediakan layanan keuangan yang secara langsung menyokong perusahaan kelapa sawit yang tidak mematuhi kebijakan kami'.⁵³ Tidak ada rincian yang diberikan tentang setiap tindakan yang diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh enam perusahaan yang disorot dalam laporan ini.

Berkenaan dengan jasa keuangan yang diberikan kepada konglomerasi yang memiliki divisi kelapa sawit, HSBC telah menyiapkan sejumlah pilihan yang dipertimbangkan, termasuk mewajibkan persyaratan-persyaratan bahwa pembiayaan tidak dapat digunakan untuk operasi sawit yang tidak mematuhi kebijakannya atau bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi keberlanjutan dibagi kepada publik oleh pelanggan, atau, dalam beberapa kasus, menghentikan hubungan. Sekali lagi, HSBC tidak menyatakan perusahaan yang mana atau berapa banyak perusahaan yang telah dikenakan persyaratan-persyaratan ini, atau apakah persyaratan-persyaratan ini telah dipenuhi.

HSBC juga menegaskan bahwa mereka bergantung pada RSPO untuk standar-standar yang diharapkan HSBC dari klien-kliennya, dan bahwa 'keputusan sertifikasi pada akhirnya diambil oleh klien kami.' Namun, mereka menyatakan bahwa kerjasama dibuat di 'tingkat manajemen eksekutif tertinggi untuk mendukung manfaat dari pendekatan yang berkelanjutan'. Tidak ada rincian yang diberikan tentang kerjasama seperti itu dengan salah satu perusahaan kelapa sawit yang disebutkan dalam laporan ini.⁵⁴

RSPO – BUKAN PENDEKATAN UNTUK KEPATUHAN

*'Keanggotaan RSPO semata tidaklah cukup untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja baik dalam keberlanjutan atau bahwa bagian dari rantai nilai minyak sawit mereka adalah berkelanjutan.'*⁵⁵

- HSBC Global research

Banyak bank internasional besar telah mengadopsi kebijakan

kelapa sawit yang menerima standar RSPO sebagai proxy untuk keberlanjutan. Pengadopsian ini dilakukan terlepas dari masalah-masalah utama yang berkaitan dengan standar RSPO dan implementasinya:

- Standar-standar RSPO tidak sama dengan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).⁵⁶
- Sebagian besar anggota RSPO belum tersertifikasi keseluruhan operasinya.⁵⁷
- Penegakan standar lemah, proses pengaduan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun⁵⁸ dan beberapa perusahaan melanggar standar secara masif, misalnya dengan membangun di kawasan

Kebijakan Lingkungan HSBC		2012	2013
BUMITAMA	Pinjaman/Obligasi/Jasa	3 April - Penerbitan prospektus IPO. HSBC bertindak sebagai manajer penerbit bersama, bookrunner dan underwriter	11 Nov - \$120 juta pinjaman jangka tetap
	Pelanggaran Kebijakan HSBC		2012-13 - deforestasi, pembukaan lahan gambut dan perusakan daerah NKT di PT LSM dan PT ASMR
	Pengaduan RSPO	1 Jul - Pengajuan pengaduan atas PT HPA	10 Maret - Pengajuan pengaduan atas PT NKU 7 April - Pengajuan pengaduan atas PT LSM 18 September - Pengajuan pengaduan atas PT ASM
GOODHOPE	Pinjaman/Obligasi/Jasa		7 April - Pengajuan pengaduan atas PT LSM"
	Pelanggaran Kebijakan HSBC		Peta KLHK menunjukkan ribuan hektar kawasan hutan digunduli di PT NB sejak tahun 2011
	Pengaduan RSPO		20 March - PT SHP/PT SSH complaint filed
IOI	Pinjaman/Obligasi/Jasa	27 Juni - \$600 juta obligasi korporas	
	Pelanggaran Kebijakan HSBC		
	Pengaduan RSPO		
NOBLE GROUP	Pinjaman/Obligasi/Jasa		23 Desember - \$650 juta pinjaman jangka tetap
	Pelanggaran Kebijakan HSBC	2012-13 - peta KLHK menunjukkan pembukaan besar-besaran di PT HIP dan PT PAL	Dua pertiga konsesi PT PAL digolongkan sebagai Lanskap Hutan Utuh, deforestasi berlanjut
	Pengaduan RSPO		24 Oktober - Pengajuan pengaduan atas PT HIP
POSCO DAEWOO	Pinjaman/Obligasi/Jasa	14 Februari - tiga buah pinjaman sebesar \$500 juta, \$529 juta, \$700 juta (seluruhnya jangka tetap) 4 April - \$243 juta pinjaman jangka tetap 24 April - \$209 juta pinjaman jangka tetap	3 Juli - \$196 juta pinjaman jangka tetap
	Pelanggaran Kebijakan HSBC	Laporan kualitas air yang buruk, kematian satwa air dan masalah kesehatan di daerah hilir PT BIA	Sebagian besar bagian timur areal konsesi PT BIA diidentifikasi sebagai Lanskap Hutan Utuh
	Pengaduan RSPO		2013-14 - pembukaan besar-besaran di bagian utara areal konsesi
SALIM GROUP/ INDOFOOD	Pinjaman/Obligasi/Jasa	28 Juni - \$400 juta obligasi korporasi	16 April - \$400 juta obligasi korporasi, 16 Mei - \$160 juta pinjaman jangka tetap
	Pelanggaran Kebijakan HSBC		Perusakan habitat orangutan di PT GSJ
	Pengaduan RSPO		2013-14 - pembukaan 4.600 Ha di Isuy Makmur/Kedang Makmur, termasuk 1.000 Ha hutan primer, serta maraknya kebakaran
	Pengaduan RSPO		11 Februari - Centre for Orangutan Protection mengajukan pengaduan atas PT GSJ

Tidak ada satu pun dari daftar perusahaan yang telah mengatakan bahwa mereka akan memenuhi batas akhir dari HSBC per 31 Desember 2018 untuk sertifikasi RSPO di semua kebun kelapa sawit



15 September 2015, Ketapang:
1°17'52.04"S 110°4'37.5"E
Hutan gambut yang terbakar di dekat Taman
Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat.
©GREENPEACE

METODOLOGI DATA KEUANGAN

Data pinjaman dan obligasi diperoleh lewat lisensi dari Bloomberg dan hanya terbatas pada informasi tentang kesepakatan yang tersedia sejak 2012.⁵⁹ Informasi tambahan, termasuk informasi tentang jasa keuangan lainnya, diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Total pinjaman dan jumlah obligasi yang disebutkan dengan rinci dalam laporan ini adalah untuk semua kesepakatan yang diketahui sejak tahun 2012, termasuk yang telah jatuh tempo. Pinjaman dan obligasi HSBC yang disusun untuk masing-masing perusahaan kelapa sawit adalah yang diatur sejak tahun 2012 yang belum jatuh tempo. Pinjaman dan jasa keuangan HSBC lainnya yang tidak lagi aktif juga telah disebutkan dengan rinci apabila mereka menggambarkan hubungan keuangan langsung ke anak perusahaan kelapa sawit para konglomerasi di masa lalu.

Dalam banyak kasus, tidak ada kewajiban untuk membuka rincian pinjaman: perusahaan kepemilikan swasta (*privately held*) tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang kesepakatan pinjaman yang diatur oleh bank tunggal - bukan konsorsium - tidak dapat dipublikasikan dan dalam beberapa kasus hanya total pinjaman yang tersedia dan bukan jumlah yang dikontribusikan oleh masing-masing bank. Ini berarti bahwa informasi tentang jasa keuangan yang disediakan oleh bank-bank tertentu yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin

tidak lengkap. Jumlah aktual yang dikontribusikan oleh HSBC untuk masing-masing perusahaan akan dicantumkan apabila diketahui; jika tidak, jumlah total pinjaman yang diketahui yang melibatkan HSBC (baik sebagai agen, koordinator atau penjamin utama (*bookrunner*))⁶⁰ dan pengatur (*arranger*) serta pemberi pinjaman yang akan dicantumkan. Jasa keuangan lainnya (misalnya pemegang rekening utama) seringkali disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Kepemilikan saham dan obligasi belum dianalisis untuk laporan ini.

RINGKASAN PINJAMAN DAN OBLIGASI

HSBC memberikan layanan yang berbeda untuk kelompok-kelompok usaha yang dijelaskan dengan lengkap dalam laporan ini, tergantung pada pengaturan dari tiap-tiap kesepakatan, termasuk sebagai *bookrunner* dan *arranger*. Bank ini bertindak sebagai pemberi berbagai pinjaman kepada keenam kelompok usaha yang diulas dalam laporan ini. Semua pinjaman dan obligasi diberikan sebagai bagian dari konsorsium bank, yang sebagian di antaranya dicantumkan di tabel 'Bank-bank Lain' yang memiliki kaitan dengan perusahaan-perusahaan yang diinvestigasi dalam studi kasus, kecuali apabila disebutkan. Dalam beberapa kasus (Bumitama dan Goodhope), pinjaman diberikan secara langsung kepada anak perusahaan penanam kelapa sawit; dalam kasus lainnya pinjaman dan jasa keuangan yang berkaitan dengan penerbitan obligasi perusahaan diberikan kepada induk perusahaan (IOI, Noble, Indofood) atau anak perusahaan yang bergerak di sektor lain (POSCO Daewoo).

IZIN HUKUM YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PROSES PERIZINAN

Perkebunan kelapa sawit skala industri di Indonesia memerlukan izin baik untuk mendapatkan hak atas lahan dan untuk mengembangkan lahan. Proses ini mencakup izin-izin, pedoman dan dokumen legal sebagai berikut:

1. Biasanya, sebuah **perusahaan perseroan terbatas (PT)** Indonesia harus didirikan terlebih dahulu. Peraturan membatasi areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai per perusahaan atau kelompok perusahaan sampai dengan 100.000 ha di manapun di seluruh Indonesia. Luas total maksimum menjadi dua kali lipat yaitu 200.000 ha untuk operasi di Papua. Ada pengecualian untuk koperasi, BUMN dan perusahaan publik di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik.⁶¹
2. Pemerintah kabupaten dapat menerbitkan dokumen pendahuluan seperti **Izin Prinsip** atau **Izin Info Lahan**, yang menunjukkan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk mensurvei tanah bersangkutan dan berkonsultasi dengan pemilik tanah.
3. **Izin Lokasi (IL)** dikeluarkan oleh bupati (atau gubernur apabila areal izin membentang mencakup dua kabupaten).⁶² Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Izin Lokasi maupun Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan di luar daerah di mana pembangunan perkebunan diizinkan dalam tata ruang wilayah kabupaten.⁶³ Izin lokasi mengizinkan pemegang izin untuk memperoleh lahan selama tiga tahun, dengan persetujuan dari dan kompensasi bagi pemilik tanah,⁶⁴ dalam suatu daerah. Pembebasan lahan ini harus berdasarkan konsultasi dengan pemilik tanah saat itu, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan perkebunan lain dan masyarakat setempat. Perusahaan harus memperoleh minimal 51% dari tanah dalam konsesi bersangkutan dalam waktu tiga tahun atau izin tersebut kadaluwarsa.
4. Kawasan Hutan Negara merupakan suatu penamaan hukum dan tidak menunjukkan keberadaan fisik yang sebenarnya dari hutan alam di suatu daerah. Apabila daerah dimaksud meliputi kawasan hutan negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyetujui pelepasan kawasan hutan melalui **SK Pelepasan Kawasan Hutan**, dan area lahan yang dimaksud harus ditata batas dan statusnya diubah menjadi Areal Penggunaan Lain; APL. Pembukaan lahan dan operasi lainnya dalam kawasan hutan negara sebelum selesainya proses pelepasan adalah pelanggaran pidana menurut Undang-Undang Kehutanan.
5. **Izin Lingkungan** diterbitkan ketika Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Daerah puas dengan hasil AMDAL. AMDAL terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup; ANDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup; RPL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup; RKL). Merupakan tindak pidana menurut hukum lingkungan jika beroperasi tanpa memiliki izin ini.
6. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** diterbitkan oleh Bupati atau Gubernur (di mana areal yang dimaksud terletak di lebih dari satu daerah). Izin ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pembibitan dan melaksanakan persiapan lahan, serta pembukaan lahan di atas lahan bebas sengketa yang tercakup oleh ijin lokasi. Izin ini tidak dapat diterbitkan sebelum penerbitan izin lingkungan⁶⁵ dan tidak boleh diterbitkan untuk Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kecuali dengan persetujuan dari pemilik adat dari lahan bersangkutan.⁶⁶
7. **Plasma** adalah nama untuk perkebunan masyarakat, yang pengembangannya wajib difasilitasi oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perkebunan. Luasnya minimal harus setara dengan 20% dari total luas IUP.⁶⁷ Bantuan pendanaan diberikan dalam bentuk kredit, bagi hasil atau skema-skema serupa.
8. Menurut undang-undang pertanahan Indonesia, **Hak Guna Usaha (HGU)** harus diperoleh sebelum suatu perusahaan memulai operasi perkebunan secara penuh, meskipun operasi mungkin sudah dimulai di lahan tanpa sengketa dalam areal izin lokasi. Ini adalah hak sementara dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)⁶⁸ dan berlaku hingga 35 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun lagi. Setelah itu, HGU dapat diterbitkan kembali untuk perusahaan yang sama jika tanah tersebut masih digunakan untuk penggunaan yang sama. HGU dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat dialihkan kepada perusahaan lain.
9. **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)** harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan atau kontraktornya sebelum membuka hutan manapun yang masih memiliki sisa tegakan kayu komersial. IPK tidak langsung berhubungan dengan izin pembebasan lahan dan IUP; IPK diperlukan setelah hak Ijin Usaha Perkebunan (IUP) didapat, tetapi masih dapat diajukan setelah mendapatkan HGU, selama masih ada hutan yang belum dibuka.

Untuk mendapatkan IPK, perlu dilakukan survei tegakan kayu untuk menentukan besaran pajak. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. 59/2009 tentang biaya tegakan⁶⁹ untuk pengembangan lahan dan/atau hutan tanaman, pembayaran pajak kehutanan dan kontribusi Dana Reboisasi (DR) diperlukan, apabila daerah yang diusulkan tersebut mengandung lebih dari 50 m³ pohon berdiameter 30 cm ke atas. Jika survei mendapatkan kondisi tersebut, maka perusahaan harus menyetor jaminan kepada bank sebesar 100% dari hasil yang diharapkan. Kemudian, dan jika izin lingkungan dan (apabila berlaku) persetujuan pembebasan kawasan hutan telah diserahkan, IPK akan diterbitkan oleh Dinas Kehutanan setempat.

Prinsip 2 dari P&C RSPO mewajibkan 'kepatuhan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku', termasuk mendapatkan izin hukum yang diperlukan.⁷⁰

STUDI KASUS





© EIA



© YAYASAN PUSAKA



© GREENPEACE

13 November 2013, PT Andalan Sukses Makmur:

2°47'7.03"S 111°44'48.93"E

Eskavator membersihkan hutan gambut di sebuah konsesi Bumitama yang bersebelahan dengan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kumai, Kalimantan Tengah. Areal ini merupakan habitat dari banyak spesies yang hampir punah termasuk Orangutan dan Bekantan, termasuk juga tanaman Ramin. Analisis pemetaan Greenpeace dan investigasi lapangan mendokumentasikan pembangunan skala besar, termasuk pembukaan hutan gambut utuh di dalam zona penyangga yang diidentifikasi dalam penilaian NKT untuk konsesi.

©JUFRI/GREENPEACE





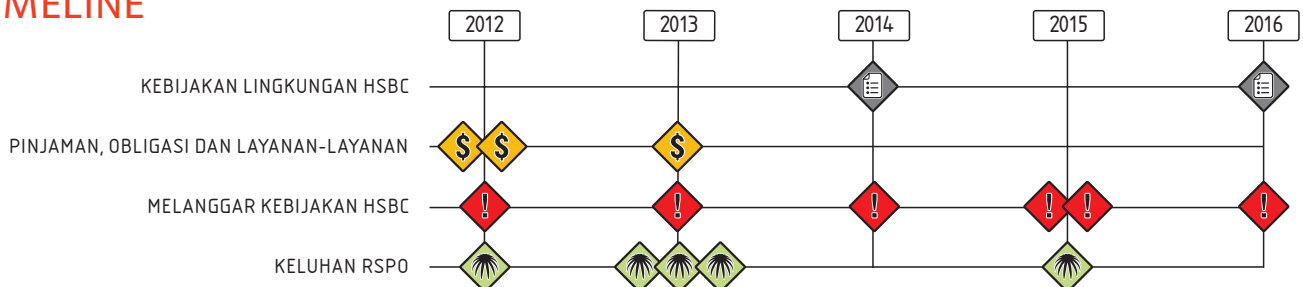
Perusahaan: Bumitama Gunajaya Agro (BGA) dan Bumitama Sawit Lestari (BSL)
Kelompok usaha: Bumitama Agri Ltd (BAL)
Kantor Pusat: Singapura
Terdaftar di bursa: Bursa Efek Singapura
Anggota RSPO: Ya

Bumitama Agri Ltd (BAL) adalah sebuah kelompok usaha yang terdiri dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Bumitama Gunajaya Agro (BGA) dan Bumitama Sawit Lestari (BSL).⁷¹ BAL terdaftar di Bursa Efek Singapura pada tanggal 12 April 2012.⁷² Pada bulan Maret 2015, pemilik utama BAL ini adalah keluarga Hariyanto (Lim) (51,45%)⁷³ dan IOI Corporation (30,48%).⁷⁴ CEO IOI Dato' Lee Yeow Chor adalah direktur BAL.⁷⁵ Ini menjadikan Bumitama sebagai perusahaan yang berkaitan erat dengan IOI dan dengan usaha (saham) keluarga Hariyanto lainnya.

KAITAN YANG DIKETAHUI SAAT INI DENGAN HSBC

FASILITAS	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	PEMINJAM	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Pembiayaan kembali pinjaman jangka tetap	US\$120 juta	Tidak diketahui	Bumitama Agri Ltd	11/11/2012	Salah satu dari tujuh pemberi pinjaman, koordinator, arranger, agen.
Pembiayaan kembali pinjaman berjangka tetap	US\$70 juta	Tidak diketahui	Bumitama Agri Ltd	05/08/2013	Salah satu dari tujuh pemberi pinjaman, bookrunner, arranger, agen
Total	US\$190 juta	Tidak diketahui			

TIMELINE



PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi PT Andalan Sukses Makmur (PT ASMR), Kalimantan Tengah; konsesi-konsesi PT Karya Bakti Agro Sejahtera (PT KBAS) dan PT Ladang Sawit Mas (PT LSM), Kalimantan Barat

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (PT ASMR, PT LSM, PT KBAS)
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (PT ASMR, PT LSM)
- Pembangunan di lahan gambut (PT ASMR, PT LSM), terutama salah satu lahan basah Ramsar (PT ASMR)
- Keterlibatan dalam operasi ilegal (tanpa izin) (PT KBAS)
- Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN BUMITAMA



PERKEBUNAN

Per Desember 2015, Bumitama menguasai total 23 perusahaan perkebunan⁷⁶ dan 12 pabrik minyak sawit mentah (CPO).⁷⁷ Disaat yang sama, perusahaan ini memiliki dan/atau menguasai cadangan lahan seluas 207.000 ha, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau⁷⁸ yang 164.177 ha di antaranya telah ditanami (termasuk 44.498 ha perkebunan plasma).⁷⁹ Pada titik ini, perusahaan tersebut melaporkan bahwa 'hanya 49,5% dari daerah yang telah kami tanam telah mencapai puncak usia produksi'.⁸⁰

PERMASALAHAN DAN PENGADUAN DI MASA LALU

Investigasi Greenpeace pada tahun 2012 dan 2013 mendokumentasikan aktivitas yang merusak atau ilegal di konsesi Bumitama di Kalimantan, termasuk penebangan hutan yang luas, konversi lahan gambut di areal konsesi baru yang dianggap termasuk dalam moratorium dan perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT termasuk habitat orangutan.⁸¹ Ini membawa dampak jangka panjang terhadap pada lanskap tempat di mana Bumitama beroperasi. Pada tahun 2015, investigasi Greenpeace menyoroiti bagaimana kebakaran yang parah terjadi di PT Andalan Sukses Makmur (PT ASMR) konsesi Bumitama, setelah konversi terus-menerus dari lahan gambut dan kawasan hutan, termasuk hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) dan habitat Orangutan.⁸² Konsesi tersebut terletak bersebelahan dengan – dan di satu waktu dalam sejarah izinnya sebagian arealnya tumpang tindih dengan – Taman Nasional Tanjung Puting, yang telah ditetapkan sebagai Situs Ramsar.⁸³ Kebijakan HSBC melarang 'dengan sengaja memberikan layanan keuangan yang secara langsung menyokong proyek-proyek yang mengancam karakteristik-karakteristik khusus dari ... lahan basah Ramsar'.⁸⁴

Pengaduan diajukan ke RSPO pada tahun 2013 atas kehancuran perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) yang mengancam Orangutan di tiga konsesi Bumitama ini,⁸⁵ dan RSPO menyarankan bahwa pelanggaran oleh kelompok usaha tersebut 'mungkin tidak bersifat *ad-hoc* tetapi sistemik'.⁸⁶

Pada saat itu, nyaris tak ada upaya dari Bumitama untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Pada awal tahun 2013, perusahaan mengaku telah menghentikan semua pembangunan di salah satu konsesinya (PT Ladang Sawit Mas, LSM), yang telah diperingatkan sebelumnya tentang keberadaan Orangutan, meskipun keberadaannya telah tercatat dalam analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) mereka pada tahun 2009. Bagaimanapun juga, upaya ini diperkuat oleh permintaan dari RSPO untuk menanggukkan operasi setelah pengaduan mulai ditindaklanjuti, analisis Greenpeace dari gambar satelit mengungkapkan bahwa sekitar 1.150 ha hutan dibuka antara bulan Desember 2012 dan Oktober 2013, dan 160 ha setelah bulan Juli 2013. Pembukaan ini mencakup areal hutan gambut yang luas.

Hingga bulan November 2013, hanya satu dari kedua anak perusahaan utama kelapa sawit yaitu Bumitama (BGA) yang menjadi anggota RSPO; yang lainnya (BSL) bukan. Bumitama mengalihkan keanggotaan RSPO kepada induk kelompok usahanya menyusul tekanan dari LSM dan RSPO sendiri,⁸⁷ setelah sebelumnya mencoba mengelak dari pengaduan RSPO terhadap konsesi BSL (PT ASMR) dengan alasan bahwa BSL bukanlah anggota RSPO.⁸⁸

HSBC memberikan pinjaman sebesar US\$ 70 juta untuk Bumitama pada bulan Agustus 2013. Pada tanggal ini, kelompok usaha ini menghadapi tiga pengaduan RSPO yang belum

terselesaikan (lihat 'Pengaduan RSPO terkait Bumitama'), satu berkaitan dengan legalitas dan dua lainnya berkaitan dengan perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT), dan pengaduan manapun dari ketiganya akan menempatkan Bumitama pada posisi yang melanggar 'kebijakan HSBC Tahun 2008 tentang sektor kehutanan dan produk hutan'.⁸⁹ Uji kelayakan seperti apa yang dilakukan HSBC sebelum menyepakati pinjaman ini?

PENGADUAN RSPO TERKAIT BUMITAMA

1 Juli 2012 (PT Hati Prima Agro) – diadakan oleh Sawit Watch – masalah keabsahan legalitas, operasi ilegal – pengaduan ditutup pada tanggal 21 April 2015.⁹⁰

10 Maret 2013 (PT Nabatindo Karya Utama) – diadakan oleh *Centre for Orangutan Protection* – masalah pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) termasuk habitat Orangutan – pengaduan ditutup pada tanggal 17 September 2015.⁹¹

7 April 2013 (PT Ladang Sawit Mas) – diadakan oleh *Friends of Borneo* dan *International Animal Rescue* – masalah pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) dan mengancam kehidupan Orangutan – pengaduan ditutup untuk pemantauan pada tanggal 13 Agustus 2014, pengaduan ditutup sepenuhnya pada tanggal 2 September 2015.⁹²

18 September 2013 (PT Andalan Sukses Makmur) – diadakan oleh *Friends of Borneo*, *Friends of the National Parks Foundation Indonesia*, *Siesfund Australia* – masalah pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) dan penanaman ilegal – pengaduan ditutup tanggal 14 Agustus 2015.⁹³

13 November 2015 (Bumitama Gunajaya Abadi) – diadakan oleh Sawit Watch – masalah operasi ilegal, kegagalan untuk membayar kompensasi – pengaduan ditutup untuk pemantauan pada tanggal 13 Juni 2016.⁹⁴

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN

Pada tahun 2015, Bumitama mengeluarkan kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi'⁹⁵ dan tiga pengaduan RSPO sebelumnya terhadap dirinya (lihat 'Pengaduan RSPO terkait Bumitama') ditutup.

SERTIFIKASI DAN TRANSPARANSI

Bumitama telah menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk mendapatkan sertifikat RSPO untuk sisa konsesi-konsesinya pada tahun 2020.⁹⁶ Ini berarti gagal dalam memenuhi tenggat waktu kebijakan HSBC untuk mendapatkan sertifikasi penuh pada tahun 2018.⁹⁷ Bumitama menyampaikan Komunikasi Perkembangan Tahunan 2015 ke RSPO, namun tidak membuka peta-peta konsesinya, dan menyatakan bahwa 'kedudukan hukum tentang peta elektronik yang tidak jelas. Risiko melanggar peraturan daerah jika membagi peta (merujuk pada surat dari Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Indonesia pada tanggal 13 Februari 2015)'.⁹⁸

KAITAN DENGAN PASAR

Menurut data perusahaan, Apical,⁹⁹ Cargill,¹⁰⁰ Golden Agri-Resources (GAR),¹⁰¹ IOI,¹⁰² Musim Mas¹⁰³ dan Wilmar¹⁰⁴ adalah para pelanggan Bumitama.

GAR, Wilmar dan – lewat para pedagang ini – IOI diketahui dipasok oleh PT LSM dan PT KBAS (GAR dan IOI).¹⁰⁵ AAK menolak untuk memberi konfirmasi atau menyangkal ada hubungan dagang apapun dengan Bumitama.¹⁰⁶

Astra Agro Lestari tidak memberikan konfirmasi atau menyangkal ada hubungan dagang apapun dengan Bumitama.



April 2013, PT Ladang Sawit Mas: International Animal Rescue Indonesia dan staf konservasi pemerintah menyelamatkan empat Orangutan, termasuk seekor Orangutan yang hamil dan seekor bayi Orangutan, dari konsesi kelapa sawit Bumitama di Ketapang, Kalimantan Barat. ©ALEJO SABUGO/IAR INDONESIA

STUDI KASUS: PENAWARAN SAHAM PERDANA BUMITAMA AGRI LTD PADA TAHUN 2012 MENGAKUI ADANYA ILEGALITAS

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- **Pembangunan ilegal tanpa izin**

Pada tanggal 12 April 2012, Bumitama meluncurkan penawaran saham publiknya (IPO) di Bursa Efek Singapura.¹⁰⁷ HSBC dan DBS Bank merupakan *bookrunner* untuk IPO tersebut.¹⁰⁸

Prospektus IPO menyatakan bahwa Bumitama 'memiliki dan/atau menguasai total 191.948 hektar lahan'.¹⁰⁹ Namun, prospektus tersebut mengingatkan calon investor bahwa 'Kelompok usaha kami mungkin menghadapi larangan dan batasan kepemilikannya dan pembebasan lahan'.¹¹⁰ Bahkan, hampir 80% dari cadangan lahan yang dikuasainya digambarkan sebagai 'tidak bersertifikat' - yang dijelaskan sebagai 'tanah yang haknya... belum diberikan pada pemegang lahan'.¹¹¹ Menurut prospektus tersebut, 120.504 ha berada pada lahan di mana bahkan izin awal untuk memperoleh hak atas tanah dari pemilik tanah saat ini (Izin Prinsip atau Izin Lokasi) sudah berakhir.¹¹² Dengan kata lain, Bumitama tidak lagi punya hubungan hukum formal dengan areal-areal tersebut, apalagi hak untuk memperoleh atau mengembangkannya untuk perkebunan.

Menurut prospektus tersebut, Bumitama pada tahun 2004 'telah memulai program penanaman yang agresif'.¹¹³ Antara

tahun 2004 dan tanggal 31 Desember 2011, perusahaan telah menanam 98.229 ha dengan kelapa sawit,¹¹⁴ pada saat IPO, total 119.162 ha tanah yang diklaim Bumitama dimiliki atau dikuasainya telah ditanami.¹¹⁵ Namun, Bumitama baru menyertifikasi hak tanah (untuk menggunakan hak pakainya) seluas sekitar 44.500 ha.¹¹⁶ Dengan mengasumsikan bahwa semua lahan yang perusahaan memiliki haknya telah dikembangkan, pihak perusahaan mengklaim menguasai sekitar 76.000 ha – areal yang lebih besar dari Singapura – yang telah ditanami sebelumnya tanpa hak lahan yang penuh, dan sebagian besar berada pada areal yang izinnya telah kadaluwarsa.

Selanjutnya, tujuan yang jelas dari IPO tersebut adalah untuk mendanai penggundulan hutan dan pembangunan yang berpotensi melanggar hukum. Prospektus mengumumkan ambisi perusahaan 'untuk meningkatkan luas cadangan lahan dan areal tanam kami melalui pembebasan lahan eksternal selektif dan konsesi tambahan dari pemerintah Indonesia'.¹¹⁷ Bumitama berjanji untuk menyisihkan S\$ 142 juta (US\$ 99,5 juta) untuk memungkinkan perusahaan 'mengolah cadangan lahannya yang ada selama empat tahun ke depan dengan penanaman baru seluas sekitar 13.000 hektar ... per tahun ... dan [untuk] membuka vegetasi yang ada di cadangan lahan yang belum digarap itu untuk ditanami'.¹¹⁸

Berdasarkan apa yang Bumitama sajikan dalam prospektusnya, HSBC bertindak sebagai *bookrunner* untuk sebuah perusahaan yang mengakui telah mengembangkan puluhan ribu hektar perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum dan peraturan di Indonesia – dan, jika berhasil, mungkin akan menggunakan uang yang berhasil mereka galang untuk mendanai lebih banyak kegiatan serupa.

Seluruh saham yang ditawarkan habis terjual.¹¹⁹

STUDI KASUS: PT KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA

Lokasi: Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat



- PT Karya Bhakti Sejahtera
- PT Karya Bhakti Sejahtera 3
- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Deforestasi 2011-12
- Deforestasi 2013-15
- Titik Panas Api 2015
- Titik Panas Api 2016
- ⊗ Area NKT (Nilai Konservasi Tinggi)

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Pembangunan ilegal tanpa izin

ANALISIS PEMETAAN

- Peta tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan hilangnya hutan yang luas antara tahun 2011 dan 2013 di blok utara PT KBAS-3.
- Satu blok KBAS-3 memperlihatkan banyaknya titik api yang signifikan sepanjang tahun 2015.
- Citra satelit terbaru menunjukkan pembangunan yang cukup luas di blok tengah KBAS-3 yang sesuai dengan dan terhubung dengan pembangunan lainnya dalam konsesi KBAS.



Dokumen Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO untuk PT Karya Bakti Agro Sejahtera-3 (PT KBAS-3),¹²⁰ Kalimantan Barat, yang disediakan untuk konsultasi publik pada tanggal 4 Oktober 2016, merujuk pada 1.414 ha lahan yang telah ditanam dalam wilayah konsesi sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010, anggota RSPO diwajibkan untuk menyediakan rencana-rencana pembangunan untuk konsultasi publik melalui publikasi dokumen NPP.

Bumitama telah memiliki PT KBAS setidaknya sejak tahun 2012,¹²¹ dan mungkin sejak tahun 2007 melalui usaha terkait keluarga Hariyanto.¹²² Pengajuan dokumen NPP yang tampaknya berlaku menimbulkan pertanyaan tentang legalitas izin dan sejarah pembangunannya untuk seluruh wilayah konsesi PT KBAS, dan apakah peta-peta dan pengajuannya benar-benar tersedia untuk RSPO.

Berdasarkan dokumen NPP:

- Pada tanggal 4 Desember 2009, PT KBAS-1 menerima izin usaha perkebunan (IUP) untuk membangun 3.550 ha perkebunan ditambah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas untuk memproses 30 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
- Pada tanggal 22 April 2013 KBAS-2 menerima IUP untuk pembangunan seluas 2.325 ha
- Pada tanggal 14 Agustus 2015, PT KBAS-3 mendapat izin lokasi (IL) untuk areal seluas 6.680 ha
- Pada tanggal 29 Januari 2016, izin lingkungan diterbitkan untuk pembangunan perkebunan PT KBAS [sic] yang meliputi 6.680 ha dengan pabrik kelapa sawit berkapasitas proses 45 ton TBS/jam.
- Pada tanggal 15 Februari 2016, izin lingkungan yang telah direvisi diterbitkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit, yang mencakup areal seluas 12.600 ha dengan pabrik berkapasitas 75 ton TBS/jam
- Pada tanggal 15 Februari 2016, IUP diterbitkan untuk PT KBAS (gabungan dari PT KBAS 1, 2 dan 3) untuk pembangunan seluas 12.555 ha.¹²³

Tampaknya tidak ada dokumen NPP yang diajukan untuk KBAS-1 atau KBAS-2. Namun, pembangunan kelapa sawit besar-besaran telah terjadi di wilayah konsesi PT KBAS sejak tahun 2010 meskipun izin legal yang diperlukan jelas tidak memadai. Menurut penilaian HCV yang dilakukan Aksenta dan diulas oleh HCV Network pada bulan Februari 2016, PT KBAS-3 merupakan perluasan dari areal perkebunan kelapa sawit PT KBAS 1 dan KBAS 2 yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Kegiatan penanaman kelapa sawit pada lokasi kajian telah berlangsung sejak tahun 2010 ketika PT KBAS 1 mulai beroperasi.¹²⁴

Tidak jelas dari dokumen NPP-nya apakah KBAS-1 atau KBAS-2 telah memiliki izin lingkungan sebelum tahun 2016 atau tidak. Entah pengajuannya tidak memberikan sejarah perizinan yang jelas dan akurat untuk pembangunan tersebut atau pihak perusahaan menyembunyikan pembangunan ilegal dalam wilayah konsesinya. Yang jelas dalam Prospektus IPO Bumitama tahun 2012 menyatakan bahwa izin lokasi untuk PT KBAS telah habis dan tidak ada izin usaha perkebunan yang diterbitkan,¹²⁵ yang jelas berarti bahwa Bumitama telah kehilangan haknya untuk memperoleh dan membangun areal bersangkutan. Selain itu, sebuah keputusan pengadilan kabupaten di tahun 2014 mendapati bahwa PT KBAS telah secara ilegal membangun pembibitan di areal yang telah dizonasi sebagai hutan produksi yang berada di bawah izin milik Sampoerna Agro PT Hutan Ketapang Industri (PT HKI).¹²⁶ PT KBAS 'memperoleh' tanah tersebut dari masyarakat setempat yang tidak mengetahui statusnya.¹²⁷

Pembangunan di areal konsesi KBAS-3 tampaknya telah dimulai sebelum penerbitan izin lingkungan – atau izin-izin terkait lainnya – yang mencakup areal dengan izin lokasi tahun 2015. KBAS-3 terletak bersebelahan dengan KBAS-1 dan KBAS-2, dan satu-satunya referensi publik untuk masing-masing perkebunan ini adalah yang ada dalam dokumen NPP; lebih lanjut, areal konsesi ini disatukan pada bulan Februari 2016. Mengingat bahwa dokumen NPP baru diserahkan pada bulan Agustus 2016 dan diterbitkan pada bulan Oktober 2016, dan mengingat bahwa tidak ada dokumen NPP yang pernah diajukan untuk PT KBAS-1 atau PT KBAS-2, tidak jelas mengapa dokumen NPP hanya mencakup KBAS-3 – areal konsesi yang sudah tidak lagi ada. Dari informasi yang diberikan, persetujuan yang berlaku surut dan kompensasi tampaknya diperlukan untuk seluruh areal konsesi KBAS, termasuk tinjauan terhadap pembangunan yang berpotensi ilegal.

Operasi ilegal tersebut menjadikan perusahaan melanggar P&C RSPO¹²⁸ dan kebijakan komoditas pertanian HSBC.¹²⁹

PERNYATAAN

PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace menghubungi Bumitama untuk meminta konfirmasi atas pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lainnya dan untuk melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan laporan tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang melanggar kebijakan-kebijakan HSBC. Dalam surel balasannya,¹³⁰ perusahaan menyatakan:

Pada tahun 2013 dan 2014 kami dihadapkan sejumlah pengaduan resmi dan keluhan dari masyarakat sipil. Kami menyadari bahwa kebijakan dan praktik keberlanjutan kami tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan RSPO. Sejak saat itu Kelompok usaha kami telah bekerja sama dengan erat dengan RSPO dengan tujuan untuk sepenuhnya mematuhi Prinsip & Kriteria RSPO. Hal ini menyebabkan pemeriksaan terhadap wilayah SKT (Stok karbon Tinggi) di atas lahan seluas sekitar 55.000 ha sebelum meninjau dan merumuskan kembali kebijakan lingkungan dan sosial kelompok usaha tersebut antara tahun 2014 dan 2015 ... Kami tidak selalu sempurna dalam pelaksanaan standar keberlanjutan yang terbaru, namun kesenjangan ini memberi kami pelajaran untuk belajar dan memperbaiki. Kami percaya bahwa transformasi industri akan sangat menguntungkan, jika Greenpeace mengakui tantangan-tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengakui hasil konservasi awal yang tengah kami capai.¹³¹

Sehubungan dengan pinjaman untuk Bumitama dari HSBC, pihak perusahaan menegaskan bahwa sejak tahun 2012 mereka telah menerima dua buah pinjaman yang tercantum dalam laporan ini dan dua pinjaman tambahan yang masing-masing jatuh tempo pada tahun 2015 dan 2016. Namun, Bumitama menyatakan bahwa pihaknya telah melunasi seluruh pinjaman dari HSBC di 'awal tahun 2015'.¹³²

Greenpeace tetap berpegang pada temuan-temuan dalam laporan ini.

BANK

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan Bumitama dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan bahwa 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberi komentar atas hubungan-hubungan yang spesifik'.¹³³



September 2013, PT Nabire Baru:
Pembersihan tanaman sagu.
©YERISIAM



November 2014, PT Nabire Baru:
Seorang anggota dari komunitas Yerisiam mendokumentasikan batang pohon yang tidak terpakai oleh perusahaan digunakan untuk memagari area perkebunan di Wami, distrik Yaur.
©YERISIAM



2014, PT Nabire Baru:
Recent forest clearance in the Goodhope oil palm concession PT Nabire Baru, Papua.
©YERISIAM



25 March 2016, PT Nabire Baru:
Banjir.
©YERISIAM



25 March 2016, PT Nabire Baru:
Banjir.
©YERISIAM



12 May 2016, PT Nabire Baru:
Sekelompok pemuda Yerisiam melakukan protes atas terjadinya penebangan lahan di wilayah konsesi.
©YERISIAM



Perusahaan: Goodhope Asia Holdings Ltd
Kelompok Usaha: Carson Cumberbatch PLC
Kantor Pusat: Sri Lanka (Goodhope Asia Holdings Ltd didirikan di Singapura)
Terdaftar di bursa: Carson Cumberbatch terdaftar di Bursa Efek Kolombo (Sri Lanka)
Anggota RSPO: Ya¹³⁵

Goodhope adalah perkebunan kelapa sawit anak perusahaan dari Carson Cumberbatch, sebuah konglomerasi yang memulai usahanya sebagai produsen kopi dan karet di Sri Lanka sejak abad ke-19 dan kini memiliki berbagai usaha/saham di Asia Tenggara termasuk hotel, bir, *real estate* dan pabrik.¹³⁶

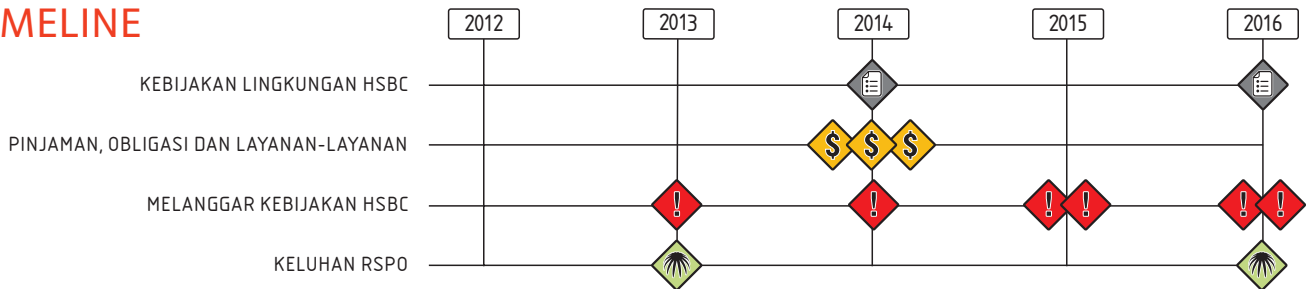
Carson Cumberbatch PLC menguasai 53,3% saham di Goodhope Asia Holdings Ltd, dengan perusahaan Carson Cumberbatch Group lainnya, Bukit Darah PLC, yang menguasai 35,6% saham. Bukit Darah sendiri adalah perusahaan induk yang menguasai 45,7% saham dari Carson Cumberbatch.¹³⁷

KAITAN DENGAN HSBC YANG DIKETAHUI SAAT INI

FASILITAS	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	PEMINJAM	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Pembiayaan kembali/ pinjaman modal kerja	US\$200 juta	Tidak diketahui	Goodhope Asia Holdings Ltd	19/03/2014	Salah satu dari delapan pemberi pinjaman, bookrunner, arranger, agen kolateral
Pembiayaan kembali/ pinjaman modal kerja	US\$150 juta	Tidak diketahui	Goodhope Asia Holdings Ltd	19/03/2014	Salah satu dari delapan pemberi pinjaman, bookrunner, arranger, agen kolateral
Pembiayaan kembali/ kredit bergulir modal kerja	US\$50 juta	Tidak diketahui	Goodhope Asia Holdings Ltd	19/03/2014	Salah satu dari delapan pemberi pinjaman, bookrunner, arranger, agen kolateral
Total	US\$400 juta	Tidak diketahui			

Laporan tahunan dan triwulan mencantumkan HSBC Bank Malaysia Berhad sebagai banker (2010-30/6/2016)¹³⁴
 Seluruh pinjaman harus dicakup oleh kebijakan HSBC saat ini (yang direvisi pada bulan Maret 2014)

TIMELINE



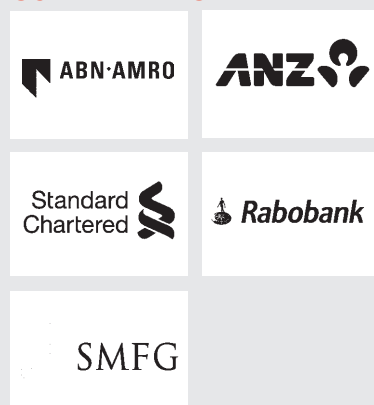
PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi PT Nabire Baru, Papua

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan perkebunan di atas lahan gambut
- Penyimpangan izin termasuk membangun tanpa penilaian dampak lingkungan (AMDAL)
- Eksploitasi: mengambil alih tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA); menggunakan aparat keamanan negara yang melakukan penindasan terhadap pihak yang menentang
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN GOODHOPE/CARSON CUMBERBATCH



PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT

Goodhope menguasai 15 konsesi kelapa sawit di Indonesia, di Provinsi Kalimantan Barat, Selatan, Tengah dan Timur serta di Provinsi Papua.¹³⁸ Perusahaan ini juga memiliki empat konsesi lain di Malaysia.¹³⁹

Cadangan lahan:	132,463 Ha
Areal yang sudah ditanami:	69,502 Ha
Areal siap panen:	54,961 Ha
Areal tanaman muda:	14,542 Ha¹⁴⁰

Kedua konsesi Goodhope di Papua, PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, masing-masing mencakup areal seluas 17.000 Ha dan 8.190 Ha.¹⁴¹ Ekstraksi kayu di dua konsesi tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT Sariwana Unggul Mandiri, yang tidak tercantum sebagai anak perusahaan Carson Cumberbatch PLC dalam laporan tahunannya¹⁴² atau di situs Goodhope.¹⁴³

Goodhope juga memiliki pabrik pengolahan minyak nabati dan lemak di Malaysia dan India.¹⁴⁴

Goodhope menyatakan bahwa mereka memproduksi 234.270 ton CPO selama tahun fiskal 2014/15.¹⁴⁵

Carson Cumberbatch PLC, serta divisi agribisnis serta divisi minyak dan lemaknya, bergerak dalam manajemen aset dan portofolio, pabrik bir, *real estate*, hotel dan jasa manajemen.¹⁴⁶

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN

Kebijakan lingkungan hidup di situs Goodhope hanya terbatas pada pelaksanaan praktik pengelolaan lingkungan yang baik di areal perkebunan dan pabrik mereka, serta komitmen untuk mengidentifikasi dan menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi. Perusahaan ini tidak membuat komitmen publik untuk menghindari pengembangan perkebunan di kawasan hutan atau lahan gambut, serta untuk melaksanakan proses PADIATAPA yang ketat dengan masyarakat adat atau komunitas lain yang terdampak.¹⁴⁷

Komunikasi Perkembangan Tahunan (ACoP) Goodhope tahun 2015 kepada RSPO mengacu pada 'Kode Etik Keberlanjutan',¹⁴⁸ tetapi tidak ada dokumen apapun yang bertajuk demikian dalam domain publik, termasuk dalam laporan tahunan, baik di situs perusahaan maupun situs RSPO.

SERTIFIKASI DAN TRANSPARANSI

Goodhope telah menjadi anggota RSPO sejak tanggal 2 Desember 2014.¹⁴⁹

Tiga perkebunan kelapa sawitnya telah menerima sertifikasi RSPO,¹⁵⁰ dan dua fasilitas pengolahannya di Malaysia telah menerima sertifikasi rantai pasok.¹⁵¹

Goodhope telah menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk mencapai sertifikasi penuh RSPO pada tahun 2019.¹⁵² Rencana tersebut tidak memenuhi kebijakan HSBC tentang tenggat waktu sertifikasi penuh pada tahun 2018.¹⁵³

Goodhope telah menyampaikan informasi kepada RSPO di bawah Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk perkebunannya di Kalimantan, namun tidak ada peta konsesi atau rencana pengelolaan untuk konsesinya di Papua tersedia untuk umum, meskipun perusahaan mengklaim telah menyampaikannya kepada RSPO. Tak satu pun dari konsesinya di Papua tercantum sebagai anak perusahaan pada halaman Goodhope di situs RSPO.¹⁵⁴

Pengaduan terhadap PT Nabire Baru, yang disampaikan kepada RSPO pada bulan April 2016, hanya diunggah ke fasilitas lacak kasus¹⁵⁵ di situs RSPO sesudah banyak pertanyaan dari LSM, meskipun RSPO telah membahas kasus ini dalam komite pengaduannya dan berupaya menemui perusahaan.¹⁵⁶

Laporan Perkembangan Tahunan Goodhope tahun 2015 ke RSPO menghilangkan beberapa informasi penting dan relevan. Pihak perusahaan mengklaim mereka tidak memiliki sengketa tanah, meskipun ada sengketa besar yang sedang berlangsung di konsesi PT Nabire Baru (lihat di bawah).¹⁵⁷

KAITAN DENGAN PASAR

Menurut data perusahaan, Apical,¹⁵⁸ Cargill,¹⁵⁹ GAR,¹⁶⁰ IOI,¹⁶¹ KLK,¹⁶² Musim Mas¹⁶³ dan Wilmar¹⁶⁴ adalah pelanggan Goodhope.

AAK menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Goodhope.¹⁶⁵ Astra Agro Lestari tidak mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Goodhope.

Dalam surel ke Greenpeace pada tanggal 20 September 2016, GAR dan Wilmar membenarkan bahwa mereka memiliki hubungan komersial dengan Goodhope.¹⁶⁶ Wilmar menyatakan bahwa mereka melakukan proses pelibatan dengan perusahaan tersebut, dan pemantauan menunjukkan bahwa pembangunan telah berhenti sejak tahun 2015, meskipun kasus ini tidak terdaftar dalam daftar pengaduannya Wilmar saat ini.¹⁶⁷ GAR menyatakan bahwa studi kasus ini merupakan informasi baru. Musim Mas menyatakan bahwa mereka tidak membeli dari operasi Goodhope di Papua, namun akan 'menindaklanjuti proses keterlibatan terkait operasi mereka di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan'.¹⁶⁸

STUDI KASUS: PT NABIRE BARU

Lokasi: Kabupaten Nabire, Papua

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan perkebunan di lahan gambut
- Penyimpangan izin termasuk pembangunan tanpa penilaian dampak lingkungan
- Eksploitasi: mengambil alih tanah adat tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan menggunakan aparat keamanan negara untuk menindas penentangan dari orang-orang setempat



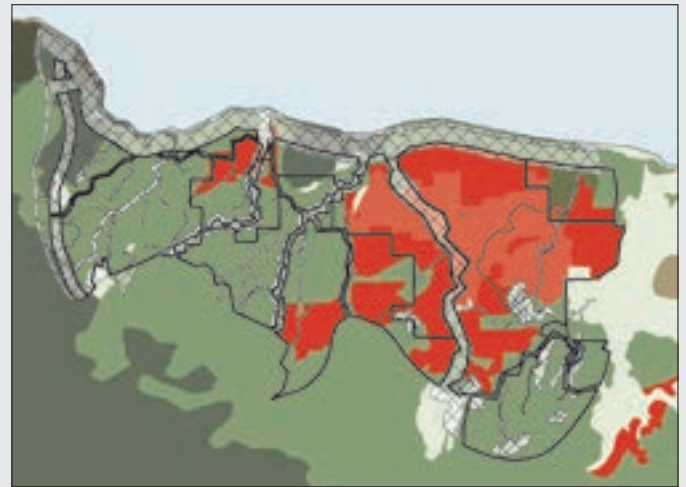
- PT Nabire Baru
- PT Sariwana Adi Perkasa
- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Gambut
- Gambut Berhutan
- Deforestasi 2011–12
- Deforestasi 2013–15
- ⊗ Area NKT (Nilai Konservasi Tinggi)

ANALISIS PEMETAAN

- Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2011 PT Nabire Baru masih didominasi oleh hutan.
- Pada tahun 2013, peta-peta KLHK menunjukkan ribuan hektar lahan yang sebagian besar adalah hutan primer, termasuk hutan gambut, telah dibuka di dalam konsesi PT NB.
- Peta-peta KLHK menunjukkan berlanjutnya pembukaan besar-besaran di dalam konsesi PT NB, termasuk pembukaan hutan gambut, antara tahun 2013 dan 2015. Peta-peta tersebut menunjukkan pembukaan yang luas di konsesi Goodhope PT Sariwarna Adi Perkasa (PT SAP), yang terletak bersebelahan, yang juga masih didominasi oleh hutan di tahun 2011.

DEFORESTASI

Pada pertengahan tahun 2016 deforestasi tampaknya terus



berlangsung, dengan citra Landsat menunjukkan setidaknya 70% dari konsesi PT Nabire Baru telah dibuka atau dibagi menjadi blok-blok perkebunan.¹⁶⁹

GAMBUS

Konsesi ini meliputi beberapa ribu hektar lahan yang ditampilkan sebagai gambut pada peta yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.¹⁷⁰ Banyak dari areal gambut ini telah digunduli antara tahun 2011 dan 2013.

PENYIMPANGAN IZIN TERMASUK TIDAK ADANYA ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

PT Nabire Baru mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan menggunakan lisensi yang diterbitkan pada tahun 2008. Namun, perusahaan ini belum memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan izin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu;¹⁷¹ khususnya, belum ada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).¹⁷²

Izin lokasi dari Bupati Nabire¹⁷³ diterbitkan 18 bulan kemudian dan perusahaan memulai pembukaan lahan, masih tanpa AMDAL.

Konsultasi publik pertama untuk AMDAL berlangsung pada bulan April 2013.¹⁷⁴ Izin lingkungan PT Nabire Baru ini pada akhirnya disetujui oleh gubernur pada tanggal 26 Agustus 2014.¹⁷⁵

Pada bulan Oktober 2015 komunitas adat Yerisiam Gua menggugat izin ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁷⁶ Hakim tidak membuat keputusan tentang legalitas izin tersebut, setelah menyatakan bahwa kasus tidak dapat diterima karena batas 90 hari untuk mengajukan banding atas keputusan pemerintah telah lewat.¹⁷⁷

Pada tanggal 25 Maret 2016, hanya satu minggu sebelum pengadilan mengambil keputusan, Desa Sima dalam wilayah konsesi PT Nabire Baru mengalami banjir yang menggenangi 56 rumah, yang memaksa warga untuk mengungsi keluar desa.¹⁷⁸ Masyarakat setempat mengaitkan banjir tersebut dengan deforestasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, mengklaim bahwa banjir telah terjadi berulang kali sejak pembukaan hutan dimulai,¹⁷⁹ bertahun-tahun sebelum AMDAL disetujui. Sebuah penilaian dampak lingkungan yang menyeluruh diharapkan dapat mengantisipasi risiko banjir dan hanya menyarankan pembangunan perkebunan bisa dilanjutkan jika ditemukan cara untuk mengurangi risiko ini.

PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN

Terjadi penentangan terus-menerus dari masyarakat adat Yerisiam setempat terhadap PT Nabire Baru dan operasi PT Sariwana Adi Perkasa yang bersebelahan dengan konsesi Goodhope.¹⁸⁰ Para aktivis adat tetap mengklaim bahwa PT Nabire Baru tidak mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan masyarakat, dan hanya menerima izin untuk penebangan selektif, yang akan berdampak lebih sedikit terhadap masyarakat setempat.¹⁸¹

Pada tanggal 26 Oktober 2015, warga marga Waoha, bersama-sama dengan warga lain dari komunitas Yerisiam, memasang spanduk dan umbul-umbul untuk melarang PT Nabire Baru membuka 1.000 Ha hutan, menggunakan praktik hukum adat yang dikenal sebagai *sasi*. Tampaknya, ada beberapa orang dari

marga tersebut telah menandatangani penyerahan areal ini kepada PT Nabire Baru tanpa terlebih dahulu memusyawarakannya bersama masyarakat.¹⁸²

Pada tanggal 12 April 2016 sengketa lain muncul ketika perusahaan mulai membuka lahan untuk kebun plasma, termasuk hutan sagu Jarai dan Manawari, yang merupakan situs suci bagi masyarakat Yerisiam serta menjadi sumber makanan yang penting.¹⁸³ Aparat keamanan negara bersenjata lengkap dilaporkan hadir di lokasi ketika hutan sagu tersebut dibangki.¹⁸⁴

Kebijakan komoditas pertanian HSBC menyatakan bahwa 'HSBC tidak akan dengan sengaja memberikan layanan keuangan kepada penanam dan pabrik sawit yang terlibat dalam ... pelanggaran hak-hak masyarakat setempat, seperti prinsip 'persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan' atau 'operasi di daerah yang memiliki konflik sosial yang signifikan'.¹⁸⁵

PENGGUNAAN KEKERASAN YANG BERLEBIHAN DAN PENGGUNAAN APARAT KEAMANAN NEGARA

*'Kebijakan perusahaan harus melarang penggunaan tentara bayaran dan kelompok sipil bersenjata dalam operasi mereka. Kebijakan perusahaan harus melarang intimidasi di luar hukum dan pelecehan oleh aparat keamanan yang disewa.'*¹⁸⁶
- Pedoman Khusus untuk P&C 2.2.6 RSPO, 2013

PT Nabire Baru telah menggunakan aparat keamanan negara untuk mengamankan perkebunannya, dan hal ini telah menimbulkan serangkaian kekerasan atau intimidasi, yang seringkali dilaporkan ditargetkan pada warga masyarakat yang menentang perkebunan.¹⁸⁷

Tuduhan-tuduhannya mencakup:

1. Di bulan Juni 2013, pribumi pemilik lahan dan karyawan Titus Money diborgol dan dianiaya setelah memprotes kelambatan pembayaran upah.¹⁸⁸
2. Aparat keamanan negara menodongkan senjata ke dan mengancam akan menembak Immanuel Monei, seorang pribumi pemilik tanah, ketika ia mengeluh bahwa PT Nabire Baru karena tidak menghormati nota kesepahaman yang menjanjikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dalam pekerjaan pembangunan.¹⁸⁹
3. Aparat keamanan negara menghancurkan rumah warga setempat Yunus Money, yang menyebabkan keluarganya harus melarikan diri ke hutan karena takut, mungkin sebagai aksi tanggapan terhadap keterlibatan Yusuf dalam protes masyarakat sebelumnya yang menentang pendekatan agresif aparat keamanan negara.¹⁹⁰

PENGADUAN RSPO

Masalah-masalah pengambilalihan lahan tanpa persetujuan, deforestasi, banjir, perusakan tempat-tempat suci dan penggunaan aparat keamanan negara sebagai penjaga perusahaan adalah subyek dari pengaduan RSPO terhadap Goodhope yang diajukan oleh LSM Yayasan Pusaka dan warga suku Yerisiam pada tanggal 19 April 2016. Setelah banyak pertanyaan dari LSM tentang kegagalan Panel Pengaduan untuk mencantumkan kasus ini di sistem pelacak kasusnya,¹⁹¹ pada tanggal 19 Desember 2016 kasus ini akhirnya dinaikkan tingkatnya menjadi pengaduan resmi,¹⁹² meskipun kasus ini dicantumkan di bawah PT Nabire Baru, bukan Goodhope.

PERNYATAAN PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan bulan September 2016 kami,¹⁹³ Greenpeace telah menghubungi Goodhope untuk meminta konfirmasi atas temuan-temuannya. Dalam surel balasan,¹⁹⁴ pihak perusahaan tidak menanggapi tuduhan pembukaan hutan primer namun mengklaim telah mengadopsi komitmen Nol Gambut di tahun 2010. Goodhope juga memberikan dokumen kebijakan Konservasi dan Pembangunan Baru,¹⁹⁵ yang ditandatangani oleh Direktur Keberlanjutan (dan Wakil Presiden RSPO) Edi Suhardi. Kebijakan kelompok usaha ini bertanggal 4 Mei 2013 dan lebih dari 18 bulan mendahului keanggotaan Goodhope di RSPO; meskipun demikian, kebijakan tersebut telah melampaui prinsip dan kriteria RSPO dan menyatakan bahwa tidak ada pembangunan yang akan dilakukan di 'kawasan hutan dengan stok karbon tinggi dan lahan gambut'

Dilihat di permukaan, ini akan membuat Goodhope menjadi salah satu perusahaan pelopor standar-standar tersebut. Namun, dalam surel-surel berikutnya, Suhardi menyatakan bahwa Goodhope tidak memiliki kebijakan Nol Deforestasi dan bahwa dokumen yang diberikan kepada Greenpeace '[hanya] menetapkan bahwa Goodhope tidak akan membangun perkebunan kelapa sawit di hutan primer dan lahan gambut' dan bahwa 'kami [Goodhope] utamanya fokus pada "tidak ada pengembangan di **hutan primer**"¹⁹⁶ [penekanan sesuai aslinya]. Tidak ada rujukan pada 'hutan primer' dalam kebijakan yang diberikan kepada Greenpeace; tidak jelas dokumen apa yang dikutip beliau.

Tanggapan perusahaan tidak membahas tuduhan pembukaan lahan gambut di PT Nabire Baru, namun perusahaan memberikan laporan Penilaian Penanaman Baru Tahun 2011. Laporan tersebut, yang menggunakan peta survei tanah nasional Indonesia tahun 1990 untuk mengidentifikasi gambut, tidak mendapati tanah gambut di areal yang akan dikembangkan namun menyatakan bahwa 'survei tanah yang lebih detail akan dilakukan sebelum pembangunan perkebunan dimulai [sic]'.¹⁹⁷ Goodhope kemudian mengakui bahwa tidak ada survei rinci sampai bulan November 2016,¹⁹⁸ meskipun pembangunan perkebunan telah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Goodhope juga mengklaim menghormati prinsip PADIATAPA dan akan mencari persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak terhadap operasinya di Papua. Memang, menurut laporan Penilaian Penanaman Baru tahun 2011 untuk PT Nabire Baru, 'PT NB sedang dalam proses perundingan dengan masyarakat adat pemilik tanah untuk memperoleh lahan untuk perluasan perkebunan. Proses ini dimulai sejak tahun 2011 dan kesepakatan tengah dirundingkan lalu akan dituntaskan sebelum penanaman selesai.

Komponen PADIATAPA telah diintegrasikan ke dalam proses pembebasan tanah (deskripsi dari pertemuan penyadartahuan akan aspek positif maupun negatif dari pembangunan), dengan kerjasama dari pihak independen yang netral termasuk Politisi Setempat, Pejabat Kabupaten, Polda dan Angkatan Darat'.¹⁹⁹ Perlu dicatat bahwa hal ini bertentangan dengan P&C 2.2.6 RSPO.²⁰⁰ Ketika Greenpeace bertanya tentang penggunaan aparat keamanan negara, perusahaan mengklaim bahwa situasinya kompleks pada saat

itu dan mencakup kekhawatiran terhadap situasi keamanan regional. Perwakilan Goodhope menyatakan bahwa, sebagai bagian dari proses PADIATAPA, masyarakat mengakui bahwa kehadiran aparat keamanan tidak represif atau mengintimidasi melainkan lebih merupakan tindakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan semua orang.²⁰¹

Sehubungan dengan pengaduan RSPO yang diajukan Pusaka, ketika Greenpeace menanyakan masalah ini, Goodhope mengklaim bahwa akar perselisihan itu bukan murni tentang PADIATAPA atau sengketa tanah masyarakat, tetapi tentang tuntutan pribadi yang tidak dapat disepakati oleh perusahaan.²⁰² Dalam sebuah surel, perusahaan menyatakan: 'Berkaitan dengan masalah-masalah di atas dan keprihatinan terkait pengaduan yang diajukan Pusaka dan diangkat oleh FPP [Forest Peoples Programme], RSPO telah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian pengaduan dan tuduhan tersebut dengan menyelenggarakan beberapa pertemuan dan merencanakan verifikasi lapangan yang dijadwalkan pada tanggal 26-29 September 2016.'²⁰³

Dalam hal transparansi, Goodhope menjawab: 'Harap dicatat bahwa karena penerbitan surat dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan surat terbaru dari Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang sebagai klarifikasi surat menteri sebelumnya ... membagi dan mempublikasi peta elektronik atau lokasi georeferensi dilarang atau harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak berwenang. Goodhope harus mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia'.²⁰⁴

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace menghubungi Goodhope untuk meminta konfirmasi atas pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lain, dan untuk memverifikasi temuan-temuan laporan tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang akan melanggar kebijakan HSBC. Dalam surel balasannya, perusahaan menyangkal telah membangun perkebunan di atas hutan primer dan menyatakan bahwa 'semua daerah NKT yang teridentifikasi telah dilindungi'.²⁰⁵

Sehubungan dengan tuduhan eksploitasi, pembangunan tanpa memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan penggunaan aparat keamanan negara, perusahaan menyatakan: 'Klaim ini telah didapati tidak benar bahkan oleh organisasi yang pertama kali mempublikasikan tuduhan ini'. Mengenai penyimpangan izin termasuk pembangunan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan, perusahaan menyatakan: "Kami telah sering mengklarifikasi tentang kesalahpahaman akan AMDAL proyek Papua kami ini, tapi kami lihat hal ini terus diulang-ulang".²⁰⁶

Greenpeace tetap berpegang pada temuan-temuan dalam laporan ini.

Sehubungan dengan pinjaman dari HSBC, perusahaan menyatakan: 'memang, Goodhope telah menjadi penerima pinjaman HSBC di tingkat korporasi'.²⁰⁷

BANK

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan Goodhope dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan bahwa 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberi komentar atas hubungan-hubungan yang spesifik'.²⁰⁸

16 April 2016, PT Bumi Sawit Sejahtera:

2°55'13.4"S 110°43'40.2"E

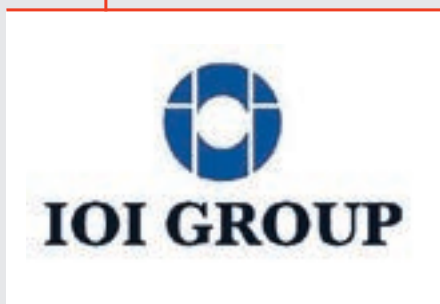
Seorang investigator Greenpeace mendokumentasikan penanaman sawit baru di wilayah konsesi sawit IOI di Ketapang, Kalimantan Barat, yang mengalami kebakaran yang meluas dan berulang di tahun 2015, dan yang telah diidentifikasi sebagai wilayah dengan karbon stok tinggi.

©IFANSASTI/GREENPEACE





Perusahaan: IOI Group (IOI Corporation Berhad)²⁰⁹
Kantor Pusat: Malaysia
Terdaftar di bursa: Bursa Efek Malaysia²¹⁰
Anggota RSPO: Ya



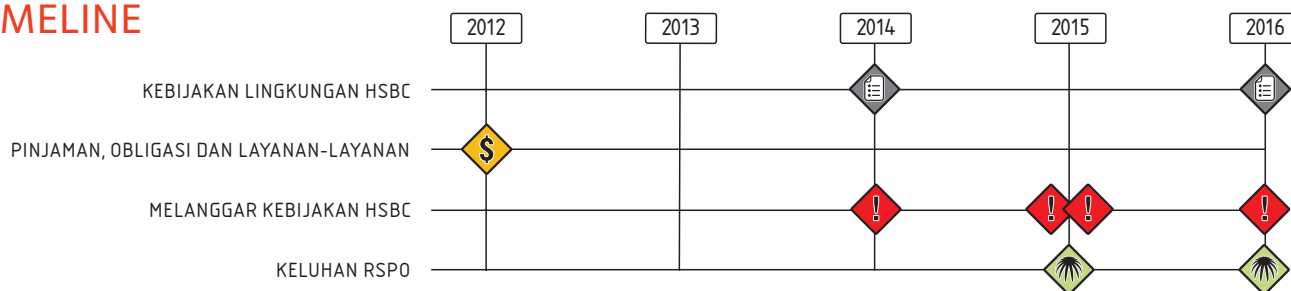
Berkantor pusat di Malaysia, IOI menurut laporan merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar ketiga di dunia.²¹¹ Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan hulu-hilir yang mengelola perkebunan kelapa sawit; memproses TBS dari kedua perkebunannya sendiri dan dari perusahaan lain; dan memproduksi produk turunan kelapa sawit, bahan-bahan khusus dan oleokimia.

IOI adalah salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional. Pada tahun 2015, IOI memperdagangkan dan/atau memproses 1.527.696 ton minyak sawit dan produk turunan kelapa sawit.²¹² IOI Loders Croklaan adalah anak perusahaan hilirnya.

KAITAN YANG DIKETAHUI SAAT INI DENGAN HSBC

SEKURITI	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	NAMA PENERBIT	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Penerbitan obligasi korporat	US\$600 juta	n/a	IOI Investment L Bhd	27/06/2012	Pimpinan manager bersama dengan tiga bank lainnya

TIMELINE



PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi-konsesi PT Berkat Nabati Sejahtera (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) dan PT Sukses Karya Sawit (PT SKS), Kalimantan Barat; konsesi Pelita, Sarawak, Malaysia

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan di lahan gambut
- Kebakaran: kebakaran yang meluas pada tahun 2014 dan 2015, dan penanaman terlihat di daerah bekas kebakaran
- Operasi ilegal termasuk pembangunan tanpa izin yang disyaratkan dan penanaman di luar batas-batas konsesi
- Pelanggaran hak masyarakat atas tanah
- Penangguhan sementara proses sertifikasi RSPO
- Kegagalan dalam memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN IOI



PERKEBUNAN

IOI merupakan pemegang saham mayoritas (67%) di empat perusahaan perkebunan Indonesia di Kalimantan Barat: PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS), PT Berkat Nabati Sejahtera (PT BNS), PT Sukses Karya Sawit (PT SKS) dan PT Ketapang Sawit Lestari (PT KSL).²¹³ Semua perusahaan ini juga dimiliki oleh Bumitama Agri Ltd,²¹⁴ yang memiliki 28% saham. IOI juga berbagi kepemilikan atas Bumitama Agri Ltd (31,4%),²¹⁵ yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Selain itu, IOI menguasai perusahaan perkebunan Indonesia yaitu PT Kalimantan Prima Agro Mandiri.²¹⁶

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN

IOI telah membuat serangkaian komitmen untuk melindungi lahan gambut dan hutan sejak tahun 2009,²¹⁷ yang terbaru adalah pada bulan Juli 2016.²¹⁸ Namun, investigasi oleh LSM-LSM menunjukkan perusahaan terus-menerus gagal untuk menerapkan kebijakannya di lapangan.

IOI telah menyatakan rencananya untuk mendapatkan sertifikasi RSPO untuk semua perkebunannya pada tahun 2020.²¹⁹ Rencana itu tidak memenuhi tenggat waktu kebijakan HSBC tentang sertifikasi penuh pada tahun 2018.²²⁰

KAITAN DENGAN PASAR

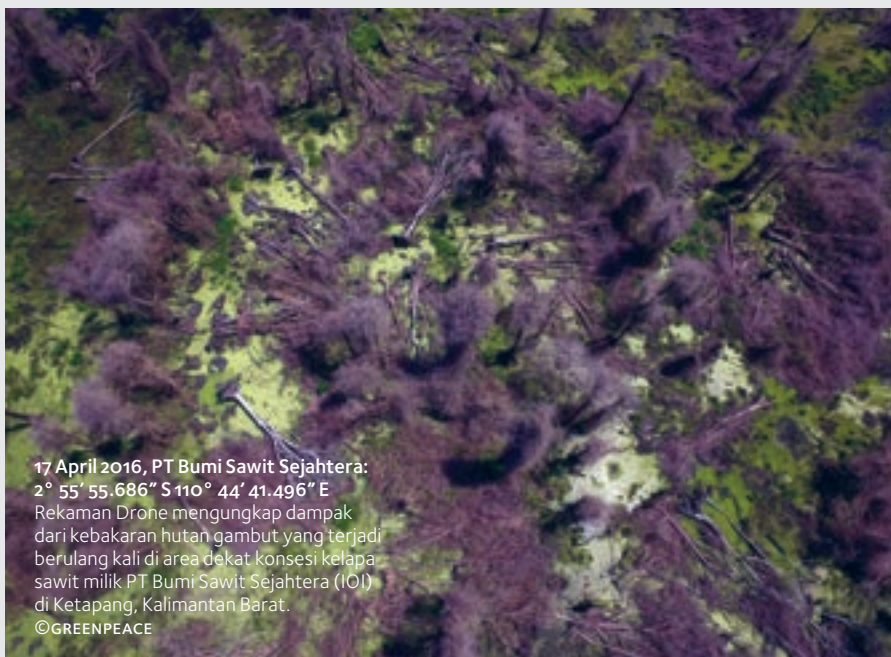
Menurut data perusahaan, Olam adalah pelanggan dari IOI.²²¹

AAK menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan IOI.²²²

Astra Agro Lestari tidak mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan IOI. Cargill mengkonfirmasi bahwa 'Cargill tetap menyangkal hubungan dengan IOI. Sebagai bagian dari proses pengaduan kami, kami tengah mengajak IOI untuk berkomitmen untuk melakukan perbaikan bertenggang waktu dan menunjukkan tindakan nyata di bidang perlindungan lingkungan, praktik ketenagakerjaan, transparansi rantai pasok pihak ketiga dan sengketa masyarakat di IOI Pelita.'²²³

STUDI KASUS: PENGADUAN RSPO TIDAK SESUAI UNTUK TUJUANNYA

Lokasi: konsesi-konsesi IOI di Ketapang, Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia Timur



*'Ketika HSBC diajak berbicara oleh salah satu pemangku kepentingan yang prihatin tentang perusahaan-perusahaan di sektor ini, kami menyarankan agar mereka menyampaikan pengaduan kepada RSPO. Pengaduan tersebut kemudian akan diselidiki secara penuh dan terbuka.'*²²⁴

- Surat IOI Group kepada BankTrack dalam menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Perusakan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Pembangunan di atas lahan gambut
- Kebakaran yang meluas pada tahun 2014 dan 2015, serta penanaman di areal bekas kebakaran
- Operasi ilegal termasuk pembangunan tanpa izin yang sesuai dan penanaman di luar batas konsesi
- Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atas lahan
- Penangguhan sementara proses sertifikasi RSPO

DEFORESTASI, PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DAN OPERASI ILEGAL

Greenpeace pertama kali mengangkat masalah perkebunan-perkebunan IOI di Kalimantan pada tahun 2008, menyoroti kegiatan deforestasi dan pengeringan lahan gambut serta pembukaan hutan yang menjadi habitat Orangutan.²²⁵

Sebelum LSM menyampaikan pengaduan kepada RSPO pada tahun 2010, yang mencakup masalah-masalah di konsesi IOI di Ketapang PT Berkat Nabati Sejahtera (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) dan PT Sukses Karya Sawit (PT SKS), termasuk pembukaan lahan gambut sejak tahun 2009, pembukaan hutan dengan nilai konservasi tinggi dan perambahan ilegal ke hutan produksi di luar batas konsesi PT BNS. Pengaduan ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lahan di konsesi Pelita milik IOI di Sarawak, Malaysia. Panel pengaduan RSPO menyimpulkan tidak terdapat cukup dalil untuk membuktikan pengaduan yang berkaitan dengan Ketapang,²²⁶ namun sengketa lahan di Pelita/Long Teran Kanan masih dalam proses penyelesaian.²²⁷

Pada bulan Maret 2015, konsultan nirlaba Aidenvironment mengajukan pengaduan baru ke RSPO yang menuduh IOI melanggar standar-standar RSPO dan kebijakan lingkungannya sendiri di konsesi-konsesinya di Ketapang.²²⁸ Pengaduan ini mencakup bukti-bukti spesifik tentang:

- Memulai pembangunan sebelum mendapatkan izin hukum yang disyaratkan
- Pembangunan kanal pengeringan melintasi areal hutan NKT
- Pembukaan kawasan hutan di gambut dalam setelah perusahaan diberitahu bahwa hal ini adalah pelanggaran terhadap standar
- Penanaman ilegal lebih lanjut di luar batas PT BNS

Menanggapi pengaduan ini, pada tanggal 14 Maret 2016, Panel Pengaduan RSPO memutuskan untuk menyangkal sementara sertifikasi RSPO dari IOI Group karena melanggar prinsip-prinsip RSPO, serta seluruh sertifikasi untuk operasi internasional perusahaan juga ditangguhkan.²²⁹

Penanggungan tersebut dengan cepat membuat IOI kehilangan pelanggan-pelanggan utamanya, di mana berbagai perusahaan termasuk Unilever, Nestle, Mars, Kellogg²³⁰ dan General Mills²³¹ mengumumkan akan beralih ke pemasok lain. IOI menanggapi penanggungan ini dengan melakukan (dan kemudian menghentikan) gugatan hukum terhadap RSPO.²³²

Para LSM pertama kali mengangkat sebagian dari masalah-masalah yang diidentifikasi oleh Aidenvironment di dalam pengaduan tahun 2010. Seandainya RSPO bertindak dengan benar pada saat itu, maka mungkin banyak kehancuran lebih lanjut yang dilakukan IOI di Ketapang bisa dihindari. Meskipun demikian, Panel Pengaduan tidak mendesak agar IOI menyelesaikan ketidakpatuhannya sebagai prasyarat untuk mendapatkan kembali sertifikasinya. Sebaliknya, satu-satunya persyaratan yang diberikan pada IOI adalah untuk menerbitkan rencana aksi dan mengizinkan studi NKT -nya dilakukan peninjauan (*peer review*).²³³ IOI kemudian menerbitkan rencana aksinya dan menyerahkan penilaian NKT nya kepada Daemeter untuk ditinjau.

Akhir bulan Mei 2016, Daemeter telah menyelesaikan tinjauannya terhadap penilaian NKT untuk PT BNS, PT BSS dan PT SKS. Meskipun RSPO telah menyatakan komitmennya terhadap transparansi, pada saat publikasi laporan ini, ketiga tinjauan tersebut belum diunggah di bagian lacak kasus di situsnya. Ketiga tinjauan ini, meskipun demikian, benar-benar mengidentifikasi adanya permasalahan yang besar pada masing-masing penilaian dokumen NKT, termasuk minimnya konsultasi dengan masyarakat setempat, pemetaan yang tidak jelas, identifikasi yang memadai wilayah NKT dan rencana pengelolaan yang lemah untuk mengurangi dampak operasi perusahaan.²³⁴ Daemeter juga menyatakan bahwa tim penilai PT BSS yang asli tidak menyertakan pakar hidrologi, meskipun pemetaan menunjukkan areal konsesi memiliki kawasan lahan gambut yang luas.²³⁵

Dengan begitu banyak masalah besar dan kecil yang teridentifikasi, adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa penilaian NKT awal oleh IOI ini tidak memberikan dasar yang cukup untuk menjamin perlindungan wilayah-wilayah NKT. Jika tujuan Panel Pengaduan dalam memperoleh tinjauan tersebut adalah untuk memastikan identifikasi dan perlindungan setiap wilayah NKT dalam konsesi IOI, maka langkah selanjutnya seharusnya meminta IOI untuk melakukan penilaian ulang. Namun, RSPO tidak meminta hal tersebut dan sebaliknya, Panel Pengaduan menyarankan agar *Board of Governance* mencabut penanggungan, dengan alasan bahwa IOI telah 'memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat dari Panel Pengaduan kepada IOI tertanggal 14 Maret 2016'²³⁶ - yaitu IOI telah menerbitkan sebuah rencana aksi dan mengizinkan peninjauan (*peer review*) terhadap penilaian-penilaian NKT-nya.

Board of Governance menyepakati saran ini dan mencabut penanggungan IOI pada bulan Agustus 2016,²³⁷ meskipun kunjungan lapangan untuk memverifikasi apakah IOI telah menjalankan komitmennya belum pernah dilakukan. Pada tahap ini, IOI belum mencabut klaimnya atas lahan seluas 400 ha dari 1.600 ha lahan di luar batas-batas konsesi PT BNS yang telah mereka kembangkan dan tanami kelapa sawit secara ilegal.²³⁸

Greenpeace beberapa kali mengunjungi konsesi-konsesi IOI di Ketapang pada tahun 2016, termasuk setelah *Board of Governance* RSPO mencabut penanggungan. Hanya ada sedikit upaya restorasi di daerah-daerah yang dikunjungi dan tindakan-tindakan kosmetik untuk mengurangi risiko kebakaran, termasuk menara pengawas kebakaran yang baru dibangun tapi tidak pernah difungsikan yang menghadap ke wilayah NKT yang sudah terbakar sebelumnya. Kanal-kanal pengeringan masih mengalir dengan bebas, termasuk dari satu daerah dalam hutan lindung.

Lacak kasus RSPO mencatat bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, laporan independen tentang implementasi rencana aksi IOI tengah diteliti oleh Panel Pengaduan RSPO. Laporan verifikasi lapangan untuk PT BSS tampaknya telah disampaikan kepada Panel Pengaduan pada bulan November 2016, namun pada saat publikasi laporan Greenpeace

ini, tak satupun dari laporan-laporan ini maupun notulensi rapat-rapat Panel Pengaduan pada bulan November dan Desember 2016 tersedia untuk publik, yang berarti bahwa tidak ada cara apapun saat ini bagi para pemangku kepentingan (termasuk lembaga keuangan) untuk menilai apakah IOI menjalankan komitmennya. Namun, Aidenvironment menyatakan pada bulan November 2016 bahwa tim verifikasi independen telah gagal untuk meninjau 'elemen paling penting dari pengaduan kami - yaitu pembangunan perkebunan tanpa izin di PT SKS dan PT BNS'²³⁹ dan bahwa hal tersebut tidak dikonsultasikan dengan mereka selama proses verifikasi ini. Aidenvironment mengancam untuk meninggalkan RSPO jika masalah-masalah yang belum diselesaikan ini tidak ditindaklanjuti dengan serius, di mana Eric Wakker yang mengadukan masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa sekretariat RSPO 'lebih tertarik menjual minyak sawit bersertifikat daripada mengamankan kredibilitas dari klaim keberlanjutan mereka'.²⁴⁰

Aidenvironment dan IOI mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 1 Desember 2016 di mana mereka menyatakan bahwa pengaduan ditutup dan bahwa hal ini dicapai 'terlepas dari keputusan RSPO'.²⁴¹ IOI sepakat untuk mencabut klaim atas sisa 434 ha lahan yang telah ditanami di luar batas-batas konsesi PT BNS. RSPO menyatakan dalam tanggapannya bahwa ini tidak 'mewakili penutupan resmi kasus tersebut, yang tetap berada di bawah lingkup Panel Pengaduan RSPO' dan bahwa RSPO akan 'melanjutkan verifikasi dengan mengirimkan tim verifikasi independen ke lapangan'.²⁴²

Pada saat publikasi laporan ini, RSPO belum mempublikasikan batas waktu atau bahkan Kerangka Acuan Kerja kunjungan lapangan yang akan mereka lakukan. Pengaduan terhadap IOI Pelita masih tetap belum terselesaikan.

Kebijakan komoditas pertanian HSBC menyatakan bahwa 'Bisnis Global harus **menghentikan** hubungan, sesegera mungkin, dengan pelanggan yang **tidak patuh (Non-Compliant)**, termasuk [p]elanggan yang dikeluarkan dari RSPO ... atau yang sertifikasinya dicabut'²⁴³ [penekanan sesuai aslinya]. Namun, terlepas dari skors lima bulan terhadap IOI dan kekhawatiran terus-menerus tentang operasinya, tidak ada bukti bahwa bank telah memutuskan hubungannya.

PERNYATAAN PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace menghubungi IOI untuk meminta konfirmasi atas pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lain, dan untuk memverifikasi temuan-temuan laporan tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang akan melanggar kebijakan HSBC.

Sehubungan dengan pinjaman dari HSBC, perusahaan menyatakan: 'informasi tersebut normalnya merupakan informasi khusus di bawah hubungan klien-bankir yang diatur oleh klausul-klausul tertentu dalam Master Agreement dengan bank'.²⁴⁴

BANK

Pada bulan November 2016, Greenpeace menulis kepada sejumlah bank yang diidentifikasi memiliki hubungan keuangan dengan IOI dan bertanya bagaimana tanggapan mereka terhadap penanggungan IOI dari RSPO ini dan kritikan terus-menerus terhadap catatan keberlanjutan perusahaan. DBS tidak menjawab pertanyaan ini,²⁴⁵ dan UOB hanya memberikan ringkasan dari kasus pengaduan RSPO.²⁴⁶ Sumitomo Mitsui mengatakan mereka tidak bisa memberi tanggapan karena kerahasiaan pelanggan.²⁴⁷ Standard Chartered tidak menjawab pertanyaan secara tertulis tetapi menyatakan dalam pertemuan dengan Greenpeace Inggris (UK)²⁴⁸ bahwa mereka juga tidak bisa membahas klien-klien tertentu.

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan IOI dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan bahwa "kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberi komentar atas hubungan-hubungan yang spesifik".²⁴⁹

18 Mei 2011,
PT Henrison Inti Persada:
Pembukaan hutan baru-baru ini
di konsesi Noble di Sorong, Papua
Barat, didokumentasikan pada saat
kegiatan lapangan oleh Environmental
Investigation Agency.
©EIA





Perusahaan: Noble Plantation Pte Ltd
Kelompok Usaha: Noble Group Ltd
Kantor Pusat: Hong Kong
Terdaftar di bursa: Bursa Efek Singapura
Anggota RSPO: Ya



Noble Group tercatat di Bursa Efek Singapura. Pendirinya, Richard Elman, adalah pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham sebesar 22%, dan beberapa institusi pemegang saham seperti Best Investment Corporation, China Investment Corporation, Orbis Holdings dan Franklin Resources juga memegang saham yang cukup besar.²⁵² Noble Group memiliki minat usaha pada komoditas seperti minyak, gas, batubara, logam dan mineral, umumnya dengan fokus pada kegiatan perdagangan dan rantai pasok, bukan pengelolaan tambang atau fasilitas produksi lainnya secara langsung.²⁵³

KAITAN YANG DIKETAHUI SAAT INI DENGAN HSBC

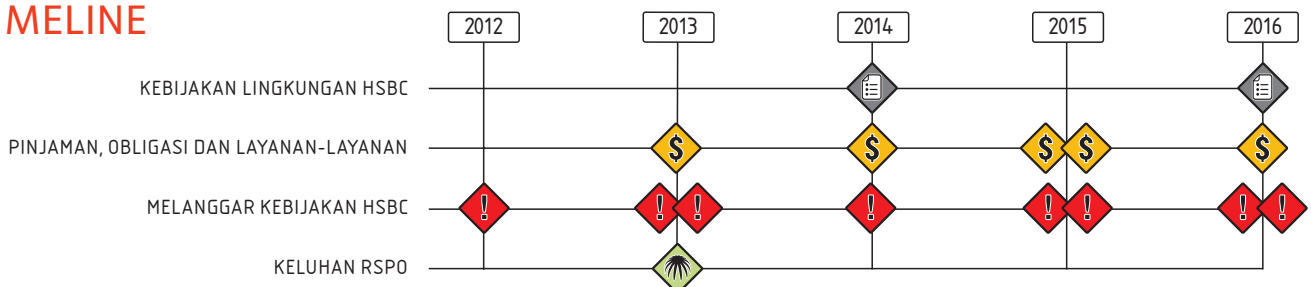
PINJAMAN

FASILITAS	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	PEMINJAM ATAU PENERBIT	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Pembiayaan kembali dan pinjaman jangka tetap untuk korporasi	US\$650 juta	Tidak diketahui	Noble Group Ltd	23/12/2013	Salah satu dari 11 pemberi pinjaman
Pembiayaan kembali dan kredit bergulir korporat umum	US\$1,1 milyar	Tidak diketahui	Noble Group Ltd	18/05/2015	Salah satu dari 35 pemberi pinjaman, bookrunner, arranger mandataris
Letter of credit	US\$1,1 milyar	Tidak diketahui	Noble Group Ltd	15/07/2015	Agen sindikasi
Kredit bergulir korporat umum	US\$1 milyar	US\$90 juta	Noble Group Ltd	12/05/2016	Salah satu dari 25 pemberi pinjaman, bookrunner, arranger mandataris
Total	US\$3,9 milyar	Sedikitnya US\$90 juta			

OBLIGASI

SEKURITI	NILAI TOTAL	PENERBIT	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Penerbitan obligasi korporasi	US\$400 juta	Noble Group Ltd	24/06/2014	Bookrunner

TIMELINE



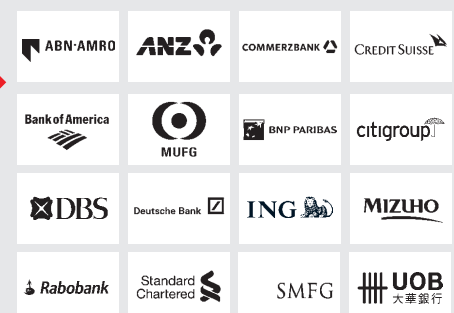
PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi-konsesi PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL), Papua; PT Henrison Inti Persada (PT HIP), Papua Barat

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (PT PAL, PT HIP)
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (PT PAL, PT HIP)
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat dan tidak terpenuhinya proses PADIATAPA (PT HIP)
- Konflik sosial yang signifikan (PT HIP, PT PAL)
- Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu sertifikasi penuh RSPO (tingkat perusahaan)



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN NOBLE GROUP



Menyusul berita di bulan April 2016 bahwa HSBC telah dimandatkan sebagai *lead arranger* untuk fasilitas kredit bergulir tanpa jaminan sebesar US\$ 1 miliar untuk Noble,²⁵⁰ Environmental Investigation Agency menunjukkan bahwa menyediakan pembiayaan untuk Noble akan melanggar kebijakan Komoditas Pertanian dan Kehutanan HSBC, dan bahwa 12 dari bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan kesepakatan ini memiliki kebijakan yang mungkin tidak kompatibel dengan proyek-proyek minyak sawit Noble, membawa potensi risiko likuiditas dan merosotnya peringkat kredit.²⁵¹

PERKEBUNAN

Kelompok usaha ini menjalankan dua perkebunan kelapa sawit di bawah Noble Plantations Pte Ltd.²⁵⁴ PT Henrison Inti Perkasa (PT HIP) mengoperasikan 32.546 ha²⁵⁵ perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat. Izin perkebunan diterbitkan tahun 2006, meskipun ada indikasi bahwa penanaman mungkin telah dimulai secara ilegal pada tahun 2003.²⁵⁶ Noble mendapatkan konsesi tersebut dari Kayu Lapis Indonesia Group pada tahun 2010.²⁵⁷

PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL), yang memiliki sebuah konsesi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dibeli oleh Noble Group pada tahun 2011 dengan nilai US\$ 30,9 juta.²⁵⁸ Pembukaan lahan dimulai di konsesi seluas 38.360 Ha²⁵⁹ tersebut pada tahun 2012.

Dalam Laporan Komunikasi Perkembangan Tahunan 2015-nya ke RSPO, Noble mengaku telah menanam 14.876 ha lahan dengan kelapa sawit, yang 8.757 ha di antaranya sudah siap panen dan 6.119 ha masih muda.²⁶⁰

Konsesi-konsesi kelapa sawit tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Noble Agri, divisi produk pertanian dan perdagangan Noble. Ketika 51% saham di Noble Agri dijual kepada BUMN China COFCO pada bulan April 2014,²⁶¹ kedua perkebunan ini tidak termasuk dalam penjualan. Sebaliknya, Noble Group mengeluarkan surat hutang (*promissory note*) untuk Noble Agri yang akan mereka bayarkan seandainya ada pihak yang berminat membeli dan terjadi penjualan.²⁶² Noble Group menyatakan dalam Laporan Tahunan 2015-nya bahwa situasi ini tidak berubah, dan bahwa kelompok usaha ini tengah berunding dengan para pembeli potensial.²⁶³ Tidak ada pemberitahuan yang diberikan sejak saat itu kepada Bursa Efek Singapura yang menunjukkan telah terjadi penjualan.²⁶⁴ Noble mendivestasi 49% sahamnya yang tersisa di Noble Agri ke anak perusahaan COFCO pada bulan Maret 2016.²⁶⁵

Laporan Komunikasi Perkembangan Tahunan Noble Group ke RSPO menyatakan bahwa perusahaan memproduksi 21.500 ton CPO dan 3.100 ton minyak inti sawit (PKO) di tahun 2015.²⁶⁶

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN

Situs Noble Group merujuk pada Kebijakan keberlanjutan, namun dokumen sebenarnya tidak ditemukan di situs tersebut atau di dalam ranah publik.²⁶⁷ Sebuah salinan diberikan agen hubungan masyarakat (Humas) Noble Group Bell Pottinger kepada Greenpeace; dokumen tersebut tidak berisi komitmen lingkungan

yang substantif dan bukan merupakan sebuah kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi'.²⁶⁸

Sebuah dokumen penyerta dari Noble Group menyatakan bahwa perusahaan telah menerbitkan Prosedur Operasional Standar untuk PT PAL maupun PT HIP. Ini termasuk komitmen-komitmen berikut, yang dikaitkan dengan 'Pedoman Prosedur Operasional Standar Pembukaan Lahan yang Tidak Mematuhi Ketentuan Baru' (diterbitkan pada bulan Maret 2016):

- Sejak bulan November 2005, penanaman baru belum menggantikan hutan primer atau daerah apapun yang harus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai daerah NKT
- Penanaman baru direncanakan dan dikelola untuk memastikan sepenuhnya bahwa daerah NKT yang telah diidentifikasi dipelihara dan, jika perlu, ditingkatkan

Komitmen lain juga ditulis, yang dikaitkan dengan 'Prosedur Operasional Standar – Pedoman Konservasi dan Lingkungan Hidup' (diterbitkan pada bulan Agustus 2014):

- Kami mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO dan berkomitmen untuk menerapkan metode Stok Karbon Tinggi (SKT) di seluruh lahan yang kami miliki.
- Tidak akan ada pembangunan baru yang dilakukan di lahan gambut, termasuk semua skema plasm.
- Kami berkomitmen terhadap kebijakan nol pembakaran yang ketat.

TRANSPARANSI

Dokumentasi diserahkan pada RSPO untuk PT PAL melalui Prosedur Penanaman Baru.²⁶⁹ PT HIP tidak dapat memberi informasi melalui NPP untuk penanaman yang sedang berlangsung pada saat Noble menjadi anggota RSPO bulan Oktober 2011. Informasi ini diterbitkan pada bulan Mei 2014²⁷⁰ setelah ada pengaduan resmi terhadap perusahaan.²⁷¹

Noble Group telah menyatakan rencananya untuk mendapatkan sertifikasi RSPO untuk PT HIP di tahun 2016 dan PT PAL di tahun 2020.²⁷² Ini tidak memenuhi tenggat waktu kebijakan HSBC untuk memiliki setidaknya satu unit manajemen bersertifikat RSPO pada tahun 2014 dan seluruh unit mendapatkan sertifikasi RSPO pada tahun 2018.²⁷³

KAITAN DENGAN PASAR

Menurut data perusahaan, Musim Mas tampaknya masih menjadi pelanggan Noble; mereka mengakui 'tengah membahas rencana aksi tindak lanjut yang juga mempertimbangkan proses RSPO. Proses pelibatan aktif ini akan dimulai dengan sebuah lokakarya dan kunjungan ke lokasi'.²⁷⁴

AAK menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Noble.²⁷⁵ Astra Agro Lestari tidak mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Noble.

STUDI KASUS: PT HENRISON INTI PERSADA DAN PT PUSAKA AGRO LESTARI

Lokasi: Sorong, Papua Barat dan Mimika, Papua
Pelanggaran kebijakan

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan (PT PAL, PT HIP)
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (PT PAL, PT HIP)
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat dan kurangnya PADIATAPA (PT HIP)
- Konflik sosial yang signifikan (PT PAL, PT HIP)

ANALISIS PEMETAAN

- Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2011 wilayah PT HIP dan PT PAL didominasi oleh hutan.
- Pada tahun 2013, peta KLHK menunjukkan pembukaan lahan yang cukup besar di PT HIP dan satu lajur pembukaan di PT PAL.
- Peta KLHK menunjukkan sebagian pembukaan terus berlanjut sampai antara tahun 2013 dan 2015 di PT HIP dan pembukaan yang luas di PT PAL.
- Citra satelit terbaru menunjukkan pembukaan skala besar dan pembangunan yang terus berlanjut di PT PAL.

DEFORESTASI

Sebelum pekerjaan perkebunan dimulai, sebagian besar dari kedua konsesi ini terlihat sebagai hutan dalam survei tutupan

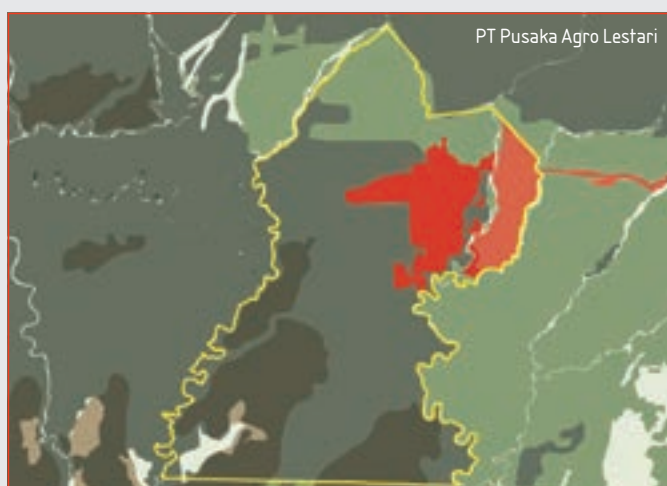
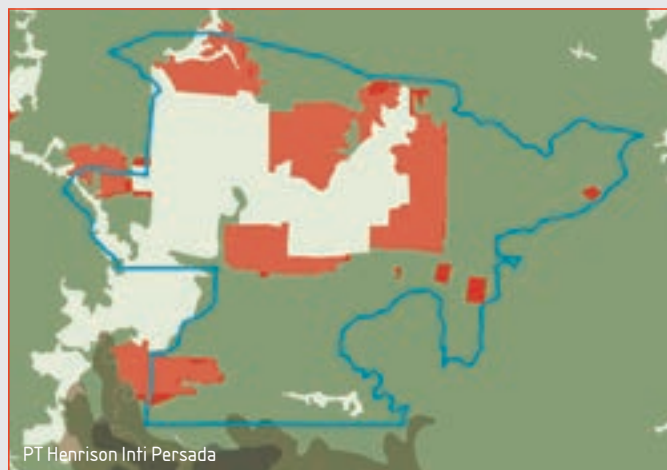
lahan Kementerian Kehutanan Indonesia. Dalam hal PT HIP, tutupan hutannya digolongkan sebagai tutupan sekunder;²⁷⁶ PT PAL sebagian besar wilayahnya merupakan hutan primer dan hutan rawa primer, dengan sedikit hutan sekunder di bagian utara areal konsesi.²⁷⁷ Sekitar dua pertiga dari konsesi PT PAL juga diklasifikasikan sebagai Lanskap Hutan Utuh pada tahun 2013,²⁷⁸ yang berarti daerah tersebut memiliki nilai khusus untuk konservasi sebagai kawasan hutan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 2013, peta KLHK menunjukkan adanya pembukaan besar di PT HIP dan sejalur pembukaan di PT PAL. Deforestasi tampaknya telah melambat di PT HIP sejak tahun 2014 dan masih tersisa areal hutan yang luas.²⁷⁹ Meskipun demikian, di konsesi PT PAL, deforestasi yang cepat masih terus berlanjut sepanjang tahun 2016.²⁸⁰

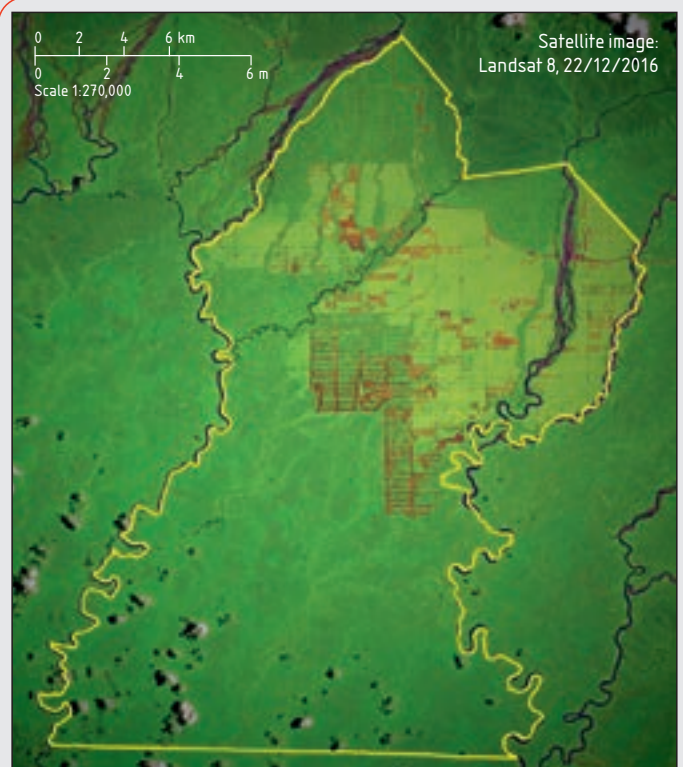
PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

Survei gambut menunjukkan bahwa gambut dengan berbagai kedalaman ditemukan di sekitar dua-pertiga areal konsesi PT PAL.²⁸¹ Menurut penilaian NKT perusahaan, mereka bermaksud untuk menanam sebagian besar lahan gambut ini, dengan pengecualian 1.509 ha gambut dalam yang akan disisihkan sebagai daerah NKT.²⁸² Hanya lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter akan disisihkan untuk konservasi.²⁸³ Hal ini mungkin merupakan pelanggaran terhadap kriteria RSPO yang melarang penanaman baru di lahan gambut tanpa melihat kedalamannya yang melebihi 100 ha di setiap konsesi.²⁸⁴

Noble Group kemudian menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi kriteria-kriteria ini dan bahwa tidak akan ada pembangunan di lahan gambut.²⁸⁵ Namun, mereka masih belum menerbitkan revisi rencana pengelolaan untuk PT PAL yang menjamin perlindungan semua areal lahan gambut.



- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Gambut
- Gambut Berhutan
- Deforestasi 2011-12
- Deforestasi 2013-15



18 May 2011, PT Henrison Inti Persada:
Pembukaan hutan baru-baru ini
di konsesi Noble di Sorong, Papua
Barat, didokumentasikan pada saat
kegiatan lapangan oleh Environmental
Investigation Agency.
©EIA



BANJIR DAN PENENTANGAN SETEMPAT TERHADAP PT PUSAKA AGRO LESTARI

Bulan Oktober 2014 banjir parah terjadi di desa Miyoko dan Aikawapuka, yang terletak di kawasan hilir dari PT PAL.²⁸⁶ Masyarakat adat Kamoro di desa-desa tersebut harus mengungsi, dan sebagian dilaporkan belum kembali sampai pertengahan tahun 2015.²⁸⁷ Beberapa tokoh setempat, termasuk Uskup Timika, menyalahkan deforestasi di PT PAL atas banjir ini dan mendesak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan keras untuk mengatasi dampak negatif dari operasi perusahaan.²⁸⁸

Bupati setempat, Eltinus Omaleng, menindaklanjuti kritikan ini di bulan Desember 2014 dengan mengunjungi lokasi bersama kepolisian setempat dan pimpinan militer, dan memberitahu perusahaan bahwa beliau akan mencabut izin operasi perusahaan.²⁸⁹ PT PAL mengumumkan niatnya untuk menggugat keputusan tersebut, mengklaim bahwa mereka didukung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.²⁹⁰ Karena perusahaan tersebut memiliki Hak Guna Usaha, mereka dapat mengajukan argumen hukum yang kuat bahwa bupati tidak memiliki kewenangan hukum untuk menghentikan suatu usaha dengan cara ini.

Bupati menerbitkan surat keputusan baru pada tanggal 15 Maret 2015 yang memberi hak pada perkebunan untuk kembali beroperasi dan menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan cara-cara perkebunan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat Mimika.²⁹¹ Namun, deforestasi yang terus berlanjut menyiratkan risiko bahwa banjir bisa terulang kembali. Dalam sebuah pertemuan dengan pemerintah daerah di bulan Juli 2016, PT PAL dilaporkan mengakui perkebunannya telah menimbulkan dampak negatif di sepanjang sungai Kamoro dan Iwaka, namun mengatakan bahwa inisiatif reboisasi oleh perusahaan akan membantu mengatasi masalah tersebut.²⁹²

PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN

Terjadi banyak penentangan terhadap PT HIP dari masyarakat adat Moi Kelin yang tinggal di sekitar areal perkebunan. Meskipun pemimpin marga telah menandatangani dokumen-dokumen pelepasan tanah adat mereka kepada perusahaan sekitar tahun 2006, penelitian oleh LSM *Environmental Investigation Agency* mengindikasikan bahwa kesepakatan-kesepakatan ini eksploitatif dan ada indikasi kuat bahwa masyarakat telah ditipu.²⁹³ Kompensasi sangat rendah – marga Gilik hanya dibayar Rp 20.000 (US\$ 1,51) per hektar untuk pelepasan 420 ha lahan,²⁹⁴ dan marga Klasibin dilaporkan dibayar Rp 22.600 (US\$ 1,71) per hektar dan marga Do Rp33.000²⁹⁵ (US\$ 2,50) per hektar.²⁹⁶ Pada saat itu perusahaan sudah berjanji untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, membangun perumahan baru dan menyediakan air bersih. Di tahun 2014 warga masyarakat melaporkan bahwa mereka masih belum melihat pelaksanaan program-program ini – dan mengklaim akses mereka ke air bersih sebenarnya bahkan semakin buruk karena sungai-sungai setempat telah tercemar oleh perusahaan.²⁹⁷

Dalam ringkasan penilaian dampak sosial dan pemberitahuan prosedur Penanaman baru (NPP) perusahaan yang disampaikan kepada RSPO, PT HIP tidak mengklaim mereka telah memperoleh PADIATAPA dari masyarakat setempat.²⁹⁸ Namun ringkasan tersebut menyatakan adanya upaya yang lebih baru untuk merundingkan kembali ketentuan-ketentuan penggunaan lahan: 'Pada tahun 2012 dan 2013, perusahaan telah membuat perjanjian kerjasama dengan 12 marga untuk menyelesaikan masalah lahan seluas 27.526 ha. Kompensasi yang diberikan adalah alokasi dana kontribusi sosial, perumahan dan program kebun plasma.'²⁹⁹ Perjanjian-perjanjian tersebut mungkin menyelesaikan beberapa masalah dalam perundingan lahan yang asli, namun karena dibuat setelah kerja perkebunan dimulai, perjanjian-perjanjian tersebut jelas tidak dapat



digambarkan sebagai persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

Pada bulan September 2015, perwakilan sembilan marga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan pembebasan lahan PT HIP, menyatakan bahwa PT HIP belum mendapatkan persetujuan mereka dan bahwa mereka tengah berupaya mendapatkan kompensasi dari perusahaan.³⁰⁰ Terjadi pemblokiran sporadis dan dugaan pelanggaran terhadap hukum adat.³⁰¹

Kebijakan komoditas pertanian HSBC menetapkan bahwa penanam harus mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat setempat dan mencantumkan 'operasi di daerah dengan konflik sosial signifikan' di bawah kategori 'Bisnis yang Dilarang'.³⁰² P&C RSPO juga mewajibkan PADIATAPA dan kompensasi yang adil.³⁰³

IMPLIKASI KEUANGAN BAGI NOBLE GROUP AKIBAT DEFORESTASI DAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

Bisnis kelapa sawit Noble Group sesuai perhitungan hanya mewakili kurang dari satu persen dari total bisnis kelompok usaha ini;³⁰⁴ Namun, hal itu telah menimbulkan masalah bagi kelompok usaha ini karena beberapa investor telah mengecualikan Noble karena pelanggaran kebijakan keberlanjutan.

Pada tahun 2014 Dewan Kode Etik yang memberi saran untuk Dana Pensiun Global Pemerintah (GPFG) negara Norwegia menyarankan agar tidak melakukan investasi di masa depan terhadap Noble Group. Pembeneran utamanya adalah analisis penilaian NKT yang dihasilkan untuk kedua konsesi; analisis-analisis tersebut dinilai kurang lengkap untuk menjamin pelestarian habitat-habitat penting. Yang manapun juga, penilaian tersebut dianggap tidak mempertimbangkan seluruh jenis habitat yang ada dalam konsesi-konsesi tersebut dan tidak mengkaji elemen-

elemen kunci dari ekosistem di sana, misalnya invertebrata.³⁰⁵ KLP, sebuah asuransi jiwa dan organisasi dana pensiun dari Norwegia, juga mengumumkan niatnya untuk mengecualikan Noble pada bulan Juni 2015.³⁰⁶

PERNYATAAN PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace telah menghubungi Noble untuk mengkonfirmasi pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lain, dan untuk memverifikasi temuan-temuan dalam laporan ini tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan yang akan melanggar kebijakan HSBC. Dalam surel balasannya, Humas perusahaan Bell Pottinger menyatakan: 'Pernyataan-pernyataan ini tidak benar, terlepas dari fakta bahwa sertifikasi RSPO PT HIP telah bergeser beberapa bulan, ke tahun 2017'.³⁰⁷

Greenpeace tetap berpegang pada temuan-temuan dalam laporan ini.

Sehubungan dengan pinjaman Noble dari HSBC, Bell Pottinger menyatakan: 'Sebagai sebuah kebijakan (Noble) tidak memberikan informasi komersial yang berpotensi sensitif secara pribadi kepada pihak ketiga'.³⁰⁸

BANK

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan Noble dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberikan komentar atas hubungan-hubungan yang spesifik'.³⁰⁹

Junl 2016, PT Bio Inti Agrindo:
6°54'54.49"S 140°28'20.53"E
Perkebunan kelapa sawit muda di konsesi
POSCO Daewoo di Merauke, Papua
©MIGHTY





Perusahaan: POSCO Daewoo Corporation
(sebelumnya Daewoo International Corporation)
Kelompok Usaha: POSCO
Kantor Pusat: Korea Selatan
Terdaftar di bursa: Baik POSCO Daewoo Corporation maupun POSCO sendiri terdaftar di Bursa Saham Korea

Anggota RSPO: Bukan

POSCO Daewoo Corporation (berganti nama dari Daewoo International Corporation di bulan Maret 2016)³¹² didirikan ketika sayap perdagangan Daewoo Corporation, sebuah konglomerasi besar asal Korea, terkena hantaman keras pada saat krisis keuangan Asia,³¹³ dilepas pada tahun 2000.³¹⁴ Di tahun 2010 perusahaan ini dibeli oleh POSCO, yang saat ini menguasai 61,13% saham.³¹⁵

POSCO adalah perusahaan multi nasional Korea Selatan, dan salah satu produsen baja terbesar di dunia. Pemegang saham utama pada akhir tahun 2015 termasuk *Korean National Pension Service* (9,04%), *Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation* (5,04%), Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pohang (2,18%), *Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd* (2,14%) dan *KB Financial Group Inc* dan anak-anak perusahaannya (2,1%).³¹⁶

Bisnis inti POSCO Daewoo adalah sebagai perusahaan perdagangan, namun mereka juga memiliki keterlibatan besar dalam industri sumber daya selain kelapa sawit, termasuk produksi minyak dan gas, serta pertambangan.³¹⁷

KAITAN YANG DIKETAHUI SAAT INI DENGAN HSBC

FASILITAS	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	PEMINJAM	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Pinjaman jangka tetap pembiayaan proyek	US\$500 juta	US\$78 juta	Krakatau Posco PT	14/02/2012	Salah satu dari tujuh pemberi pinjaman, arranger mandataris
Pinjaman jangka tetap pembiayaan proyek	US\$700 juta	Tidak diketahui	Krakatau Posco PT	14/02/2012	Arranger mandataris
Pinjaman jangka tetap pembiayaan proyek	US\$529 juta	US\$82 juta	Krakatau Posco PT	14/02/2012	Salah satu dari tujuh pemberi pinjaman, arranger mandataris
Pinjaman jangka tetap belanja modal	US\$243 juta	US\$50 juta	Posco Maharashtra Steel Pvt Ltd	04/04/2012	Salah satu dari lima pemberi pinjaman, arranger mandataris
Pinjaman jangka tetap belanja modal dan korporat umum	US\$209 juta	US\$30 juta	Posco Assan Tst Celik Sanayi AS	24/04/2012	Salah satu dari empat pemberi pinjaman, arranger mandataris
Pinjaman jangka tetap belanja modal	US\$196 juta	US\$30 juta	POSCO Vietnam Co Ltd	03/07/2013	Salah satu dari tujuh pemberi pinjaman, arranger mandataris
Total	US\$2,4 milyar	Sedikitnya US\$269 juta			

Laporan keuangan pada tahun 2014³¹⁹ dan 2015³¹¹ mencantumkan kontrak serah dengan nilai tukar tetap (currency forward contract) dengan maksimum kredit sejumlah US\$20 juta yang disediakan HSBC.

TIMELINE



PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi PT Bio Inti Agrindo, Papua

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Penggunaan api untuk pembukaan lahan
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat, lemahnya PADIATAPA, dan konflik sosial yang signifikan lainnya
- Bukan anggota RSPO



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN POSCO DAEWOO





28 Maret 2013, PT Bio Inti Agrindo:
Kayu hangus dan api yang membara di
hutan yang baru dibuka di konsesi POSCO
Daewoo concession di Merauke, Papua.
©GREENPEACE

PERKEBUNAN

Perkebunan kelapa sawit satu-satunya yang dimiliki perusahaan dipegang oleh anak perusahaan PT Bio Inti Agrindo, di mana POSCO Daewoo Corporation memegang 85% sahamnya. POSCO Daewoo membeli PT Bio Inti Agrindo dari pemilik sebelumnya pada tahun 2011,³¹⁸ setelah perusahaan memperoleh izin utama yang dibutuhkan untuk operasinya.³¹⁹ Konsesi seluas 36.401 ha tersebut³²⁰ diperkirakan telah mulai memproduksi minyak kelapa sawit pada tahun 2015 atau 2016 karena tanaman di perkebunan perusahaan tersebut telah masak.³²¹

KAITAN DENGAN BANK

Tahun 2015, POSCO Daewoo Corporation mendapat pinjaman dari beberapa bank termasuk Woori Bank dan AKA Bank.³²² Fasilitas kredit tetap diambil dari Woori Bank dan Korea Exim Bank dan perusahaan membuat kontrak serah dengan nilai tukar tetap (*currency forward contract*) dengan bank-bank berikut: Woori Bank, Busan Bank, Kookmin Bank, Citibank Korea, SC Bank Korea, HSBC, UOB, Bank of Communications, China Construction Bank, JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Agricole, KEB Hana Bank, Korea Exchange Bank, ANZ Bank, Societe Generale, SMBC dan Industrial and Commercial Bank of China.³²³ POSCO Daewoo bertindak sebagai penjamin pinjaman sebesar US\$ 59.500.000 untuk PT Bio Inti Agrindo dari Korea Exim Bank.³²⁴ *Lead Bank* dalam pinjaman sindikasi POSCO termasuk Bank of America, HSBC, Export-Import Bank of Korea, Natixis dan Korea Development Bank.³²⁵

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Baik PT Bio Inti Agrindo maupun induk perusahaannya bukan anggota RSPO, dan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan mereka belum ditempatkan dalam domain publik.

'Pedoman Pelaksanaan' (*rules of conduct*)³²⁶ POSCO Daewoo berisi pernyataan tentang kebijakan lingkungannya. Bagian lingkungannya (bab 7, pasal 28) tidak berisi komitmen khusus, sebaliknya menggunakan istilah-istilah yang tidak berkomitmen seperti 'akan berupaya untuk' dan 'akan meminimalisir', dan tidak menyebutkan larangan deforestasi, penanaman di lahan gambut atau daerah bernilai konservasi tinggi.

Konsesi PT Bio Inti Agrindo ini sepenuhnya berhutan sebelum pembangunan perkebunan dimulai. Meskipun ada

daerah NKT yang telah disisihkan, perusahaan menunjukkan bahwa penyisihan ini hanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin dan hak tanam dari pemerintah Indonesia,³²⁷ meskipun hal ini umumnya dianggap tidak cukup untuk menjamin adanya perlindungan habitat penting. Pada bagian keberlanjutan dari laporan tahun 2015-nya, POSCO menanggapi kritik terhadap proyek kelapa sawitnya, tapi terus membela diri, mengklaim bahwa AMDAL tahun 2009 dan daerah NKT dalam konsesinya berada pada tingkat perlindungan lingkungan yang dapat diterima.³²⁸

Beberapa ayat dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia (pasal 25) dan bisnis yang berkelanjutan (pasal 26) dalam 'Pedoman Perilaku'³²⁹ POSCO Daewoo relevan dengan bisnis kelapa sawitnya, misalnya 'Perusahaan ... akan mempertahankan lingkungan kerja yang menghormati keragaman politik, ekonomi, sosial dan budaya', 'Perusahaan akan mendukung dan menghormati standar-standar yang diakui dunia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, dan menetapkan kebijakan dan sistem perlindungan hak asasi manusia yang jelas dan berusaha untuk tidak melanggar hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaannya,' serta 'Perusahaan tidak akan terlibat dalam tindakan apapun yang mungkin ... menimbulkan ketidakharmonisan di kalangan masyarakat'.

BATAS WAKTU

POSCO Daewoo menyatakan kepada Dewan Kode Etik Dana Pensiun Pemerintah negara Norwegia pada tahun 2015 bahwa mereka berencana untuk memperoleh sertifikasi ISPO pada tahun 2016 dan sertifikasi RSPO setelahnya.³³⁰ Namun, pada bulan Desember 2016 perusahaan tersebut masih belum menjadi anggota RSPO. Ini merupakan pelanggaran terhadap tenggat waktu kebijakan HSBC tentang keanggotaan RSPO pada bulan Juni 2014.³³¹

KAITAN DENGAN PASAR

Menurut data perusahaan, Cargill 'melakukan satu pembelian dari Daewoo sebelumnya pada tahun 2016 dan akan meninjau hubungan dagang di masa depan atas dasar kepatuhan pemasok dengan kebijakan minyak sawit berkelanjutan kami'.³³²

AAK menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Daewoo.³³³ Astra Agro Lestari tidak mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan Daewoo.

STUDI KASUS: PT BIO INTI AGRINDO

Lokasi: Ulilin, Merauke

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT)
- Penggunaan api untuk pembukaan lahan
- Pelanggaran hak-hak masyarakat setempat dan lemahnya FPIC

ANALISIS PEMETAAN

- Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2011 PT BIA hampir seluruhnya ditutupi hutan.
- Pada tahun 2013, hampir setengah dari blok utara telah dibuka.
- Pada tahun 2015, tampak hampir semua blok utara telah dibuka dan sekitar sepertiga dari areal konsesi utama.
- Citra satelit terbaru menunjukkan pembukaan yang terus berlanjut sepanjang 2016, dengan sekitar setengah dari blok konsesi utama kini telah dibuka.
- Konsesi memiliki banyak titik api selama 2015, terutama di kawasan hutan di blok konsesi utama yang baru-baru ini dibuka.

- PT Bio Inti Agrindo
- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Gambut
- Gambut Berhutan
- Titik Panas Api 2015
- Titik Panas Api 2016
- Deforestasi 2011–12
- Deforestasi 2013–15





DEFORESTASI

Lebih dari 19.000 ha hutan primer dan sekunder telah dibuka dalam konsesi PT Bio Inti Agrindo (PT BIA) sejak kerja dimulai. Sekitar 16.000 ha hutan masih berdiri dalam areal konsesi, termasuk 9.000 ha digolongkan sebagai hutan primer.³³⁴

Terlepas dari hilangnya habitat lokal yang disebabkan oleh deforestasi, adanya perkebunan berisiko menimbulkan gangguan lebih luas terhadap sebuah lanskap konservasi penting. Banyak dari bagian timur areal konsesi tersebut diidentifikasi sebagai lanskap hutan utuh pada tahun 2013.³³⁵ Konsesi tersebut dibagi menjadi dua blok, dipisahkan oleh kawasan hutan dan lahan basah yang dilindungi, yaitu Cagar Alam Danau Bian. Tidak ada zona penyangga antara perkebunan dan cagar alam, dan beberapa anak sungai dari Sungai Bian mengalir melintasi areal konsesi ke dalam cagar alam, yang berarti kegiatan perkebunan berpotensi menimbulkan polusi atau banjir. Di daerah hilir, warga di desa-desa sekitar melaporkan pada tahun 2012 bahwa mereka telah berhenti minum air sungai dan mandi di sungai sejak pekerjaan dimulai di PT BIA dan di perkebunan kelapa sawit sekitar lainnya. Mereka mengklaim bahwa ikan dan kura-kura mati dan anak-anak menderita penyakit kulit dan pernapasan setelah mandi di sungai.³³⁶ Sebuah dokumenter tahun 2015 yang menunjukkan warga masyarakat mengatakan mereka sekarang hanya bisa minum air kemasan menunjukkan bahwa pencemaran akan terus menjadi masalah.³³⁷

Dewan Kode Etik, yang mengevaluasi investasi Dana Pensiun Global Pemerintah (GPF) negara Norwegia, menyimpulkan bahwa AMDAL PT BIA tidak mencakup survei yang memadai mengenai keanekaragaman hayati dalam konsesi. Hanya delapan spesies pohon, empat spesies mamalia, dua spesies reptil, delapan spesies burung dan lima spesies ikan yang disebutkan dalam laporan, dan tidak ada cukup informasi tentang metodologi yang digunakan.³³⁸ Namun, beberapa spesies yang disebutkan dalam laporan tercantum sebagai terancam punah pada IUCN Red List.³³⁹ Mengingat bahwa hutan hujan di Papua Selatan secara ekologis kaya namun tidak disurvei dengan baik, mendasarkan pembangunan besar pada kajian yang tidak memadai akan membawa risiko hilangnya habitat-habitat penting. Akibat laporan Dewan Kode Etik tersebut, GPF memutuskan untuk mendivestasi baik US\$ 9 juta sahamnya di Daewoo maupun US\$ 198.000.000 sahamnya di POSCO.³⁴⁰

KEBAKARAN

Jumlah titik api yang tidak biasa, teramati di dalam konsesi PT BIA selama tahun 2012-2015. Banyak dari titik-titik api ini berkorelasi dengan daerah yang dibuka oleh perusahaan selama bertahun-tahun,³⁴¹ sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan mungkin menggunakan api secara saja untuk membuka hutan atau kalau tidak mungkin bertanggung jawab



June 2016, PT Bio Inti Agrindo:
6°54'36.23"S 140°28'29.47"E
Sebuah jalan yang membagi hutan alam
dengan perkebunan sawit muda di konsesi
POSCO Daewoo di Merauke, Papua.
©MIGHTY

atas salah kelola yang parah.³⁴² Ini merupakan kegiatan yang dilarang hukum Indonesia dan pelanggaran kebijakan HSBC. Pola yang sama terlihat di perkebunan-perkebunan sekitarnya yang dimiliki oleh perusahaan Korindo, yang memiliki hubungan dekat dengan PT BIA dan memberi saran-saran kepada BIA,³⁴³ namun tidak ada konsesi perkebunan lainnya di Papua memiliki titik api sebanyak itu.

KONFLIK SOSIAL

PT BIA adalah salah satu dari enam perkebunan kelapa sawit besar di kawasan Papua ini yang sudah mulai membuka hutan sejak tahun 2011, menyebabkan gejolak besar dalam kehidupan masyarakat adat Marind di daerah tersebut. Operasi ini juga menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Diduga PT BIA tidak mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari seluruh masyarakat sebelum memulai kerjanya.³⁴⁴ Warga masyarakat juga mengklaim bahwa mereka kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tidak punya akses ke dokumen perusahaan yang relevan dan kompensasi yang dibayarkan tidak memadai. Tempat-tempat keramat dilaporkan telah dibuka dan konflik pecah antar berbagai marga.³⁴⁵

Beberapa marga telah mempraktikkan hukum adat dalam upaya untuk mencegah perusahaan menggunakan tanah mereka, mengklaim bahwa penerima kompensasi untuk

tanah tersebut bukanlah pemilik adat sesungguhnya.³⁴⁶ Kebijakan HSBC melarang penyediaan layanan keuangan kepada perusahaan yang operasinya menimbulkan konflik sosial dan apabila terdapat bukti pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat setempat, termasuk gagal mendapatkan PADIATAPA.³⁴⁷

PERNYATAAN PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace telah menghubungi POSCO Daewoo untuk meminta konfirmasi tentang pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lain, dan untuk memverifikasi temuan-temuan dalam laporan ini tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang akan melanggar kebijakan HSBC. Pihak perusahaan tidak menjawab.

BANK

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan Daewoo dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberikan tanggapan tentang hubungan-hubungan yang spesifik.'³⁴⁸



30 Mei 2015,
PT PP Lonsum Kedang Makmur:
0° 24' 37.21" S 116° 3' 11.48" E
Kanal pengeringan, tunggul pohon yang
hangus dan pembangunan baru-baru ini
di Kalimantan Timur.
©AIDENVIRONMENT



Indofood
THE SYMBOL OF QUALITY FOODS

Perusahaan: Indofood
Kelompok Usaha: Salim group
Kantor Pusat: Indonesia
Terdaftar di bursa: Bursa Efek Singapura (Indo Agri) dan Bursa Efek Jakarta (Indofood)
Anggota RSPO: Anak perusahaan IndoAgri Lonsum dan Salim Ivomas, namun perusahaan kelompok Salim lainnya bukan anggota.

PT Indofood CBP Sukses Makmur (Indofood) adalah salah satu konglomerasi pangan hulu-hilir yang besar, dengan usaha mulai dari perkebunan kelapa sawit sampai pabrik tepung terigu dan divisi produk konsumen yang tercatat sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia (Indomie), serta usaha-usaha lain termasuk susu, makanan ringan dan minuman.³⁵² Indofood merupakan mitra usaha patungan dengan PepsiCo sebagai produsen tunggal merek PepsiCo di Indonesia³⁵³ dan memiliki usaha patungan 50/50 dengan Nestle, yaitu PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia.³⁵⁴

Indofood adalah bagian dari Salim Group, dipimpin oleh Anthoni Salim, yang memegang saham mayoritas di Indofood melalui First Pacific Company dan CAB Holdings.³⁵⁵ Salim Group yang memiliki struktur longgar ini juga memegang konsesi kelapa sawit yang luas melalui perusahaan-perusahaan lain (lihat di bawah).

KAITAN YANG DIKETAHUI SAAT INI DENGAN HSBC

PINJAMAN

FASILITAS ATAU SEKURITI	NILAI TOTAL	NILAI KONTRIBUSI HSBC	PEMINJAM ATAU PENERBIT	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Pembiayaan kembali dan pinjaman jangka tetap korporat umum	US\$160 juta	Tidak diketahui	FP Finance 2013 Ltd	16/05/2013	Salah satu dari tujuh investor, arranger mandataris
Pembiayaan kembali pinjaman jangka tetap	US\$200 juta	US\$40 juta	FP Finance 2014 Ltd	25/09/2014	Salah satu dari lima investor, arranger mandataris
Total	US\$360 juta	Sedikitnya US\$40 juta			

OBLIGASI

SEKURITI	NILAI TOTAL	PENERBIT	DITANDATANGANI	PERAN HSBC
Penerbitan obligasi korporasi	US\$400 juta	FPC Finance Ltd	28/06/2012	Joint lead manager, bookrunner
Penerbitan obligasi korporasi	US\$400 juta	FPC Treasury Ltd	16/04/2013	Joint lead manager, bookrunner
TOTAL	US\$800 juta			

HSBC tercatat dalam laporan keuangan tanggal 31 Maret 2016 Indofood Sukses Makmur memiliki deposito tunai sebesar Rp. 108,1 milyar (US\$8,2 juta), yang menunjukkan bahwa bank memberikan layanan keuangan.³⁵⁹ HSBC sebelumnya juga menjadi pemberi pinjaman tunggal untuk Indofood Sukses Makmur, termasuk investasi dan pembiayaan kembali pinjaman jangka panjang sebesar Rp. 106 milyar (~US\$7,6 juta, yang dilunasi tanggal 31/12/2015)³⁵⁰ dan pinjaman sebesar US\$ 10 juta untuk pembiayaan kembali, investasi dan modal kerja yang tercatat dalam catatan tahun 2013.³⁵¹

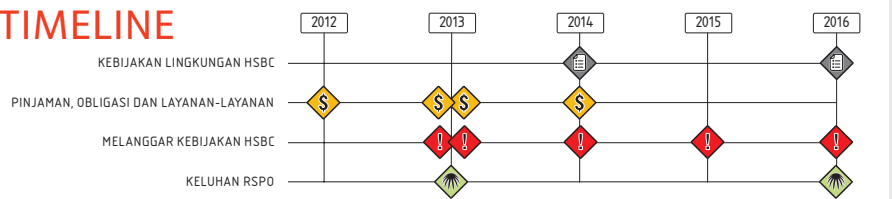
PELANGGARAN KEBIJAKAN HSBC

Konsesi-konsesi Isuy Makmur/Kedang Makmur dan PT Gunta Samba Jaya (PT GSJ), Kalimantan Timur; konsesi-konsesi PT Lonsum, Sumatra Utara

- Deforestasi untuk pembangunan perkebunan: pembukaan cukup besar pada tahun 2013-2014, termasuk 1.000 ha hutan primer; sistem peringatan berbasis satelit menunjukkan terus berlanjutnya pembukaan hutan pada tahun 2016 (IM/KM, PT GSJ)
- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (IM/KM, PT GSJ)
- Kemungkinan deforestasi di lahan gambut (IM/KM)
- Kebakaran yang merajalela selama tahun 2014 dan 2015, termasuk di kawasan hutan primer yang telah dibuka (IM/KM)
- Eksploitasi: pekerja anak di perkebunan, membayar di bawah upah minimum dan pelanggaran standar kesehatan dan keselamatan (konsesi-konsesi PT Lonsum)
- Kegagalan untuk memenuhi jadwal untuk sertifikasi RSPO (tingkat perusahaan)



TIMELINE



BANK-BANK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN INDOFOOD/SALIM



PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

Anak perusahaan Indofood di bidang pertanian yaitu Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri) adalah salah satu perusahaan minyak sawit hulu-hilir terbesar di Indonesia. IndoAgri berkantor pusat di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Singapura. IndoAgri memiliki dua anak perusahaan aktif: PT Salim Ivomas Pratama (Salim Ivomas) dan PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum), yang dilaporkan sebagai anak perusahaan SIMP dalam laporan keuangannya.³⁵⁶

IndoAgri menguasai perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat, Tengah dan Timur.³⁵⁷

Perusahaan ini memiliki 246.000 ha kebun kelapa sawit di Indonesia pada akhir tahun 2015, ditambah 90.000 ha kebun plasma (ini termasuk areal perkebunan karet yang tidak disebutkan).³⁵⁸

Per tanggal 31 Desember 2015, IndoAgri memiliki dan menjalankan 24 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan TBS gabungan sebesar 6,4 juta ton per tahun.³⁵⁹ Perusahaan ini memiliki output TBS tahunan sebesar 4,7 juta ton³⁶⁰ dan output CPO sebesar 1 juta ton.³⁶¹

SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN

IndoAgri adalah perusahaan minyak sawit swasta terbesar di Indonesia yang belum memiliki kebijakan 'No Deforestation, No Gambut, No Eksploitasi' (NDPE) yang menyeluruh. Kebijakan keberlanjutannya lebih lemah dibandingkan dengan kebijakan perusahaan-perusahaan sejawatnya. Kebijakan untuk perkebunannya sendiri termasuk komitmen untuk tidak membuka daerah NKT, dan tidak ada penanaman di lahan gambut, namun tidak berisi janji apapun untuk melindungi hutan stok karbon tinggi (SKT) atau ketentuan yang layak untuk hak-hak buruh seperti konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) atau prinsip-prinsip pemandu PBB.³⁶² Kebijakan mendapatkan suplai (*sourcing*) IndoAgri untuk pemasok pihak ketiganya membolehkan penanaman di lahan gambut dengan kedalaman hingga 3 meter, dan gagal untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan PADIATAPA secara luas, sehingga menjadikannya lebih lemah dari kebijakan keberlanjutan untuk perkebunannya sendiri.³⁶³

SERTIFIKASI DAN TRANSPARANSI

Anak perusahaan IndoAgri Lonsum³⁶⁴ dan SIMP³⁶⁵ adalah anggota RSPO, namun perusahaan-perusahaan Salim yang lainnya bukan anggota. Kedua perusahaan ini menyerahkan Komunikasi Perkembangan Tahunan 2015 ke RSPO,³⁶⁶ namun mereka belum membuka peta-peta konsesi mereka.

SERTIFIKASI RSPO

IndoAgri memproduksi 377.000 ton CPO bersertifikat di tahun 2015.³⁶⁷ 27 dari ke-82 konsesinya dan 9 dari ke-24 pabrik pengolahan kelapa sawitnya telah disertifikasi per tahun 2015.³⁶⁸ IndoAgri bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi penuh untuk perkebunan-perkebunannya dan petani-petani plasmanya di tahun 2019.³⁶⁹ Ini tidak memenuhi tenggat waktu kebijakan HSBC tentang sertifikasi penuh pada tahun 2018.³⁷⁰

RSPO mengembalikan laporan Prosedur Penanaman Baru untuk Isyue Makmur karena tidak lengkap.³⁷¹ Pada saat penulisan, dokumen ini (jika diajukan kembali) tidak tersedia di situs RSPO, meskipun pembangunan konsesi yang jelas tidak memenuhi persyaratan telah dimulai pada tahun 2013 (lihat studi kasus di bawah).

KAITAN DENGAN PASAR

Menurut data perusahaan, Apical,³⁷² Cargill,³⁷³ GAR,³⁷⁴ IOI,³⁷⁵ Musim Mas³⁷⁶ dan Wilmar³⁷⁷ adalah pelanggan dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Salim termasuk Indofood, Gunta Samba dan Gunta Samba Jaya.

Musim Mas menyatakan bahwa mereka 'telah memulai proses pelibatan aktif dan telah dilakukan bulan Juni dan Agustus 2016, antara Kepala Eksekutif Musim Mas dengan manajemen puncak Salim Group'. Salim Group didesak untuk menjalani mekanisme pengaduan RSPO dan bertindak sebagai anggota yang proaktif dalam proses ini, dan terus bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk meninjau situasi dan tindakan-tindakan yang mungkin. Pelibatan aktif ini akan terus berlanjut dan kami akan meninjau langkah-langkah implementasi dan tanggapan-tanggapan.³⁷⁸

AAK menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Salim.³⁷⁹ Astra Agro Lestari tidak mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan dagang apapun dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Salim.

Dalam surel ke Greenpeace bulan September 2016, Wilmar menyatakan bahwa mereka telah melakukan pelibatan secara aktif dengan Indofood untuk menangani masalah-masalah pembebasan lahan sejak bulan September 2015, namun menyatakan bahwa tidak ada pembukaan lahan lebih lanjut oleh perusahaan sejak akhir tahun 2015, menurut 'mitra independen' yang tidak disebutkan namanya. Dalam menanggapi masalah perburuhan, sambil memantau kasus dan ikut terlibat, Wilmar menyatakan bahwa mereka lebih suka membiarkan proses RSPO 'berjalan seperti biasa'.³⁸⁰

Dalam surel ke Greenpeace bulan September 2016, GAR menyatakan bahwa mereka 'telah mulai melakukan pelibatan dengan RAN, OPPUK, dan Indoagri/Lonsum',³⁸¹ dan perusahaan ini telah memperbarui *dashboard* pengaduannya³⁸² dengan kasus ini.

STUDI KASUS: ISUY MAKMUR/KEDANG MAKMUR

Lokasi: Kutai Barat, Kalimantan Timur

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Deforestasi baru-baru ini, termasuk hutan primer
- Pembangunan di lahan gambut
- Kebakaran yang meluas menimbulkan pertanyaan tentang salah kelola.

ANALISIS PEMETAAN

- Pemetaan perkebunan berbasis satelit GFW dari tahun 2013-2014 menunjukkan wilayah yang luas yang dibuka baru-baru di konsesi tersebut dan di luar batas di bagian timur laut, termasuk daerah yang ditampilkan sebagai hutan rawa primer dalam pemetaan tutupan lahan tahun 2013 oleh KLHK.

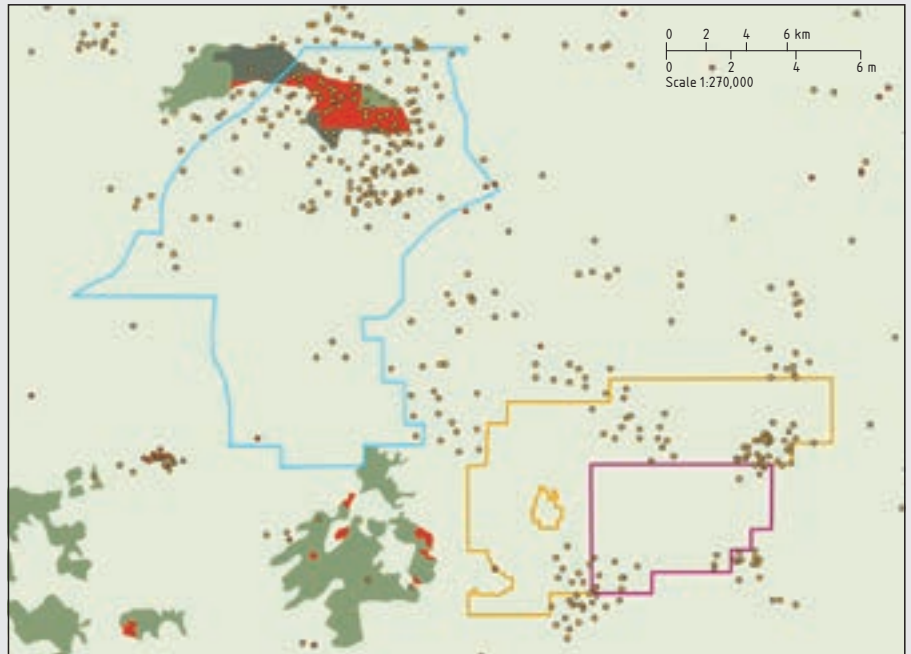
- Konsesi tersebut memiliki lebih dari 100 titik api sepanjang tahun 2015, termasuk di kawasan hutan primer yang telah dibuka.
- Peringatan GLAD menunjukkan pembukaan terus-menerus di konsesi tersebut pada tahun 2016
- Sebagian besar areal konsesi dipetakan sebagai gambut dengan kedalaman yang tidak diketahui.

DEFORESTASI

Sebuah investigasi oleh Aidenvironment di tahun 2015 mendapati bahwa selama tahun 2013 dan 2014, PT Lonsum telah membuka sekitar 1.000 ha lahan di konsesi Isuy Makmur/Kedang Makmur³⁸³ yang sebelumnya ditampilkan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan Kementerian Kehutanan. IndoAgri mengklaim lahan itu sebagai hutan sekunder, tetapi tidak mengungkapkan bukti-bukti untuk mendukung klaim tersebut. Analisis Aidenvironment ini menunjukkan pembukaan total sekitar 4.600 ha hutan berbagai jenis dalam konsesi, serta kebakaran yang merajalela.³⁸⁴ Deforestasi menempatkan perusahaan dalam pelanggaran kebijakan keberlanjutan HSBC.³⁸⁵



- Blok Kebun Isuy Makmur
- Blok Kebun Pahu
- Blok Kebun Kedang Makmur
- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Deforestasi 2011-12
- Deforestasi 2013-15
- Titik Panas Api 2015
- Titik Panas Api 2016



STUDI KASUS: KONSESI-KONSESI PT LONSUM

Lokasi: Sumatra Utara

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Penggunaan pekerja anak dan eksploitasi tenaga kerja

EKSPLOITASI/PENGANIAYAAN TENAGA KERJA DAN PEKERJA ANAK

Sebuah investigasi di tahun 2015 terhadap dua perkebunan PT Lonsum di Sumatera Utara (nama-nama dirahasiakan untuk melindungi pekerja) menemukan bukti-bukti berbagai praktik ketenagakerjaan yang buruk oleh IndoAgri, termasuk pekerja anak, pekerja dibayar di bawah upah minimum regional, pekerja menggunakan pestisida melanggar P&C RSPO dan tanpa menggunakan peralatan keselamatan yang layak, dan sistem kuota yang mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja informal (termasuk pekerja membawa istri dan anak-anak mereka untuk membantu memenuhi kuota).³⁸⁶ Penelitian ini dilaporkan oleh OPPUK, *Rainforest Action Network* (RAN) dan *International Labor Relations Forum* (ILRF). Sejauh ini, IndoAgri menolak mengomentari temuan-temuan dalam laporan tersebut, dan pelanggan hilir mereka enggan untuk terlibat dengan perusahaan dalam hal ini atau untuk mewajibkan perusahaan menyelidiki kondisi tenaga kerja di perkebunan mereka sendiri.

Sebuah Penilaian Kepatuhan RSPO selesai dilakukan di pabrik dan basis pasokan ketiga milik Lonsum di Sumatra Utara untuk mengkaji

masalah-masalah yang diangkat. Kajian terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit Gunung Melayu, dan basis pasokan perkebunan Gunung Melayu dan Sei Rumbiya membenarkan terjadinya pelanggaran terhadap standar kesehatan dan keselamatan, terutama di seputar penggunaan pestisida, termasuk satu pekerja yang terus-menerus diperintahkan untuk melakukan penyemprotan setidaknya selama tiga bulan tanpa mempertimbangkan masalah kesehatan. Kajian tersebut juga menemukan bukti tidak langsung dari penggunaan tenaga kerja informal termasuk anggota keluarga yang ikut memanen, dan diskriminasi gender dalam tunjangan karyawan dan gagal membayar pekerja dengan upah minimum.³⁸⁷

Kebijakan HSBC melarang penyediaan layanan keuangan kepada perusahaan yang terlibat dalam 'eksploitasi atau membahayakan buruh anak atau kerja paksa.'³⁸⁸ P&C RSPO melarang eksploitasi atau mempekerjakan anak dan semua bentuk diskriminasi.³⁸⁹

STUDI KASUS: PT GUNTA SAMBA JAYA

Lokasi: Kutai Timur, Kalimantan Timur

PELANGGARAN KEBIJAKAN

- Pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) (habitat Orangutan)

ANALISIS PEMETAAN

- Peta tutupan lahan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di blok barat daya PT GSJ masih didominasi oleh hutan.
- Pada tahun 2013, peta KLHK menunjukkan setengah dari areal ini telah dibuka.



2013, East Kalimantan:
Pembukaan yang aktif di konsesi
PT Gunta Samba Jaya di Kutai
Timur, Kalimantan Timur.
©COP

- Pada tahun 2015, peta KLHK menunjukkan semua hutan yang tersisa telah dibuka.
- Citra satelit baru-baru ini menunjukkan bahwa hutan yang tersisa di tahun 2015 telah habis dibuka.

Pada bulan Februari 2013 LSM *Centre for Orangutan Protection* mengajukan pengaduan ke RSPO terhadap anak perusahaan Indofood SIMP, menuduh perusahaan merusak habitat Orangutan di konsesi Gunta Samba Jaya.³⁹⁰ Dua bayi Orangutan berhasil diselamatkan yang menurut penduduk setempat yang telah merawat mereka berasal dari areal konsesi. Foto yang menyertai pengaduan tersebut menunjukkan hutan yang berisi sarang Orangutan tengah dibuldozer.

MASALAH IDENTIFIKASI: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERUSAKAN HUTAN YANG DILAKUKAN PT GUNTA SAMBA JAYA?

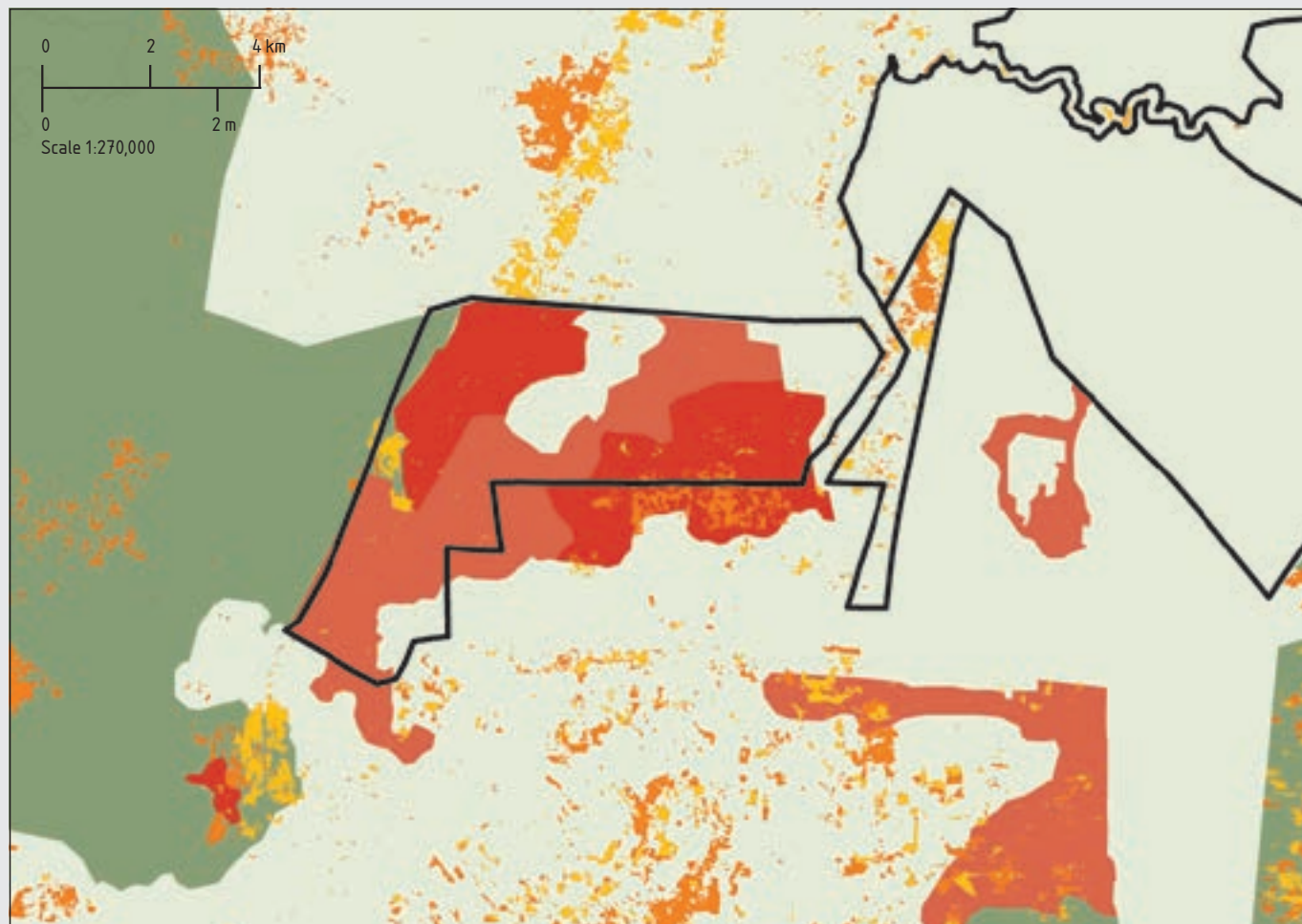
Taipan Indonesia Anthoni Salim mempertahankan kendali dari jaringan perusahaan yang kompleks yang dikenal sebagai Salim Group. Manajemen sebenarnya dari beberapa perusahaan Salim Group sengaja dikaburkan melalui piramida perusahaan dan interaksi buram antara perusahaan publik dan perusahaan swasta. Ini merupakan karakteristik umum dari bisnis Asia yang dijalankan oleh keluarga tunggal atau mogul;³⁹¹ efeknya seringkali untuk memisahkan operasi

destruktif atau kontroversial dari wajah kerajaan bisnis yang lebih dikenal publik. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa standar keberlanjutan tidak diterapkan secara universal.

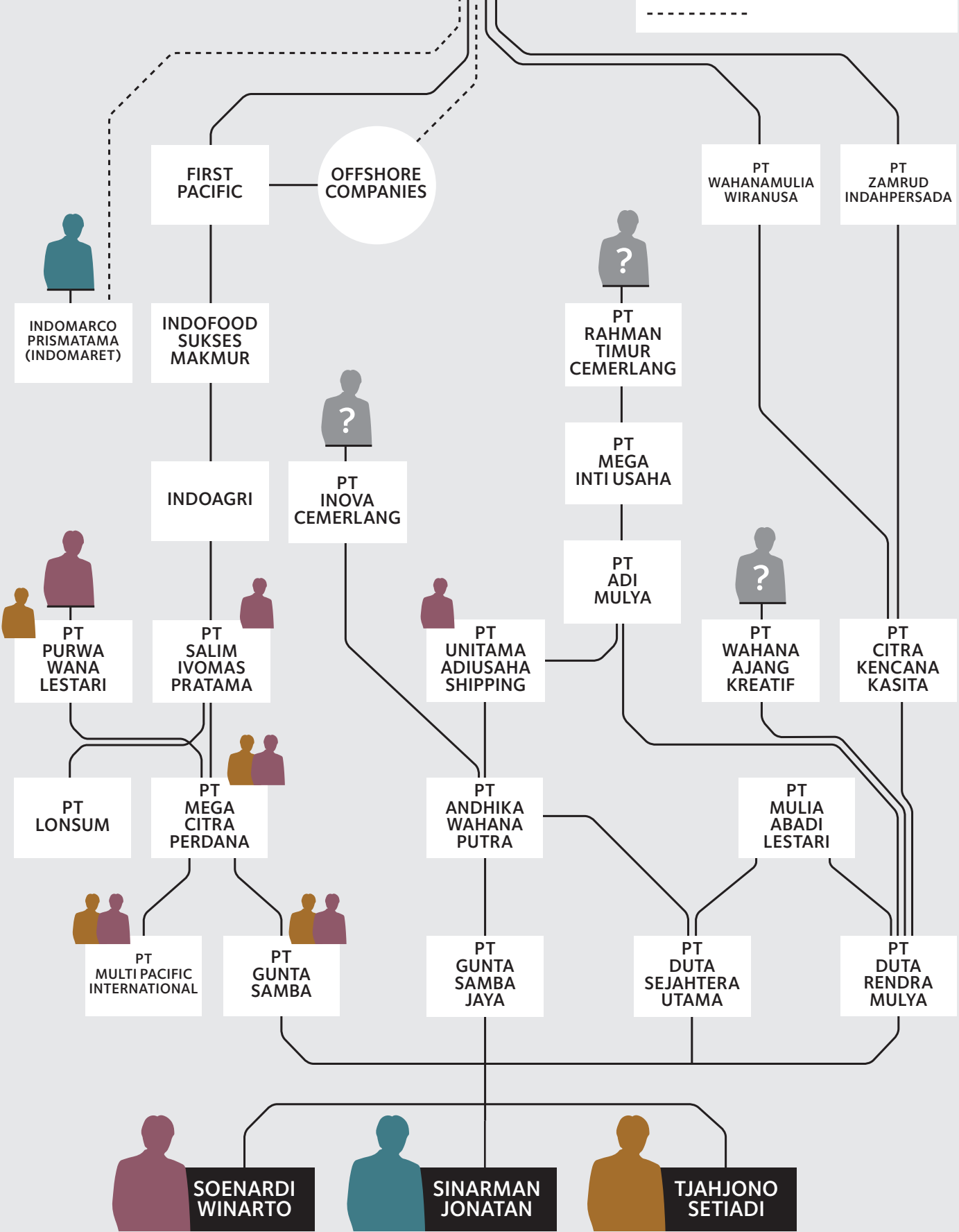
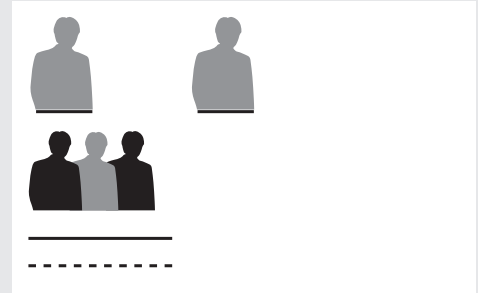
Tantangan bagi pemodal, pedagang dan RSPO adalah untuk menguji sejauh mana hubungan antara perusahaan-perusahaan ini dan IndoAgri untuk menentukan apakah hubungan tersebut cukup kuat sehingga IndoAgri dapat dimintai tanggungjawabnya atas tindakan mereka. Dana Pensiun Global Pemerintah negara Norwegia telah, atas saran dari Dewan Kode Etik-nya, menerima prinsip tanggung jawab tingkat kelompok untuk memastikan Dana tidak memberikan pembiayaan untuk kelompok-kelompok usaha yang operasi perkebunan akan melanggar kebijakan Dana tentang pinjaman yang bertanggung jawab.³⁹² RSPO telah mengambil sikap yang sama di masa lalu, terhadap Bumitama dan GAR (lihat di bawah).

IndoAgri telah menandatangani kebijakan keberlanjutan yang berlaku untuk perkebunannya sendiri dan juga para pemasok ke kilang penyulingannya.³⁹³ Sebagai perusahaan publik, perusahaan memiliki kewajiban terhadap transparansi, termasuk tentang struktur dan kendali kelompok usaha. Sebagai yang mewakili usaha perkebunan Salim Group dan induk perusahaan dua anggota RSPO – Lonsum dan SIMP – IndoAgri memiliki kewajiban untuk memastikan agar seluruh perusahaan dalam Salim Group mematuhi standar-standar keberlanjutan yang sama. Namun, perusahaan-perusahaan perkebunan Salim Group yang beralamat sama dengan anak perusahaan IndoAgri tampaknya tidak memenuhi kriteria keberlanjutan Indofood Agri.

- PT Gunta Samba Jaya
- Hutan Primer
- Hutan Sekunder
- Gambut
- Gambut Berhutan
- Titik Panas Api 2015
- Titik Panas Api 2016
- Deforestasi 2011–12
- Deforestasi 2013–15



MAPPING THE SALIM GROUP



PT Gunta Samba (PT GS) dan PT Gunta Samba Jaya (PT GSJ) masing-masing didirikan pada tahun 2005 dan 2006, dengan pemilik awal yang sama: Sinarman Jonatan Soenardi Winarto.³⁹⁴ Jonatan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur perusahaan Salim Group Indomarco Prismatic. Winarto saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur induk perusahaan PT GS, sekaligus Presiden Direktur PT GS sendiri dan Direktur anak perusahaan IndoAgri (dan anggota RSPO) PT SIMP.³⁹⁵

Kedua perusahaan terdaftar di kantor yang sama: Unit B/22 Kompleks Perkantoran Duta Merlin, Jalan Gajah Mada 3–5, Gambir, Jakarta Pusat.³⁹⁶ Alamat yang sama juga tercantum dalam laporan tahunan SIMP sebagai alamat salah satu anak perusahaannya, PT Mega Citra Perdana, induk dari PT GS dan PT Multi Pacific International.³⁹⁷

Pada tahun 2006 PT GS digabungkan ke dalam IndoAgri melalui Salim Ivomas Pratama (SIMP), bersama perusahaan yang menjadi induk langsungnya, PT Mega Citra Perdana.³⁹⁸ Perusahaan tetap menempati posisi yang sama dalam hirarki perusahaan sejak saat itu, yang berarti bahwa IndoAgri adalah induk perusahaan PT GS.

Adapun tentang PT GSJ, pada tahun 2007 ada suntikan modal dan dewan direksi dan struktur kepemilikan perusahaan berubah. PT Andhika Wahana Putra (PT AWP) menjadi pemilik baru dengan kepemilikan saham sebesar 99,95%, dan struktur pemegang saham tetap sama sejak saat itu.³⁹⁹ PT AWP juga merupakan induk dari perusahaan perkebunan yang diduga milik Grup Salim lainnya termasuk PT Berau Sawit Sejahtera, PT Citra Palma Sejati, PT Duta Sejahtera Utama, PT Perdana Sawit Plantation dan PT Wira Inova Nusantara,⁴⁰⁰ yang masing-masing berbagi manajemen senior dengan PT GSJ atau perusahaan induknya.

PT AWP terdaftar di unit A/48 Kompleks Perkantoran Duta Merlin di Jakarta (unit yang berbeda dari PT GS dan PT GSJ).⁴⁰¹ Kompleks Perkantoran Duta Merlin juga merupakan alamat terdaftar untuk banyak perusahaan yang secara resmi diakui sebagai bagian dari Salim Group, serta banyak perusahaan yang diduga milik Salim Group. Ini termasuk PT Mulia Abadi Lestari, yang memiliki saham di PT Duta Rendra Mulya, PT Duta Sejahtera Utama, PT Sawit Timur Nusantara, PT Subur Karunia Raya dan PT Wahana Tritunggal Cemerlang,⁴⁰² yang masing-masing berbagi manajemen senior dengan PT GSJ atau perusahaan induknya.

Pada tahun 2010 jaringan supermarket Indofood Indomaret menanamkan investasi senilai Rp428 milyar (~US\$ 32 juta) di PT AWP, melalui pembelian obligasi konversi.⁴⁰³

Dua perusahaan masing-masing memiliki 50% dari PT AWP: PT Inova Cemerlang dan PT Unitama Adiusaha Shipping.⁴⁰⁴ Dalam hal perusahaan yang mengendalikan PT AWP, tidak ada informasi lebih lanjut tentang PT Inova Cemerlang ditemukan melalui pencarian internet, dan perusahaan ini juga tidak muncul dalam daftar dalam SISMINBAKUM, registri bisnis pemerintah Indonesia.

PT Unitama Adiusaha Shipping (PT UAS) terdaftar pada unit A/48 Kompleks Perkantoran Duta Merlin di Jakarta (unit yang sama dengan PT AWP).⁴⁰⁵ Satu perusahaan memegang 99,99% dari PT UAS.⁴⁰⁶ PT Adi Mulya (saham 0,01% lainnya dipegang oleh PT Rahmat Timur Cemerlang (PT RTC)). Satu perusahaan memiliki 99,5% dari PT Adi Mulya.⁴⁰⁷ PT Mega Inti Usaha (PT MIU) (saham 0,5% lainnya dipegang oleh PT RTC). Satu perusahaan memiliki 99,99% dari PT MIU.⁴⁰⁸ PT RTC (saham 0,01% lainnya dipegang oleh Andree Hendrawan).

Upaya untuk mengungkap kontrol manajemen utama dan kepemilikan piramida perusahaan ini masih dilakukan pada saat publikasi laporan ini.

Meskipun demikian, kontrol manajemen utama Anthoni Salim dan kepemilikan satu perusahaan terkait – PT Duta Rendra Mulya (PT DRM) – dapat ditetapkan dan melibatkan kontrol manajemen oleh orang-orang yang terkait langsung dengan PT GSJ dan pemilik induk dan anak perusahaan yang disebutkan di sini.

PT DRM dimiliki oleh beberapa perusahaan termasuk PT Adi Mulya dan PT Mulia Abadi Lestari; 50% sahamnya dipegang oleh PT Citra Kencana Kasita.⁴⁰⁹ Dua perusahaan masing-masing memegang 50% saham di PT Citra Kencana Kasita:⁴¹⁰ PT Zamrud Indahpersada dan PT Wahanamulia Wiranusa. Anthoni Salim memegang 99% saham di kedua perusahaan.⁴¹¹

Selain berbagi alamat perusahaan dan investasi di perusahaan perkebunan, telah terjadi tumpang tindih manajemen yang mencolok antara PT GSJ dan induk perusahaannya dan PT GS, SIMP dan kepentingan Indofood lainnya (lihat kotak).

Namun, PT GSJ bukanlah anak perusahaan dari SIMP atau IndoAgri, juga bukan IndoAgri pemegang saham di PT GSJ.

MANAJEMEN BERSAMA ATAU KONTROL PENUH – APAKAH ANTHONI SALIM MENGENDALIKAN PT GUNTA SAMBA JAYA?

Ketika PT GS dan PT GSJ didirikan, mereka memiliki pemilik mula-mula yang sama: Sinarman Jonatan, Tjahjono Setiadi and Soenardi Winarto. Ketiganya telah lama memupuk karir di Salim Group. Saham dibagi secara merata antara dua orang, Soenardi Winarto dan Sinarman Jonatan.



Soenardi Winarto saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT GS maupun anak perusahaan PT Multi Pacific International, serta Presiden Direktur induk perusahaan langsung mereka PT Mega Citra Perdana dan PT Mitra Inti Sejati Plantation. Dia telah menjabat sebagai Direktur PT SIMP sejak tahun 2008 dan PT Kayu Lapis Asli Murni sejak tahun 1996.⁴¹²



Sinarman Jonatan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Indomarco Prisma, perusahaan yang mengoperasikan jaringan minimarket Salim Group Indomaret.⁴¹³

Direksi dan Komisaris PT GSJ saat ini termasuk orang-orang berikut, sebagian terkait perusahaan perkebunan yang diduga milik Salim Group (seluruh data berasal dari akta-akta perusahaan kecuali dinyatakan lain dalam catatan kaki):

Gunawan Sumantri (Presiden Direktur)

Juli 2007 – sekarang – mantan Presiden Direktur PT AWP dan PT DRM. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Berau Sawit Sejahtera, PT Citra Palma Sejati, PT Duta Sejahtera Utama, PT Perdana Sawit Plantation, PT Subur Karunia Raya, PT Wahana Tritunggal Cemerlang dan PT Wira Inova Nusantara.

Fransiskus Xaverius Purwanto (Direktur)

Juli 2007 – sekarang – mantan Direktur PT AWP, PT Berau Sawit Sejahtera dan PT Wira Inova Nusantara, dan juga telah mewakili PT Sawit Khatulistiwa Lestari.⁴¹⁴ Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Menara Wasior dan PT DRM. Kemungkinan juga Komisaris PT Adi Mulya dan PT Mega Inti Usaha (sang Komisaris disebut sebagai 'Hermanto Boentoro, juga dikenal sebagai Fransiscus Xaverius').⁴¹⁵

Nyoman Suryadhi (Presiden Komisaris)

Juli 2007 – sekarang – mantan Presiden Komisaris PT Berau Sawit Sejahtera, PT Perdana Sawit Plantation dan PT Wira Inova Nusantara, mantan Komisaris PT Perdana Sawit Plantation dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT AWP.

Junus Sutiono (Komisaris) Juli 2007 –

sekarang – Komisaris PT AWP, PT Berau Sawit Sejahtera, PT Citra Palma Sejati, PT Mulia Abadi Lestari (di mana ia memegang 60% saham), PT Perdana Sawit Plantation, PT Putra Palma Cemerlang, PT Sawit Timur Nusantara, PT Wahana Tritunggal Cemerlang dan PT Wira Inova Nusantara.

Bukti lebih lanjut dari hubungan operasional berasal dari referensi ke 'Gunta Samba Group' dan 'Indo Gunta Group' yang ditemukan di internet. Sebuah blog yang mengaku berasal dari Tim Audit Agronomi dan Tim Penasihat di Gunta Samba Group menyediakan daftar perusahaan yang mereka audit pada tahun 2013, yang mencakup anak perusahaan SIMP PT GS dan PT Multi Pacific International serta PT GSJ dan perusahaan-perusahaan terkait, termasuk PT Berau Sawit Sejahtera, PT Citra Palma Sejati, PT Duta Rendra Mulya, PT Duta Sejahtera Utama, PT Perdana Sawit Plantation, PT Wahana Tritunggal Cemerlang dan PT Wira Inova Nusantara.⁴¹⁶

Pada bulan Agustus 2015, iklan lowongan kerja yang beredar untuk posisi di Provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat pada kertas berkop PT GS, mengacu pada Indo Gunta Group.⁴¹⁷ Namun, PT GS merupakan anak perusahaan SIMP, dan tidak diketahui ada anak perusahaan SIMP di Papua Barat. Di sisi lain, perkebunan seperti PT Subur Karunia Raya di Papua Barat memiliki hubungan dengan manajemen senior PT GSJ dan induk perusahaannya.

Naik ke stuktur atas organisasi, PT UAS dilaporkan diakuisisi oleh Holdiko Perkasa pada tahun 2002 ketika Salim Group bangkrut, bersama dengan saham di perusahaan Salim Group lainnya (PT Kayu Lapis Asli Murni, PT Melapi Timber dan PT Duta Rendra Mulya).⁴¹⁸ Akta perusahaan saat ini mencatat informasi dari tahun 2004. Ini semua menunjukkan bahwa Anthoni Salim menjabat sebagai Presiden Direktur sampai tahun 2007, di mana pada saat ini posisinya diteruskan ke Soenardi Winarto, yang telah menjabat sejak tahun 2008. Hal ini bertepatan dengan pengalihan kepemilikan PT GSJ ke PT AWP dan suntikan modal ke PT AWP dari Indomaret.

Pada tahun 2017, ketika PT UAS/PT AWP mengakuisisi PT GSJ, jajaran Direksi dan Komisaris PT UAS mencakup orang-orang berikut yang terkait perusahaan-perusahaan yang diduga milik Salim Group:

Benny Setiawan Santoso (Komisaris) – mantan Presiden Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk; saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sejak tahun 2004) dan Direktur Non-Eksekutif First Pacific, di antara kepentingan lain terkait kelompok usaha⁴¹⁹

Sinarman Jonatan (Direktur) – lihat PT GSJ di atas untuk kaitannya

Soenardi Winarto (Direktur) – lihat PT GSJ di atas untuk kaitannya

Andree Halim (Presiden Komisaris) – kakak Anthoni Salim

Selain Soenardi Winarto, Direktur PT UAS saat ini dan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang diduga milik Salim Group adalah sebagai berikut:

Dedi Mulyadi (Direktur) – Mantan Presiden Direktur dan pemegang saham PT Perdana Sawit Plantation dan PT Wahana Tritunggal Cemerlang (di mana saat ini ia memegang 0,1% saham), saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Duta Sejahtera Utama dan PT Subur Karunia Raya, mantan Komisaris dan pemegang 20% saham di PT Bumi Surya Kencana, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mulia Abadi Lestari dan PT Sawit Timur Nusantara (di mana ia memegang 2,5% saham)

Junus Sutiono (Komisaris) – lihat PT GSJ di atas untuk kaitannya

Jajaran Direksi PT Adi Mulya dan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang diduga milik Salim Group adalah sebagai berikut

Andree Hendrawan (Direktur) – Mantan Komisaris dan Direktur PT Berau Sawit Sejahtera saat ini; mantan Komisaris PT Wira Inova Nusantara; saat ini menjabat sebagai Direktur PT Citra Palma Sejati, PT Duta Sejahtera Utama dan PT Wahana Tritunggal Cemerlang; mantan Direktur PT Perdana Sawit Plantation, saat ini menjabat sebagai Direktur PT MIU. Menurut profilnya di LinkedIn,⁴²⁰ ia telah menjadi seorang manajer di PT GS sejak tahun 2005.

Hermanto Boentoro, aka Fransiscus Xaverius (Komisaris) – lihat PT GSJ di atas untuk dugaan keterkaitannya

Jajaran Direksi PT MIU dan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang diduga milik Salim Group adalah sebagai berikut:

Andree Hendrawan (Direktur) – lihat PT Adi Mulya di atas

Hermanto Boentoro, alias **Fransiscus Xaverius** (Komisaris) – lihat PT Adi Mulya dan PT GSJ di atas

Akta-akta perusahaan mencantumkan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT DRM asli sebagai Sinarman Jonatan dan Sunardi Winarto [sic]. Jajaran Direksi saat ini dan hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang diduga milik Salim Group mencakup:

FX Purwanto (Direktur) – lihat PT GSJ dan perusahaan-perusahaan lain di atas

Gunawan Sumantri (Presiden Direktur) – lihat PT GSJ di atas

Jajaran administrasi PT Citra Kencana Kasita saat ini dan kaitan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Anthoni Salim (Komisaris) – pemilik dan Direktur PT Zamrud Indahpersada, dan pemilik serta Komisaris PT Wahanamulia Wiranusa; mantan Presiden Direktur PT UAS.

Phiong Phillipus Darma (Direktur) – Komisaris PT Zamrud Indahpersada dan Direktur PT Wahanamulia Wiranusa; memiliki sedikit saham di kedua perusahaan tersebut. Ia digambarkan oleh Bloomberg sebagai 'Eksekutif Senior dari perusahaan-perusahaan Salim Group'.⁴²¹ Pada tahun 2010,⁴²² Darma menurut laporan dicantumkan pada 'daftar merah' buronan Interpol karena memalsukan dokumen dan mentransfer aset sitaan keluar dari Indonesia.



11 Januari 2017, Nyaru Menteng:
Ranels, seekor Orangutan betina
berumur 15 tahun memanjat pohon di
pulau Kaja, bagian dari wilayah Borneo
Orangutan Survival (BOS) Foundation.
©VAUGHN/BOSF/GREENPEACE

Pada bulan Februari 2013, ketika *Centre for Orangutan Protection* mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO setelah menemukan bukti-bukti bahwa PT GSJ membuka habitat orangutan di dalam konsesinya (lihat di atas), LSM ini beranggapan bahwa PT GSJ adalah anak perusahaan dari SIMP.⁴²³ Tidak ada tindakan lebih lanjut dari RSPO setelah surel dari CEO IndoAgri Mark Wakeford tanggal 21 Juni 2013 menyangkal tanggung jawab untuk menyelesaikan pengaduan tersebut atas dasar bahwa '[IndoAgri] tidak memiliki saham apapun di PT Gunta Samba Jaya dan perusahaan tersebut bukan bagian dari IndoAgri atau SIMP Group.'⁴²⁴

Namun, baik lacak kasus pengaduan RSPO maupun Mongabay Indonesia telah mencatat bahwa sebelum ini, pada tanggal 19 Maret 2013, IndoAgri telah bertemu dengan *Centre for Orangutan Protection* dan sepakat untuk mengambil tindakan untuk menangani masalah ini, termasuk menyerukan penangguhan pembukaan lahan dan evaluasi terhadap daerah-daerah konservasi.⁴²⁵

Meskipun namanya sama dan beroperasi di konsesi yang bersebelahan, tidak seperti PT GS, PT GSJ tidak muncul sebagai anak perusahaan langsung dari IndoAgri atau SIMP; namun, perusahaan itu jelas dikelola oleh manajemen Salim Group. Semua perusahaan Salim Group harus berpegang pada standar yang sama.

Kasus ini sangat mirip dengan kasus Bumitama, di mana pada tahun 2013 RSPO meminta agar keanggotaan salah satu anak perusahaan tersebut dialihkan ke kelompok induk dengan alasan bahwa 'Panel Pengaduan khawatir bahwa masyarakat umum tidak akan bisa membedakan antara anggota RSPO dan bukan anggota RSPO dalam kelompok usaha Bumitama.'⁴²⁶

Kasus ini juga mirip dengan kasus Golden Agri-Resources, di mana pada 2010, setelah dilakukan verifikasi independen oleh BSI Group terhadap investigasi Greenpeace,⁴²⁷ RSPO menangguhkan keanggotaan anak perusahaan GAR PT SMART mengingat '[keprihatinan] tentang kebingungan dalam benak masyarakat seputar klaim yang dibuat oleh induk perusahaan PT SMART Golden Agri Resources Ltd mengenai keanggotaan RSPO dari dua anak perusahaannya dan apa implikasinya terhadap keberlanjutan GAR secara keseluruhan', menyatakan bahwa 'RSPO mengajak agar masalah ini diselesaikan dengan GAR menjadi anggota RSPO.'⁴²⁸

IndoAgri anak PT Lonsum sudah menjadi subjek pengaduan RSPO atas pelanggaran hak asasi manusia (lihat studi kasus). Status resmi pengaduan RSPO terhadap PT GSJ adalah 'belum diselesaikan'.⁴²⁹

Mengingat tindakan-tindakan sebelumnya dengan perusahaan perkebunan lainnya, termasuk keputusannya untuk menangguhkan operasi PT SMART di tempat lain dalam kelompok usahanya, dan usaha yang jelas disengaja untuk menyesatkan RSPO tentang sejauh mana kontrol SIMP atas PT GSJ, RSPO tidak memiliki pilihan lain: jika RSPO tidak ingin menghadapi tuduhan melemahkan prinsip-prinsipnya, RSPO harus mengikuti preseden dan menskors semua anak perusahaan Indofood yang menjadi anggotanya sampai saat seluruh Salim Group telah bergabung dengan RSPO.

RINGKASAN

Baik PT GS maupun PT GSJ awalnya dimiliki oleh orang-orang yang berhubungan erat dengan Salim Group. Namun, sejak PT GS disatukan ke dalam SIMP dan kepemilikan PT GSJ dialihkan ke PT AWP, struktur kepemilikan dan dewan direksi dari kedua perusahaan ini menjadi berbeda.

- PT AWP (induk langsung PT GSJ) dimiliki oleh dua perusahaan, PT Inova Cemerlang dan PT Unitama Adiusaha Shipping. Yang disebut terakhir saat ini dikelola oleh Soenardi Winarto, yang saat menjabat sebagai Presiden Direktur PT GS, anak perusahaannya PT Multi Pacific International dan induk perusahaan langsungnya PT Mega Citra Perdana, dan telah menjabat sebagai Direktur PT SIMP sejak tahun 2008. tampaknya memiliki hubungan sejak lama dengan Salim Group. Jaringan supermarket Indofood Indomaret juga telah menanam investasi di PT Andhika Wahana Putra.
- Andree Hendrawan adalah Direktur senior dari banyak perusahaan yang berkaitan dengan PT GSJ. Ia juga mengklaim menjabat sebagai salah satu manajer di PT GS.
- Meskipun kepemilikan resminya berbeda, PT GS dan PT GSJ memiliki manajemen operasional yang sama: tim audit agronomi yang sama, huruf-huruf pada kertas PT GS yang mengiklankan posisi di perusahaannya di Papua, memiliki hubungan lebih erat dengan PT GSJ, dan tanggapan awal Indofood Agri terhadap pengaduan RSPO terhadap PT GSJ.
- Terakhir, satu perusahaan yang berkaitan dengan PT GSJ – PT DRM – diketahui dikendalikan oleh Anthoni Salim.

Secara bersama-sama, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Anthoni Salim telah dengan sengaja menyusun struktur usaha-usahanya dengan cara yang mengaburkan kepemilikan dan tanggung jawab. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut akan membawa keuntungan pajak, serta menyulitkan untuk memastikan adanya komitmen keberlanjutan secara seragam di seluruh kerajaan bisnis yang berada di bawah kendali Salim. Salah satu keuntungan pemasaran yang jelas dari pemisahan anak-anak perusahaan resmi dan perusahaan-perusahaan yang tersembunyi namun berkaitan dengan Salim Group adalah itu akan menjadikan merek Indofood tetap terlihat bersih sementara aspek-aspek kotor dari bisnisnya berlangsung di tempat jauh.

PERNYATAAN

PERUSAHAAN PRODUSEN

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace telah menghubungi Indofood untuk meminta konfirmasi atas pembiayaan dari HSBC dan bank-bank lain dan untuk memverifikasi temuan-temuan dalam laporan ini tentang deforestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang akan melanggar kebijakan HSBC. Perusahaan tidak memberi jawaban.

BANK

Pada bulan Januari 2017, Greenpeace menulis kepada HSBC untuk meminta konfirmasi atas hubungan keuangan dengan Salim Group dan menanyakan tindakan apa yang telah diambil dalam menanggapi pelanggaran kebijakan yang telah diidentifikasi. HSBC mengatakan 'kerahasiaan klien membatasi kami untuk memberikan tanggapan atas hubungan-hubungan yang spesifik.'⁴³⁰

A photograph of a mangrove forest. In the foreground, there is a large, messy pile of cut branches, twigs, and debris, suggesting a recent clearing or logging activity. The background shows several tall, slender mangrove trees with dense green foliage. The sky is visible through the canopy, appearing overcast. The overall scene conveys a message about the impact of deforestation on the banking sector.

IMPLIKASI BAGI SEKTOR PERBANKAN

*'Bagi produsen, menghancurkan valuasi karena salah dalam menangani risiko reputasi ESG [lingkungan, sosial dan tata kelola] merupakan suatu hasil yang akan semakin diupayakan untuk dihindari.'*⁴³⁶

*'Perusahaan harus mengungkapkan struktur pengawasan dari fungsi keberlanjutan – idealnya ini adalah manajemen paling atas, yaitu tingkat dewan.'*⁴³⁷

– HSBC Global Research



PERUSAKAN HUTAN – BISNIS YANG BERISIKO

Selain risiko lingkungan, dampak kelapa sawit pada hutan, lahan gambut dan masalah-masalah sosial menimbulkan berbagai risiko material secara finansial, yang selanjutnya dapat mempengaruhi para investor dan pemberi pinjaman. Sebuah laporan tahun 2015 yang diterbitkan Program Lingkungan PBB (UNEP) mengidentifikasi beberapa jenis risiko, termasuk:⁴³¹

- **Hukum:** pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan, seperti yang terlihat dalam beberapa tuntutan hukum baru-baru ini kepada perusahaan perkebunan Indonesia atas keterlibatan mereka dalam kebakaran lahan gambut.⁴³²
- **Regulasi:** potensi dampak dari rencana Indonesia untuk meninjau konsesi kelapa sawit di kawasan hutan.⁴³³
- **Reputasi:** dengan menjadi target kampanye LSM mengenai dampak sosial dan lingkungan, yang dengan sangat cepat bisa membuat perusahaan kehilangan kliennya (seperti yang dapat dilihat setelah penangguhan IOI dari RSPO di bulan Maret 2016).⁴³⁴
- **Pasar:** perubahan dalam permintaan konsumen untuk menghindari produk yang membawa dampak negatif
- Risiko biofisik atau lingkungan yang berujung pada **penurunan hasil perkebunan:** misalnya dari banjir yang melanda perkebunan akibat penurunan permukaan lahan gambut.⁴³⁵

Ini semua akhirnya mengakibatkan risiko keuangan akibat turunnya hasil perkebunan, naiknya biaya dan masalah-masalah reputasi atau pasar berdampak pada penjualan. Hilangnya nilai pasar dapat membuat perusahaan tidak mampu membayar utang, sementara perubahan regulasi dan permintaan bisa menyisakan bank dengan aset-aset yang kehilangan nilai, seperti konsesi-konsesi yang pembangunannya tidak lagi mendapat izin.

Risiko-risiko ini tidak hanya mempengaruhi produsen minyak sawit namun juga memiliki dampak tidak langsung pada klien mereka di sepanjang rantai pasok, para pemegang saham mereka, dan organisasi keuangan yang menyediakan pinjaman dan layanan perbankan kepada mereka.

Dalam kaitannya dengan sektor perbankan, risiko-risiko ini berlaku tidak hanya untuk pendanaan langsung bagi produsen minyak sawit, namun juga pada penyediaan layanan untuk kelompok-kelompok usaha besar yang mencakup anak perusahaan penghasil minyak sawit. Dalam banyak kasus, produsen minyak sawit merupakan bagian dari kelompok usaha yang kompleks termasuk usaha-usaha yang jauh dari perkebunan kelapa sawit. Sebagian dari hubungan bank dengan produsen minyak sawit yang dibahas dalam laporan ini adalah hubungan langsung, sementara yang lainnya berkaitan dengan pendanaan kepada induk perusahaan dari konglomerasi atau kepada cabang-cabang lain dari kelompok usaha yang mencakup kepentingan kelapa sawit.

Risiko bahkan mungkin bisa melampaui kelompok-kelompok usaha yang didanai. Struktur kepemilikan kelompok usaha kadang-kadang dirancang untuk menyamarkan atau menghindari tanggung jawab, menggunakan jaringan yang kompleks dari perusahaan lepas pantai (*off-shore holding*) dan *trust company*, yang sebagian berbasis di suaka pajak (*tax-haven*). Kelompok-kelompok usaha ini seringkali secara efektif berada di bawah kendali seorang individu atau anggota keluarga, yang merupakan pemegang saham terbesar atau mayoritas. Bahkan apabila kelompok usaha utama sudah terdaftar

sebagai perusahaan publik, sudah lazim bagi keluarga-keluarga tersebut untuk memiliki saham mayoritas di perusahaan dengan kepemilikan terbatas (*privately-held*) lainnya, yang secara legal terpisah. Pengaturan-pengaturan seperti itu memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai kelompok usaha dan anak perusahaan publik dan perusahaan dengan kepemilikan terbatas yang berada di bawah kendali mereka untuk keuntungan mereka sendiri dengan cara-cara yang mungkin sulit untuk ditelusuri orang luar. Hal ini dapat berarti bahwa seorang pemimpin usaha atau keluarga mengendalikan perusahaan publik yang telah berkomitmen pada transparansi dan praktik-praktik berkelanjutan, sementara juga berkaitan dengan bisnis lain yang terus merusak hutan atau mengeringkan lahan gambut. Pembukaan informasi tentang hubungan-hubungan tersebut membawa risiko reputasi dan risiko pasar bagi penyedia jasa dan koneksi rantai pasok dari kelompok usaha publik.

BEBERAPA JASA YANG DISEDIAKAN BANK

Laporan ini membicarakan layanan perbankan yang diberikan kepada perusahaan, khususnya pinjaman dan penjaminan (*underwriting*). Layanan ini melampaui pembiayaan untuk proyek-proyek tertentu, yang dicakup oleh Prinsip Ekuator,⁴³⁸ dan sangat penting bagi pergerakan roda perusahaan. Layanan-layanan ini terpisah dari kegiatan investasi (misalnya pembelian saham dan obligasi) yang tidak eksklusif hanya untuk perbankan saja.

PINJAMAN

Seringkali cara termudah bagi perusahaan untuk menggalang uang adalah dengan meminjam dari bank. Biasanya pinjaman berasal dari bank-bank komersial swasta. Perusahaan utamanya menggunakan pinjaman jangka pendek (kurang dari satu tahun) untuk membantu pembiayaan sehari-hari usahanya. Pinjaman jangka panjang lebih mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan investasi.

BERBAGAI KREDIT

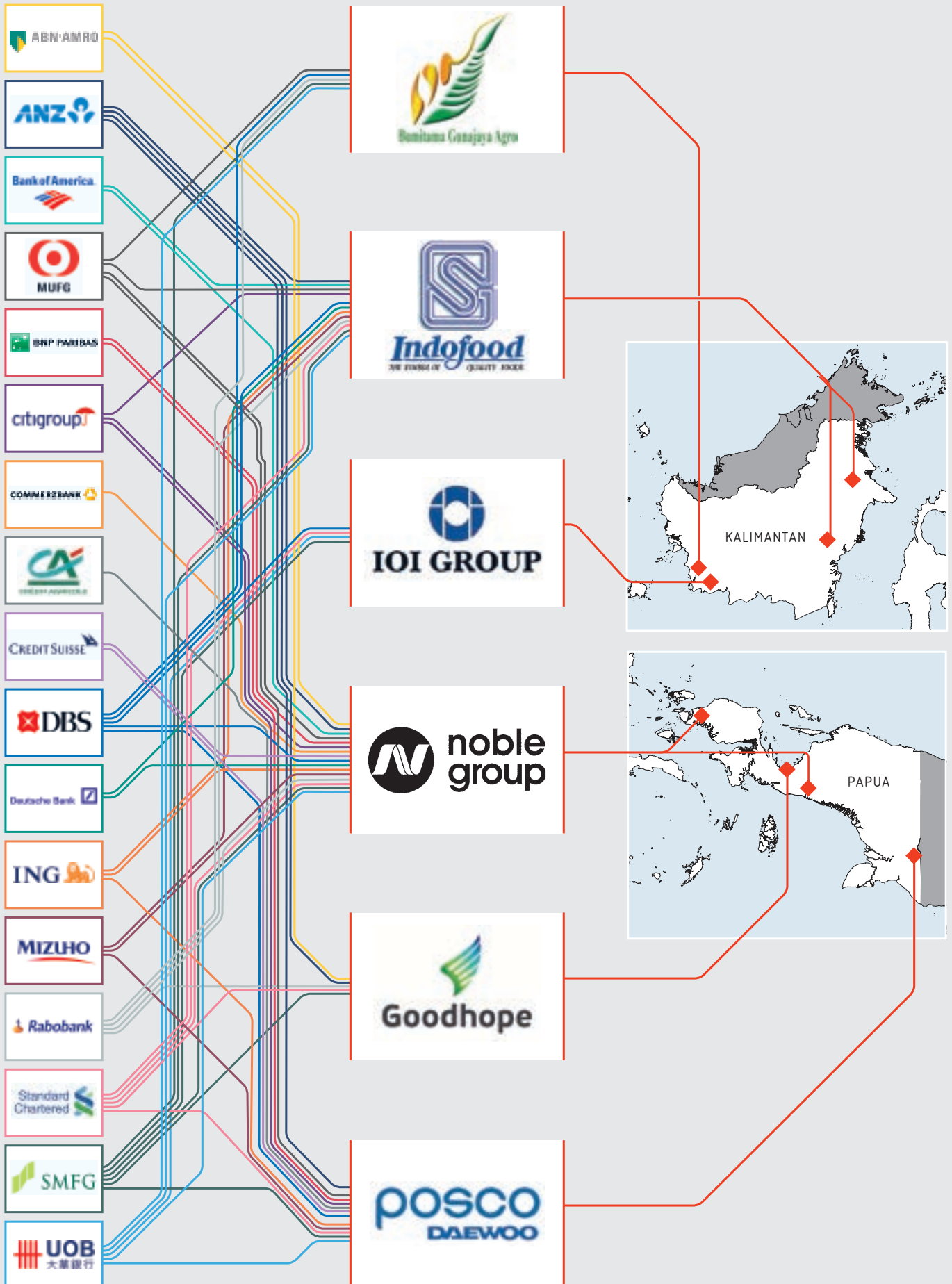
Kredit adalah suatu pengaturan pinjaman fleksibel yang memungkinkan klien untuk meminjam sejumlah uang tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenisnya termasuk kredit bergulir, di mana batas maksimum kredit diperbarui sama seperti cara kerja kartu kredit, dan kredit tidak bergulir, di mana batas maksimum kredit tidak dapat diperbarui.

PENJAMINAN

Perusahaan dapat meningkatkan modal untuk meluaskan usahanya melalui penerbitan saham atau obligasi baru kepada investor melalui pasar keuangan. Bank-bank investasi memainkan peran penting dalam proses ini sebagai penjamin emisi (*underwriters*). Biasanya beberapa bank menjamin penerbitan saham-saham atau obligasi baru secara bersama-sama. Sebagai biaya atau komisi, mereka mengatur penjualan, menyarankan harga saham atau obligasi baru dan mengadakan acara untuk menarik calon investor. Biasanya mereka juga memberikan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan uang bahkan meskipun penjualan tidak berhasil. Istilah 'jaminan (*underwriting*)' mengacu pada elemen proses ini. Ini mungkin berarti bank membeli saham atau obligasi yang tidak terjual pada harga tertentu. Dalam kasus lain, penjamin emisi membeli semua saham atau obligasi baru yang diterbitkan dengan tujuan untuk segera menjualnya ke investor lain. Penjamin emisi menanggung konsekuensi keuangan jika salah perhitungan dan tidak dapat menemukan cukup investor.



BANK LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STUDI KASUS PERUSAHAAN



PERSYARATAN KEBIJAKAN BANK UNTUK PELANGGAN SEKTOR KELAPA SAWIT

Akan diidentifikasi sebagaimana yang permintaan, kebijakan mengandung bahasa yang jelas bahwa bank hanya akan menyediakan layanan keuangan jika kriteria ini terpenuhi, atau layanan akan ditolak jika tidak terpenuhi. Pernyataan yang digunakan pada bahasa yang kurang jelas tidak diperhitungkan.

STATUS KEBIJAKAN DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN	ANGGOTA RSP0?	KEBIJAKAN MINYAK SAWIT SAAT INI?	ZERO DEFORESTATION	NOL GAMBUT	NOL EKSPLOITASI	NOL BAKAR	PADIATAPA	NILAI KONSERVASI TINGGI (HCV)	STOK KARBON TINGGI (HCS)	RANTAI PASOKAN DAPAT DILACAK?
ABN AMRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (tapi bukan persyaratan minimum)
ANZ	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
BANK OF AMERICA	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓ (hanya di hutan primer atau NKT)	✓	✗	✗
BANK OF TOKYO- MITSUBISHI	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BNP PARIBAS	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
CITIGROUP	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓ (pasar yang tengah berkembang saja)	✗	✗	✗
COMMERZBANK	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CRÉDIT AGRICOLE	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
CREDIT SUISSE	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
DBS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DEUTSCHE BANK	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
HSBC	✓	✓ (applies to traders & refiners 'where possible')	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ING	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
MIZUHO BANK	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
RABOBANK	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓ (untuk bukan anggota RSP0)	✓	✗	✗
STANDARD CHARTERED	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
SUMITOMO MITSUI	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
UOB	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

KETERLIBATAN BANK-BANK LAIN DENGAN MINYAK SAWIT

Laporan ini berfokus pada HSBC sebagai salah satu penyandang dana terbesar sektor kelapa sawit, namun tidak berarti bahwa HSBC merupakan satu-satunya bank yang terkait dengan perusahaan kelapa sawit yang merusak. Memang, HSBC relatif progresif: mereka memiliki kebijakan tentang keberlanjutan minyak sawit dan telah menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dengan para kritikus. Seandainya HSBC mengadopsi dan menerapkan kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi' secara bermakna, maka mereka sebaiknya diposisikan untuk memimpin bank lain dalam hal keberlanjutan minyak sawit dan menggunakan pengaruhnya dengan industri kelapa sawit dan perbankan untuk meningkatkan standar-standar di sektor ini.

Kebijakan dan tindakan bank-bank lain juga problematis. Meskipun sebagian besar bank tidak memiliki keterkaitan dengan sektor minyak kelapa sawit sebesar HSBC, banyak bank memiliki hubungan dengan penanam kelapa sawit yang terlibat dalam eksploitasi pekerja dan penduduk setempat, deforestasi dan pengembangan lahan gambut (lihat tabel). Banyak bank bahkan tidak cukup memiliki kebijakan tertulis tentang deforestasi dan eksploitasi. Bank-bank yang memiliki kebijakan hampir selalu hanya mempertimbangkan pembiayaan proyek tertentu dan tidak menetapkan tanggung jawab atas praktik yang buruk kepada perusahaan di balik proyek-proyek tersebut. Kelemahan umum lainnya adalah menyiapkan ambisi untuk klien-klien mereka, bukannya persyaratan-persyaratan yang jelas apa yang klien harus dan tidak boleh lakukan untuk memenuhi kebijakan-kebijakan mereka. Penelitian terbaru untuk peringkat Forest 500 menunjukkan bahwa kurang dari seperlima (18%) dari 150 lembaga keuangan yang dinilai memiliki kebijakan untuk melindungi hutan utuh, HCV atau hutan alam.⁴³⁹ Hanya satu bank yang disurvei Greenpeace – ABN AMRO – memiliki sesuatu yang nyaris sama dengan kebijakan NDPE,⁴⁴⁰ namun ini bahkan belum diimplemetasikan dengan benar. ABN AMRO adalah pemberi pinjaman sebesar US\$1 milyar kepada Noble, yang ditandatangani di bulan Mei 2016.⁴⁴¹

Sektor perbankan masih menghadapi jalan panjang untuk menangani keberlanjutan dan eksploitasi: hal ini tidak hanya membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan koheren, namun juga implementasi dan transparansi di seluruh operasi kelompok usaha.

MODEL UNTUK PERBANKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

BANK DAPAT MENDORONG TRANSPARANSI

Beberapa bank terlibat dalam keberlanjutan, tetapi mereka masih belum menggunakan potensi kuasa mereka sepenuhnya untuk membantu membersihkan industri ini. Lembaga-lembaga keuangan yang bernaung di bawah RSPO, termasuk HSBC,⁴⁴² baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam organisasi tersebut:

Lembaga Keuangan tergantung pada transparansi, akses ke informasi dan data berkualitas tinggi dalam rangka untuk memastikan uji tuntas yang benar untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan mereka. Secara khusus, ketika mempertimbangkan komoditas pertanian dan khususnya sektor minyak sawit, adalah penting agar peta-peta konsesi yang berkaitan dengan produksi minyak sawit tersedia untuk umum. [...] Transparansi melalui pengungkapan peta-peta konsesi membantu menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti deforestasi, pembangunan tidak bertanggung jawab di lahan gambut, dan insiden kebakaran ditangani, dipantau, dan dikaitkan dengan pemilik tanah yang benar. Dengan memberikan informasi tersebut dan menjadikannya tersedia bagi publik [sic] untuk diulas dan dianalisis oleh rekan sejawat, penanam yang menjadi anggota RSPO dapat membuktikan bahwa mereka telah mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria RSPO.⁴⁴³

Langkah-langkah seperti itu oleh sektor keuangan sebagai badan untuk meningkatkan transparansi RSPO pasti akan disambut baik. Sektor ini berada dalam posisi untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendesak peningkatan standar RSPO untuk memasukkan kebijakan NDPE.

Secara lebih langsung lagi, bank dapat memimpin transparansi dengan mengungkapkan transaksi-transaksi mereka sendiri: mempublikasikan perusahaan-perusahaan mana yang mereka layani dan apa layanan yang mereka berikan, termasuk ke perusahaan kepemilikan terbatas (*privately-held*) yang seringkali memanfaatkan kerahasiaan untuk menghindari pengawasan oleh para pemangku kepentingan.

PRINSIP-PRINSIP UNTUK PERBANKAN, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Banyak pedagang dan perusahaan konsumen telah mengembangkan praktik-praktik kerja yang berkenaan dengan transparansi, kebijakan NDPE yang kuat, dan menolak untuk melakukan bisnis lebih lanjut dengan pemasok yang gagal mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut sampai ada bukti nyata adanya perbaikan dalam operasi mereka. Prinsip-prinsip ini juga secara langsung berkaitan dengan sektor keuangan dan harus diterapkan oleh setiap bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sektor kelapa sawit.

Meskipun laporan ini memaparkan permasalahan seputar pembiayaan kelompok usaha minyak sawit, prinsip-prinsip yang terlibat di dalamnya memiliki implikasi untuk sektor pertanian lain dan

organisasi-organisasi yang mungkin terlibat dalam deforestasi.

Bank-bank yang memberikan pinjaman atau jasa keuangan lainnya di mana titik pengaruh terbesar atas kelompok usaha minyak sawit adalah sebelum menyetujui penyediaan atau perpanjangan fasilitas kredit atau jasa keuangan lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip pokok berikut:

1. Mengungkapkan rincian dari semua pembiayaan dan jasa keuangan kepada perusahaan kelapa sawit atau kelompok usaha yang memiliki anak perusahaan kelapa sawit
2. Berkomitmen pada kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi.
3. Bekerjasama dengan klien yang sudah ada untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan ini dalam jangka waktu tertentu, menolak untuk membiayai kembali atau memperbarui layanan lain sampai mereka mematuhi.
4. Menolak pembiayaan kembali atau memberikan jasa lainnya a kepada klien potensial yang tidak mematuhi kebijakan NDPE.

Investor kelembagaan memiliki kesempatan terus-menerus untuk bekerjasama dengan perusahaan penerima investasi mengenai strategi dan perilaku perusahaan dalam rangka untuk mengevaluasi mitigasi risiko dan manajemen korporat. Dengan demikian, investor kelembagaan yang saat ini memiliki saham dalam perusahaan-perusahaan bersangkutan harus mengadopsi prinsip-prinsip inti berikut:

Mengungkapkan rincian seluruh ekuitas dan kepemilikan pendapatan tetap di perusahaan kelapa sawit atau kelompok usaha yang memiliki anak perusahaan kelapa sawit

1. Berkomitmen pada kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi untuk investasi baru.
2. Bekerjasama dengan perusahaan portofolio yang ada untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan ini dalam jangka waktu tertentu.
3. Divestasi dari perusahaan yang gagal mematuhi kebijakan ini.

ELEMEN-ELEMEN POKOK DARI KEBIJAKAN NDPE

Berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan yang diuraikan di atas, bank harus menyertakan unsur-unsur berikut dalam kebijakan NDPE mereka. Meskipun beberapa poin yang berkaitan dengan RSPO berlaku khusus untuk sektor minyak sawit, semua elemen lainnya juga perlu dimasukkan dalam kebijakan yang meliputi sektor-sektor lain di mana deforestasi diketahui merupakan salah satu risiko:

- Mengungkapkan jasa keuangan yang diberikan kepada klien yang memiliki kepentingan langsung atau kepentingan kelompok di sektor kelapa sawit.
- Mengadopsi kebijakan tingkat kelompok yang kuat yang menolak pembiayaan kepada perusahaan dan kelompok-kelompok usaha yang terlibat dalam deforestasi, pengembangan lahan gambut dan

eksploitasi, sejalan dengan perusahaan konsumen dan pedagang yang progresif.

- Menggunakan data terbaik yang tersedia untuk secara proaktif memonitor klien pada tingkat kelompok dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan sebelum dan selama kesepakatan transaksi.
- Melakukan uji tuntas untuk menilai kepatuhan pada kebijakan dan berhenti menggunakan keanggotaan RSPO atau sertifikasi sebagai indikator untuk keberlanjutan.
- Uji tuntas harus mencakup (untuk seluruh perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit):
 - Mendapatkan peta-peta konsesi
 - Mengusahakan penilaian HCV dan HCS oleh penilai terkemuka
 - Mendapatkan bukti bahwa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan telah didapat dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan
 - Mendapatkan peta-peta gambut untuk konsesi dan daerah sekitar yang terkena dampak pembangunan
 - Mendapatkan rencana pengembangan yang menunjukkan bahwa HCV, HCS dan gambut dikecualikan dari pembukaan dan pengeringan, dan disertai zona penyangga apabila relevan
 - Memeriksa pengaduan tentang perusahaan bersama-sama RSPO
 - Memeriksa informasi yang tersedia bagi publik yang berkaitan dengan perusahaan (misalnya Global Forest Watch dan pemetaan interaktif Kepo Hutan, berita, siaran pers pemerintah tentang tindakan hukum seputar kebakaran).
 - Di antara klien yang ada, identifikasi kelompok prioritas dan mulai prosedur untuk mewujudkan rencana-rencana aksi bertenggat waktu untuk perusahaan-perusahaan ini, mengharuskan adanya bukti yang kredibel tentang tingkat kepatuhan kelompok terhadap kebijakan NDPE. Kelompok yang tidak mampu memenuhi rencana-rencana ini tidak perlu dipertimbangkan untuk pembiayaan kembali dan jasa keuangan lainnya harus ditutup
 - Kecualikan kelompok apapun dari pinjaman baru atau pembiayaan kembali jika mereka didapati membuka hutan, mengembangkan daerah yang mempengaruhi lahan gambut atau melanggar hak asasi manusia.
 - Selidiki klien lain di sektor kelapa sawit, seperti penyuling dan pedagang, untuk menilai apakah rantai pasok mereka mematuhi kebijakan bank
 - Laporkan kepada publik mengenai kinerja klien terhadap kebijakan ini, kekhawatiran yang diangkat dan tindakan yang diambil untuk menangani masalah: terapkan prinsip-prinsip transparansi agar sejalan dengan pernyataan lembaga keuangan kepada RSPO bahwa 'Transparansi ... membantu menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti deforestasi, pembangunan yang tidak bertanggung jawab di lahan gambut, dan insiden kebakaran ditangani, dipantau, dan dikaitkan dengan pemilik lahan yang benar.'

CATATAN AKHIR

- 1 Greenpeace International (2015)
- 2 Koplitz et al (2016). Penelitian ini hanya berfokus pada tingkat kematian orang dewasa 'akibat kurangnya pengetahuan akan efek polusi udara terhadap tingkat kematian anak-anak' namun mengakui bahwa 'dampak terhadap anak-anak mungkin besar sekali;
- 3 Bank Dunia (2016) hal. 2
- 4 Harris et al (2015)
- 5 53% di Kalimantan Barat, 51% di Riau. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace International.
- 6 Analisis pemetaan Greenpeace International
- 7 Ancrenaz et al (2016)
- 8 Greenpeace International (2016b)
- 9 Amnesty International (2016)
- 10 Lihat misalnya Lembaga Keuangan Anggota RSPO (2016).
- 11 Angka keseluruhan tidak tersedia, namun sebuah kajian baru-baru ini terhadap 25 kelompok usaha kelapa sawit mengidentifikasi HSBC sebagai pemberi pinjaman utama kepada kelompok-kelompok usaha ini selama tahun 2009–2013. Sumber: Winarni dan van Gelder (2014) hal. 15.
- 12 Lihat misalnya Global Canopy Programme (2016a).
- 13 HSBC (2014a) hal. 2
- 14 HSBC Global Research (2013) hal. 6, 25
- 15 Kemen LHK (2015b)
- 16 HSBC (2016c) hal. 2
- 17 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 2 Desember 2016
- 18 Situs HSBC, 'HSBC in numbers'
- 19 HSBC (2016a) hal. 15
- 20 Forbes (2016b)
- 21 Forbes (2016a)
- 22 HSBC (2016c) hal. 2
- 23 Global Canopy Programme (2016a)
- 24 HSBC (2016c) mengizinkan terus berlanjutnya pendanaan proyek-proyek batu bara, termasuk klien baru yang memiliki ketergantungan di bawah 50% pada batu bara dan ekspansi pertambangan batu bara yang ada yang tidak mencakup lokasi-lokasi baru atau infrastruktur baru 'yang besar'.
- 25 HSBC (2008) hal. 2
- 26 HSBC (2014a) hal. 2
- 27 HCS Approach Steering Group (2015)
- 28 HSBC (2014b) hal. 2
- 29 RSPO (2013c) hal. 48, kriteria 7.3
- 30 HSBC (2016c) hal. 2
- 31 HSBC (2016c) hal. 1
- 32 HSBC (2014a) hal. 2
- 33 Consortium to Revise the HCV Toolkit for Indonesia (2008) hal. 13
- 34 RSPO (2013c) hal. 50, kriteria 7.4
- 35 RSPO (2013c) hal. 66
- 36 RSPO (2013c) hal. 29, 53, kriteria 5.5 dan 7.7
- 37 HSBC (2014c) hal.1
- 38 Lihat peta di situs Layanan Informasi Situs Ramsar
- 39 HSBC (2016c) hal. 3
- 40 Peraturan perundang-undangan mencakup Surat Keputusan Presiden 32/1990, Peraturan Pemerintah 26/2008, dan Peraturan Kementan 14/2009 dan Peraturan Pemerintah 71/2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut..
- 41 Peraturan Kementan 14/2009
- 42 Instruksi Presiden 10/2011
- 43 S.494/MENLHK-PHPL/2015
- 44 S.661/Menlhk-Setjen/Rokum/2015
- 45 Peraturan Presiden No. 57/2016, yang mengamandemen Peraturan Presiden No. 71/2014
- 46 HSBC (2014a) hal. 2
- 47 Prinsip-prinsip Ekuator III (2013)
- 48 Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015) hal. 1
- 49 Wilmar (2013)
- 50 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 51 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 52 HSBC (2014a), hal.2
- 53 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 54 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 55 HSBC Global Research (2013) hal. 25–26
- 56 RSPO (2013c)
- 57 Situs RSPO 'Certified growers' berisi 2.398.677 Ha dan 68 penanam bersertifikat yang tercatat sampai tanggal 30 November 2016.
- 58 Situs RSPO, 'Status of Complaints – Case Tracker'
- 59 Data diakses antara tanggal 9 Desember 2016 dan 14 Desember 2016
- 60 Biasanya, underwriter utama atau manajer utama yang bertugas mengkoordinasikan informasi mengenai kesepakatan
- 61 Lihat Kementerian Pertanian (2013), yang memperbarui Kementerian Pertanian (2007).
- 62 Proses ini diuraikan dalam dua peraturan: Kementerian Pertanian (1993) dan Menteri Pertanian (1999).
- 63 Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (PP 15/2010), (pasal 160, 163 dan 165) secara jelas mensyaratkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk dialokasikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- 64 Ini sering ditingkatkan menjadi GRTT (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh).
- 65 Pasal 45 UU 39/2014 Tentang Perkebunan
- 66 Pasal 17 UU 39/2014 Tentang Perkebunan
- 67 Kementerian Pertanian (2013) pasal 15
- 68 Untuk areal perkebunan kurang dari 200 Ha, HGU diterbitkan oleh Kantor BPN Provinsi.
- 69 Biaya yang harus dibayarkan seseorang atau perusahaan kepada pemerintah pemilik tanah untuk mendapatkan hak pengusahaan kayu.
- 70 RSPO (2013c) hal. 11–14
- 71 Serta saham-saham minoritas di dua perusahaan lain, Sawit Nabati Agro dan Berkat Agro Sawitindo. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 103.
- 72 Bumitama Agri Ltd (2013a) hal. 4 AR
- 73 Dimiliki lewat Wellpoint Pacific Holdings Ltd, yang merupakan anak perusahaan Fortune Holdings Ltd, yang dimiliki sepenuhnya. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 140.
- 74 Dimiliki lewat Oakridge Investments Pte Ltd, anak perusahaan IOI Corporation Berhad yang dimiliki sepenuhnya. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 140.
- 75 Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 20
- 76 Bumitama Agri Ltd (2016) hal.97-99
- 77 Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 4
- 78 Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 4
- 79 Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 10
- 80 Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 4
- 81 Greenpeace International (2014)
- 82 Greenpeace International (2015)
- 83 Situs Ramsar Sites Information Service, 'Tanjung Puting National Park'
- 84 HSBC (2014c) hal. 1
- 85 Lihat situs RSPO, 'Case tracker | PT Andalan Sukses Makmur (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)', 'Case tracker | PT Ladang Sawit Mas (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)' dan 'Case tracker | PT Nabatindo Karya Utama (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)'.
- 86 RSPO (2013a)
- 87 Bumitama Agri Ltd (2013c)
- 88 Bumitama Agri Ltd (2013b)
- 89 HSBC (2008) hal. 2
- 90 Situs RSPO, 'Case tracker | PT Hati Prima Agro (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)'
- 91 Situs RSPO, 'Case tracker | PT Nabatindo Karya Utama (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)'
- 92 Situs RSPO, 'Case tracker | PT Ladang Sawit Mas (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)'
- 93 Situs RSPO, 'Case tracker | PT Andalan Sukses Makmur (anak perusahaan Bumitama Agri Ltd.)'
- 94 Situs RSPO, 'Case tracker | Bumitama Gunajaya Abadi'
- 95 Bumitama Agri Ltd (2015b)
- 96 Bumitama Agri Ltd (2015c)
- 97 HSBC (2014a) hal. 2
- 98 Bumitama Agri Ltd (2015a)
- 99 Surel ke Greenpeace dari Apical, 23 Desember 2016
- 100 Surel ke Greenpeace dari Cargill, 23 Desember 2016
- 101 Surel ke Greenpeace dari GAR, 24 Desember 2016
- 102 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 Desember 2016
- 103 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 22 Desember 2016
- 104 Surel ke Greenpeace dari Wilmar, 23 Desember 2016
- 105 Greenpeace International (2016a)
- 106 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 107 Bumitama Agri Ltd (2012)
- 108 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 4
- 109 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 32
- 110 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 46
- 111 'Hak' di sini merujuk pada HGU dan/atau Hak Milik. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 47.
- 112 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 45: '(a) Izin Prinsip dari 11.104 hektar, di mana Izin Prinsip untuk 8.684 hektar di antaranya telah kadaluarsa; (b) Izin Lokasi dari 136.320 hektar, di mana Izin Lokasi untuk 111.820 hektar di antaranya telah kadaluarsa.
- 113 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 136
- 114 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 136
- 115 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 175
- 116 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 46: '(c) Hak Guna Usaha dari 32.729 hektar; dan (d) Program Kebun Plasma seluas 11.795 hektar di mana petani plasmanya telah mendapatkan Izin Lokasi dan/atau Hak Milik'.
- 117 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 124
- 118 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 32
- 119 Friends of the Earth Europe et al (2013) hal. 5
- 120 TUV Rheinland Indonesia (2016)
- 121 Bumitama Agri Ltd (2013a) hal. 102
- 122 Terdaftar sebagai dikuasai lewat PT Agro Manunggal Sawitindo, incorporated 2007. Sumber: Bumitama Agri Ltd (2012) hal.78–79.
- 123 TUV Rheinland Indonesia (2016)
- 124 Aksénta (2016a) hal. 5: Area Izin Lokasi tersebut merupakan perluasan dari areal perkebunan kelapa sawit PT KBAS 1 dan KBAS 2 yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Kegiatan penanaman kelapa sawit pada lokasi kajian telah berlangsung sejak tahun 2010 ketika PT KBAS 1 mulai

- beroperasi.'
- 125 Bumitama Agri Ltd (2012) hal. 155
- 126 Pengadilan Negeri Ketapang (2014)
- 127 Pengadilan Negeri Ketapang (2014)
- 128 RSP0 (2013c), prinsip 2
- 129 HSBC (2014a) hal. 2
- 130 Surel ke Greenpeace dari Bumitama, 11 & 12 Januari 2017
- 131 Surel ke Greenpeace dari Bumitama, 12 Januari 2017
- 132 Surel ke Greenpeace dari Bumitama, 11 Januari 2017
- 133 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 134 Laporan tahunan Good Hope PLC 2010–2015, Laporan Triwulan Pertama Good Hope First 2016, tersedia di http://www.carsoncumberbatch.com/investor_information/investor_information_good_hope_plc.php
- 135 Halaman anggota di situs RSP0, 'Goodhope Asia Holdings Ltd'
- 136 Situs Carson Cumberbatch, 'Our history'
- 137 Bukit Darah PLC (2015) hal. 164
- 138 Nama-nama konsesinya adalah: PT Agro Indomas, PT Rim Capital, PT Agro Wana Lestari, PT Karya Makmur Sejahtera, PT Agro Bukit, PT Agrajaya Baktitama, PT Batu Mas Sejahtera, PT Sawit Makmur Sejahtera, PT Sumber Hasil Prima, PT Sinar Sawit Andalan, PT Nabire Baru, PT Sariwana Adi Perkasa, PT Agro Bina Lestari dan PT Agro Surya Mandiri.
- 139 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 140 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 141 Luas konsesi mengacu pada Izin Lokasi
- 142 Carson Cumberbatch PLC (2015)
- 143 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd, 'Subsidiaries'
- 144 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd, 'Edible oils & fats'
- 145 Carson Cumberbatch PLC (2015) hal. 21
- 146 Situs Carson Cumberbatch
- 147 Situs Goodhope Asia Holdings Ltd, 'Environment'
- 148 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 149 Halaman anggota di situs RSP0, 'Goodhope Asia Holdings Ltd'
- 150 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 151 Halaman anggota di situs RSP0, 'Goodhope Asia Holdings Ltd'
- 152 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 153 HSBC (2014a) hal. 2
- 154 Halaman anggota di situs RSP0, 'Goodhope Asia Holdings Ltd'
- 155 Situs RSP0, 'Status of complaints - Case tracker'
- 156 RSP0 (2016a, 2016b)
- 157 Goodhope Asia Holdings Ltd (2015)
- 158 Surel ke Greenpeace dari Apical, 23 Desember 2016
- 159 Surel ke Greenpeace dari Cargill, 23 Desember 2016
- 160 Surel ke Greenpeace dari GAR, 24 Desember 2016
- 161 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 Desember 2016
- 162 Surel ke Greenpeace dari KLK, 23 Desember 2016
- 163 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 22 Desember 2016
- 164 Surel ke Greenpeace dari Wilmar, 23 Desember 2016
- 165 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 166 Surel ke Greenpeace dari GAR dan Wilmar, 20 September 2016
- 167 Situs Wilmar 'Grievance list with progress updates'
- 168 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 20 September 2016
- 169 Berdasarkan citra Landsat bebas awan pada tanggal 16 Juni 2016. Tidak ada analisis spasial lengkap dari citra ini dilakukan untuk mendapatkan angka-angka yang tepat.
- 170 Rifung et al (2011)
- 171 Pedoman terkait yang berlaku saat itu ada dalam Kementerian Pertanian (2007).
- 172 Mawel (2015)
- 173 Rujukan izin SK Bupati Nabire 74/2010
- 174 Mongabay Indonesia (2013); lihat juga Hanebora (2013)
- 175 Rujukan izin SK Gubernur Papua 503/315/Tahun 2014 tercatat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (2016)
- 176 Suara Pusaka (2015c)
- 177 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (2016)
- 178 Gobai (2016)
- 179 Supriyadi (2016)
- 180 Pemimpin komunitas Yerisiam, Simon Petrus Hanebora, yang meninggal dunia di bulan Februari 2015, selama bertahun-tahun berupaya meningkatkan kesadaran akan masalah dalam konsesi ini. Arsip dari blog pribadinya dapat dibaca di <http://sukuyerisiam.blogspot.com>. Lihat juga Suara Pusaka (2015a).
- 181 Lihat Hanebora (2014) untuk kronologinya, dan juga pernyataan koalisi: Suara Pusaka (2015a).
- 182 Suara Pusaka (2015c)
- 183 Yayasan Pusaka (2016)
- 184 Suara Pusaka (2016)
- 185 HSBC (2014a) p2
- 186 RSP0 (2013c) hal. 12
- 187 Tabloid Jubi (2015b)
- 188 Pogau (2013)
- 189 awasMIFEE (2014)
- 190 Suara Pusaka (2014a)
- 191 Situs RSP0, 'Status of complaints - Case tracker'
- 192 Situs RSP0, 'Case tracker | PT Nabire Baru'
- 193 Greenpeace International (2016a)
- 194 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016
- 195 Goodhope Asia Holdings Ltd (2013)
- 196 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 28 November 2016
- 197 BSI Management Systems (2011)
- 198 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 3 November 2016
- 199 BSI Management Systems (2011)
- 200 RSP0 (2013c) hal. 12
- 201 Goodhope Asia Holdings Ltd (2016)
- 202 Goodhope (2016)
- 203 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016
- 204 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 23 September 2016
- 205 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 12 Januari 2017
- 206 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 12 Januari 2017
- 207 Surel ke Greenpeace dari Goodhope, 12 Januari 2017
- 208 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 209 Situs IOI Group, 'Group structure'
- 210 Situs IOI Group, 'Group structure'
- 211 Esslemont (2016)
- 212 IOI Group (2015b)
- 213 IOI Group (2015a) hal. 249
- 214 IOI Group (2015a) hal. 249 dan Bumitama Agri Ltd (2016) hal. 103
- 215 IOI Group (2015a) hal. 254
- 216 IOI Group (2016c)
- 217 Seperti yang diuraikan dengan rinci dalam Greenpeace International (2016b)
- 218 IOI Group (2016c)
- 219 IOI Group (2015b) hal. 3
- 220 HSBC (2014a) hal. 2
- 221 Surel ke Greenpeace dari Olam, 24 Desember 2016
- 222 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 223 Surel ke Greenpeace dari Cargill, 23 Desember 2016
- 224 BankTrack (2016) hal. 16
- 225 Greenpeace International (2008) hal.14, 21–25
- 226 RSP0 (2012a)
- 227 Situs RSP0, 'Case tracker | IOI - IOI Pelita Sdn Bhd'
- 228 Diterima tanggal 3 April 2015; lihat situs RSP0, 'Case tracker | PT Sukses Karya Sawit (SKS), PT Berkat Nabati Sawit (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) anak perusahaan PT Sawit Nabati Agro (PT SNA), IOI Group'
- 229 RSP0 (2016e)
- 230 Burrows (2016)
- 231 GM (2016)
- 232 Vaughan (2016), IOI Group (2016a)
- 233 RSP0 (2016c)
- 234 Misalnya, tinjauan terhadap penilaian NKT untuk PT BSS menyatakan bahwa ancaman terhadap wilayah NKT 1 (wilayah dengan tingkat keanekaragaman tinggi) diidentifikasi hanya dari kegiatan masyarakat. Kajian tersebut tidak memasukkan operasi perusahaan sebagai ancaman terhadap NKT 1 yang telah diidentifikasi.' Sumber: Daemeter (2016) hal. 12
- 235 Daemeter (2016) hal. 9
- 236 RSP0 (2016d)
- 237 RSP0 (2016f)
- 238 IOI Group dan Aidenvironment (2016)
- 239 Aidenvironment (2016b)
- 240 Chow (2016)
- 241 IOI Group dan Aidenvironment (2016)
- 242 Situs RSP0, 'Case tracker | PT Sukses Karya Sawit (SKS), PT Berkat Nabati Sawit (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) anak perusahaan PT Sawit Nabati Agro (PT SNA), IOI Group'
- 243 HSBC (2014a) hal. 3
- 244 Surel ke Greenpeace dari IOI, 10 January 2017
- 245 Surel ke Greenpeace Asia Tenggara dari DBS, 9 Januari 2016
- 246 Surel ke Greenpeace Asia Tenggara dari UOB, 16 Desember 2016
- 247 Surat ke Greenpeace Jepang dari Sumitomo Mitsui, 29 November 2016
- 248 6 Desember 2016
- 249 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 250 Reuters (2016)
- 251 Environmental Investigation Agency (2016)
- 252 Lihat Noble Group (2016b) hal. 203 untuk daftar pemegang saham utama.
- 253 Noble Group (2016b) hal.11–37
- 254 Dua perusahaan perkebunan Noble Group diakui sebagai aset perusahaan yang dijual sebagaimana dalam laporan tahunan 2014 dan 2015 (Lihat Noble Group (2015a, 2016b)). Noble Plantation Pte Ltd adalah perusahaan yang tercantum di situs RSP0 sebagai penanggungjawab untuk dua perkebunan, namun tidak diakui sebagai anak perusahaan dari Noble Group Ltd dalam laporan-laporan tahunannya, yang hanya mencantumkan anak-anak perusahaan utama. Untuk pertimbangan lebih lanjut dari masalah ini dan dampaknya terhadap keanggotaan Noble Group di RSP0, lihat Environmental Investigation Agency (2016).
- 255 Luas konsesi berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan negara SK. 409/MENHUT-II/06 (yang diamandemen oleh SK. 41/MENHUT-II/2009).

- 256 Environmental Investigation Agency dan Telapak (2009)
- 257 Channel News Asia (2010)
- 258 Noble Group (2012)
- 259 Luas konsesi berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan negara SK.611/MENHUT-II/2009. Pihak perusahaan telah menyatakan bahwa setelah mengeluarkan wilayah NKT, mereka berniat menanami 30.871 Ha.
- 260 Noble Group (2015b)
- 261 Yun and Humber (2014)
- 262 Sebagai bagian dari penjualan NAL Group, kelompok usaha ini mempertahankan bisnis kelapa ditukar dengan surat hutang (promissory note) senilai US \$ 64.449.000 untuk NAL Group. Surat hutang ini membawa hak nilai kontingen di mana kelompok usaha ini akan membayarkan kepada NAL Group, hasil dari bisnis sawit, pajak yang lebih rendah, biaya belanja dan biaya penjualan lainnya, yang diterima oleh kelompok usaha ini dari pihak ketiga, dan NAL Group akan mengembalikan surat hutang tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2014, kelompok usaha ini tengah berdiskusi dengan pembeli potensial tentang penjualan bisnis kelapa tersebut.
- 263 Noble Group (2016b)
- 264 Situs Bursa Efek Singapura, 'Company announcements'
- 265 Noble Group (2016c)
- 266 Noble Group (2015b)
- 267 Situs Noble Group, 'Our approach to sustainability'
- 268 Surel ke Greenpeace dari Bell Pottinger, 11 Januari 2017
- 269 RSPO (2012b)
- 270 TUV Rheinland Indonesia (2014)
- 271 Pengaduan dari Environmental Investigation Agency kepada RSPO tentang PT Henrison Inti Persada, diajukan tanggal 24 Oktober 2013. Lihat situs RSPO, 'Case tracker | PT Henrison Inti Persada subsidiary of RSPO member Noble Plantation Pte Ltd'.
- 272 Noble Group (2015b)
- 273 HSBC (2014a) hal. 2
- 274 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 22 Desember 2016
- 275 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 276 Survei tutupan lahan Kementerian Kehutanan Indonesia tahun 2006, <http://appgis.dephut.go.id/appgis/PL2006/PAPUA-2814.jpg>
- 277 Survei tutupan lahan Kementerian Kehutanan Indonesia tahun 2012, <http://appgis.dephut.go.id/appgis/PL2012/PAPUA-3211.jpg>
- 278 Konsep dari sebuah lanskap hutan utuh (Intact Forest Landscape/IFL), seperti dipetakan oleh WRI, Greenpeace dan Transparent World pada tahun 2000 dan 2013, mengacu pada hamparan ekosistem alam tanpa terputus dalam zona luas hutan saat ini, tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia yang signifikan, dan cukup luas sehingga kelangsungan berbagai populasi spesies, dapat dijaga. Lihat <http://www.intactforests.org/index.html>
- 279 Berdasarkan citra Landsat dari tanggal 9 Oktober 2015, 29 Januari 2016 dan 7 Juli 2016.
- 280 Berdasarkan citra Landsat dari 1 Januari 2016 dan 8 Mei 2016.
- 281 Berdasarkan data survey gambut yang dipublikasikan dalam Wetlands International (2006).
- 282 RSPO (2011)
- 283 Dewan Kode Etik untuk Dana Pensiun Global Pemerintah (2014)
- 284 RSPO (2013c) hal. 50, 66 (kriteria 7.4)
- 285 Surel ke Greenpeace dari Bell Pottinger, 11 Januari 2017
- 286 Tabloid Jubi (2014)
- 287 Tekege (2015)
- 288 Suara Papua (2014)
- 289 Antara Papua (2014)
- 290 Noble Group (2015c)
- 291 Tabloid Jubi (2015a); lihat juga Tekege (2015)
- 292 Salam Papua (2016)
- 293 Environmental Investigation Agency dan Telapak (2012)
- 294 Jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 8,5 juta, ditambah Rp. 4 juta untuk upacara. Kontrak bertuliskan tangan mencantumkan '1.420 hektar', yang menunjukkan kompensasi yang bahkan lebih rendah; Namun, korespondensi baru-baru ini dengan marga Gilik telah mengkonfirmasi bahwa tulisan yang benar adalah '± 420 hektar', maka angka ini telah direvisi. Sumber: Environmental Investigation Agency dan Telapak (2012).
- 295 Nilai tukar pada tanggal 9 November 2016.
- 296 Kesaksian Bernadus Gilik dalam 'Profil Kasus, Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar', sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Pusaka dan beberapa organisasi lainnya di Waena, Jayapura, 4-7 November 2014.
- 297 Kesaksian Bernadus Gilik in 'Profil Kasus, Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar', sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Pusaka dan beberapa organisasi lainnya di Waena, Jayapura, 4-7 November 2014.
- 298 Tapi PT Henrison Inti Persada, dalam menanggapi pengaduan oleh Environmental Investigation Agency yang disampaikan pada 24 Oktober 2013, dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa mereka akan merasa senang untuk berbagi semua dokumentasi yang relevan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada RSPO untuk menunjukkan kepatuhan PT HIP dengan hukum setempat, peraturan perundang-undangan dan PADATAPA: lihat website RSPO 'Case tracker | PT Henrison Inti Persada subsidiary of RSPO member Noble Plantation Pte Ltd'.
- 299 Noble Group (2014)
- 300 Radar Sorong (2015)
- 301 Lentera Papua Barat (2012)
- 302 HSBC (2014a) hal.2
- 303 RSPO (2013c)
- 304 Thoumi (2016)
- 305 Dewan Kode Etik untuk Dana Pensiun Global Pemerintah (2014)
- 306 KLP (2015)
- 307 Surel ke Greenpeace dari Bell Pottinger, 11 Januari 2017
- 308 Surel ke Greenpeace dari Bell Pottinger, 11 Januari 2017
- 309 Surat ke Greenpeace dari HSBC, 11 Januari 2017
- 310 Daewoo International Corporation (2015) hal. 45
- 311 Daewoo International Corporation (2016b) hal. 44
- 312 Pulse News (2016)
- 313 Thomas (2001)
- 314 Situs POSCO Daewoo, 'Business information'
- 315 POSCO Daewoo (2016a) hal. 11
- 316 POSCO Daewoo (2016a) hal. 10
- 317 Situs POSCO Daewoo, 'Resource development'
- 318 Korea Herald (2008)
- 319 Baik IUP berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan negara (SK.572/MENHUT-II/2009) diterbitkan tahun 2009.
- 320 Luas konsesi berdasarkan izin pelepasan kawasan hutan negara (SK.572/MENHUT-II/2009). Presentasi perusahaan memberikan angka yang lebih kecil, 34.195 Ha, dengan 'areal perkebunan sesungguhnya' seluas 27.000 Ha. Ini mungkin luas perkebunan yang direncanakan setelah daerah NKT dan areal tanam dikeluarkan. Lihat misalnya POSCO Daewoo (2016b) hal. 17.
- 321 Proyeksi di situs perusahaan The (lihat situs PT Bio Inti Agrindo, 'Oil palm plantation') adalah untuk tahun 2015.
- 322 Daewoo International Corporation (2016a) hal. 45
- 323 Daewoo International Corporation (2016a) hal. 52
- 324 Daewoo International Corporation (2016b) hal. 47
- 325 Posco Daewoo (2016a) hal. 79
- 326 Situs POSCO Daewoo, 'Rules of Conduct'
- 327 Hal ini ditegaskan dalam tanggapan Daewoo kepada Dewan Kode Etik Dana Pensiun Global Pemerintah, di mana mereka menyatakan 'Penilaian untuk daerah bernilai konservasi tinggi di perkebunan kelapa sawit PT.Bio Inti Agrindo (PT. BIA) telah dilakukan melalui proses yang sah, yang dapat dibuktikan dengan pemetaan basas dari Departemen Kehutanan Indonesia (2009) dan Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2012 & 2013) [] dan laporan pelaksanaan pengukuran areal perkebunan kelapa sawit.' Sumber: Dewan Kode Etik Dana Pensiun Global Pemerintah (2015) hal. 8, mengutip surat Daewoo ke Dewan Kode Etika tanggal 8 Agustus tahun 2014.
- 328 POSCO Daewoo (2016c) hal. 40
- 329 Situs POSCO Daewoo, 'Rules of Conduct', bab 7
- 330 Dewan Kode Etik untuk Dana Pensiun Global Pemerintah (2015) hal. 9
- 331 HSBC (2014a) hal. 2
- 332 Surel ke Greenpeace dari Cargill, 23 Desember 2016
- 333 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 334 Aidenvironment (2016a) hal. 36
- 335 See <http://www.intactforests.org/index.html>.
- 336 Tabloid Jubi (2012)
- 337 Watchdoc (2015)
- 338 Dewan Kode Etik untuk Dana Pensiun Global Pemerintah (2015) hal. 7
- 339 Lihat <http://www.iucnredlist.org>.
- 340 Cooper (2015)
- 341 Analisis citra Landsat dalam awasMIFEE (2015)
- 342 HSBC (2014a)
- 343 Aidenvironment (2016a) hal. 10
- 344 Suara Pusaka (2015b)
- 345 Kesaksian Donatus Mahuze dalam 'Profil Kasus, Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar', sebuah acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusaka dan organisasi lain di Waena, Jayapura, 4-7 November 2014. 'Saat perusahaan PT. BIA melakukan kegiatan, praktiknya berbeda dengan penyampaian sosialisasi, akibatnya masyarakat khawatir dengan perusahaan PT. BIA. Hal paling menyakitkan masyarakat adalah perusahaan menggunakan dokumen-dokumen seperti Peraturan Menteri, SK Gubernur, SK Bupati, AMDAL menjadi senjata untuk memuluskan kegiatan dan mendapatkan lahan milik masyarakat. Masyarakat adat sama sekali tidak dilibatkan, tidak tahu dan tidak pernah menerima tentang isi dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi dasar untuk perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. Masyarakat menerima saja pembayaran kompensasi lahan yang disiapkan perusahaan meskipun nilainya kecil dan tidak sesuai luasan areal yang digunakan. Pemerintah, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) adalah aktor-aktor yang menjadi mediator palsu mengatasnamakan masyarakat adat. Aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Muting menimbulkan permasalahan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat adat Malind yang berdamai di wilayah adat setempat, antara lain: terjadinya pengrusakan hutan adat dan sumber daya alam lainnya, pengabaian hak-hak masyarakat atas tanah warisan leluhur, terjadi pelecehan hak-hak budaya, pengusuran tempat keramat dan sumber daya yang menjadi identitas totem Orang Malind, melanggar hak-hak ekonomi sosial budaya, terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil, konflik internal antar marga-marga dan suku, dan sebagainya.'
- 346 Suara Pusaka (2014b)
- 347 HSBC (2014a) hal. 2
- 348 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 349 PT Indofood Sukses Makmur (2016) hal. 80
- 350 Indofood (2015) hal. 137
- 351 Indofood (2014) hal. 145
- 352 Situs Indofood, 'Consumer branded products'
- 353 OPUK, Rainforest Action Network dan International Labor Relations Forum (2016)
- 354 Aidenvironment (2015) hal. 14

- 355 Situs Indofood, 'Shareholders composition'
- 356 IndoAgri (2016) hal. 111
- 357 IndoAgri (2016) hal. 7
- 358 IndoAgri (2016) hal. 19
- 359 IndoAgri (2016) hal. 22
- 360 IndoAgri (2016) hal. 23
- 361 IndoAgri (2016) hal. 20
- 362 IndoAgri (2013)
- 363 IndoAgri (2014)
- 364 Halaman anggota di situs RSP0, 'PT PP London Sumatra Indonesia Tbk'
- 365 Halaman anggota di situs RSP0, 'PT Salim Ivomas Pratama Tbk'
- 366 PT PP London Sumatra Indonesia (2015) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015)
- 367 IndoAgri (2016) hal. 13
- 368 PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015). Perhatikan bahwa laporan ini tampaknya mencakup seluruh areal konsesi IndoAgri (berdasarkan perbandingan areal dan tingkat output dengan IndoAgri (2016)).
- 369 PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015) hal. 3
- 370 HSBC (2014a) hal. 2
- 371 Surel ke Greenpeace dari Manajer Sertifikasi RSP0 Senniah Appalasaamy, 1 Agustus 2016: 'Laporan NPP yang diminta untuk Isyur Makmur [sic] telah dikembalikan ke perusahaan karena dokumentasi yang tidak lengkap. laporan analisis perubahan lahan dan gas rumah kaca tidak disampaikan sebagaimana yang diwajibkan oleh proses NPP. Sesuai persyaratan NPP pemberitahuan tidak akan diunggah ke situs web RSP0 jika pengajuan tidak lengkap.'
- 372 Surel ke Greenpeace dari Apical, 23 Desember 2016
- 373 Surel ke Greenpeace dari Cargill, 23 Desember 2016
- 374 Surel ke Greenpeace dari GAR, 24 Desember 2016
- 375 Surel ke Greenpeace dari IOI, 22 Desember 2016
- 376 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 22 Desember 2016
- 377 Surel ke Greenpeace dari Wilmar, 23 Desember 2016
- 378 Surel ke Greenpeace dari Musim Mas, 22 Desember 2016
- 379 Surel ke Greenpeace dari AAK, 16 Desember 2016
- 380 Surel ke Greenpeace dari Wilmar, 20 September 2016
- 381 Surel ke Greenpeace dari GAR, 20 September 2016
- 382 Situs Golden Agri-Resources Ltd 'Grievance list'
- 383 Nama konsesi tersebut saat ini tidak jelas. Konsesi tersebut terletak di sebelah barat Danau Jempang di Kalimantan Timur. IndoAgri menyebutnya Kedang Makmur pada tahun 2015 dalam diskusi dengan Aidenvironment, sementara nama Isyur Makmur digunakan untuk konsesi bersebelahan di daerah selatan. Namun, NPP RSP0 untuk Pahu Makmur dan Kedang Makmur yang disampaikan pada tanggal 22 Desember 2014 menggunakan nama Kedang Makmur untuk konsesi berbeda yang terletak beberapa kilometer dari sana, di selatan Danau Jempang, dan mencakup peta yang menggabungkan kedua konsesi di barat Danau Jempang dengan nama Isyur Makmur. (Sumber: PT PP London Sumatra Indonesia (2014)) Terlepas dari apapun namanya, konsesi tersebut jelas milik IndoAgri.
- 384 Aidenvironment (2015) hal.18-22
- 385 HSBC (2014a)
- 386 OPPUK, Rainforest Action Network dan International Labor Relations Forum (2016)
- 387 Accreditation Services International (2016)
- 388 HSBC (2014a) hal. 2
- 389 RSP0 (2013c) hal. 38-39, kriteria 6.7 dan 6.8
- 390 Centre for Orangutan Protection (2013)
- 391 Studwell (2007)
- 392 Lihat Dewan Kode Etik Dana Pensiun Global Pemerintah (2015) hal. 1.
- 393 IndoAgri (2013, 2014)
- 394 Indomaret (2016)
- 395 Situs Bloomberg, 'Soenardi Winardo'
- 396 Dari akta-akta perusahaan
- 397 PT Salim Ivomas Pratama (2014) hal. 127
- 398 First Pacific (2006) hal. 7
- 399 Dari akta-akta perusahaan.
- 400 Dari akta-akta perusahaan.
- 401 Situs AHU, yang secara umum memberikan informasi terbaru dalam database Sisminbakum, mencantumkan alamat berbeda: JL. LETJEN SUPRAPTO NO.98 RT 010/002, CEMPAKA PUTIH TIMUR- CEMPAKA PUTIH (lihat https://ahu.go.id/pencarian/bakum/cari/?tipe/perseroan?nama_perseroan=putra%20mulia&page=613). Alamat ini tidak muncul dalam akta perusahaan.
- 402 Dari akta-akta perusahaan.
- 403 Indoritel Makmur International (2013) p29
- 404 Dari akta-akta perusahaan.
- 405 Dari akta-akta perusahaan.
- 406 Dari akta-akta perusahaan.
- 407 Dari akta-akta perusahaan.
- 408 Dari akta-akta perusahaan.
- 409 Dari akta-akta perusahaan.
- 410 Dari akta-akta perusahaan.
- 411 Dari akta-akta perusahaan.
- 412 Bloomberg website, 'Soenardi Winardo'
- 413 Indomaret (2016)
- 414 Kalimantan-News.com (2013)
- 415 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari akta perusahaan Indonesia yang mewakili nomor identitas unik seseorang. Enam digit pertama membentuk tempat lahir, enam digit berikutnya tanggal lahir. Nomor yang unik ini berlaku seumur hidup dan seharusnya tidak berubah. Scan cepat dari akta perusahaan apakah mereka memang satu orang yang sama. Yang kritis, hal itu menunjukkan bahwa nama-nama individu dan ID tidak tercatat secara akurat dalam akta perusahaan. Selain itu, mengingat rangkaian panjang perusahaan cangkang yang disarangkan (nested), hal ini mungkin menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dimanfaatkan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang benar-benar mengendalikan perusahaan-perusahaan ini, meskipun hal ini memberi isyarat kuat bahwa ada hubungan lebih jauh antara sisi Indofood dari Salim Group dan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya. Apakah dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, akibatnya adalah bahwa peraturan pemerintah tentang transparansi kepemilikan perusahaan terdaftar tidak akan terpenuhi. Di akta perusahaan PT Adi Mulya dan PT Mega Inti Usaha, NIK 3172062011600002 saat ini digunakan untuk Hermanto Boentoro alias Fransiscus Xaverius, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 20 November 1960. NIK 3173080411730007 saat ini digunakan untuk Andree Hendrawan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 4 November 1973.
- NIK 3219152005,0119995 saat ini digunakan dalam akta perusahaan PT AWP untuk Fransiscus Xaverius Purwanto, dengan tempat dan tanggal lahir Flores, 9 November 1961 - ID dan tanggal lahir ini juga muncul dalam akta yang sama untuk Gunawan Sumantri, meskipun tempat lahir yang tertera adalah Puwokerto. NIK ini digunakan di akta perusahaan PT BSS baik untuk Junus Sutiono maupun Gunawan Sumantri. NIK ini digunakan di akta perusahaan PT GSJ dan PT Wahana Tritunggal Cemerlang untuk Gunawan Sumantri. NIK 09.5202.160845.0220 saat ini digunakan dalam akta perusahaan PT Berau Sawit Sejahtera untuk Fransiscus Xaverius Purwanto, dengan tempat dan tanggal lahir Banjarengara, 16 Agustus 1945 - ID dan tempat/tanggal lahir ini juga muncul dalam akta yang sama untuk seorang bernama Sutardi. NIK yang sama digunakan dalam akta perusahaan PT Wahana Tritunggal Cemerlang baik untuk Andree Hendrawan maupun Hanan Lukitanto. Juga digunakan dalam akta perusahaan PT Duta Sejahtera Utama untuk Andree Hendrawan (Direktur saat ini) serta Tjahjono Setiadi (mantan Direktur).
- Penggunaan NIK ini untuk Tjahjono Setiadi sangat penting karena peran aktifnya saat ini di Indofood. NIK yang sama digunakan untuk Tjahjono Setiadi dalam akta perusahaan PT DRM, di mana ia adalah mantan Komisaris, dan PT GSJ, di mana ia adalah mantan Direktur. Sehubungan dengan posisi saat ini di mana ia dikaitkan dengan NIK ini, ia saat ini menjabat sebagai Direktur PT GS, PT Mega Citra Verdana, PT Multi Pacific International dan PT Purwa Wana Lestari - semuanya adalah perusahaan Indofood.
- NIK 617101201161002 saat ini digunakan dalam akta perusahaan PT DRM untuk FX Purwanto, dengan tempat dan tanggal lahir Wonosari, 20 November 1961.
- NIK 14.5002.201161.0002 saat ini digunakan dalam akta perusahaan PT GSJ untuk Fransiscus Xaverius Purwanto, dengan tempat dan tanggal lahir Wonosari, 20 November 1961.
- NIK 09.5006.180567.2008 saat ini digunakan dalam akta perusahaan PT Wira Inova Nusantara untuk Fransiscus Xaverius Purwanto, dengan tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Mei 1967.
- 416 AAA Guntta Samba Group (2013)
- 417 PT Guntta Samba (2015)
- 418 Lihat misalnya Endgame (2002) dan Bankrupt.com (tidak bertanggung).
- 419 Situs Reuters, 'People: Indofood Sukses Makmur Tbk PT (INDFta.JK)'
- 420 Situs LinkedIn, 'andree hendrawan'
- 421 Situs Bloomberg, 'Phiong Phillipus Darma'
- 422 Jakarta City News (2010)
- 423 Centre for Orangutan Protection (2013)
- 424 Surel ke Ravin Krishnan, Koordinator Panel Pengaduan RSP0, dari Mark Wakeford, 21 Juni 2013
- 425 RSP0 (2013d)
- 426 RSP0 (2013b)
- 427 BSI Group (2010)
- 428 RSP0 (2010)
- 429 Situs RSP0, 'Case tracker | PT Guntta Samba Jaya/ Salim Ivomas Pratama Tbk'
- 430 Surat ke Greenpeace UK dari HSBC, 11 Januari 2017
- 431 Berdasarkan UNEP (2015) hal. 17
- 432 Misalnya Jacobson (2016a), Jong (2016)
- 433 Jacobson (2016b), Jacobson (2016c). Perhatikan bahwa kawasan yang terkena dampak mungkin tidak semuanya kawasan berhutan saat ini.
- 434 RSP0 (2016e). Konsumen termasuk Unilever, Nestle, Mars dan Kellogg menandatangani perdagangan mereka dengan IOI: Burrows (2016).
- 435 Sesuai yang diprediksi oleh, misalnya, Deltares (2015).
- 436 HSBC Global Research (2013) hal. 6
- 437 HSBC Global Research (2013) hal. 26
- 438 Equator Principles III (2013)
- 439 Global Canopy Programme (2016b) hal. 9
- 440 ABN AMRO (tidak bertanggung)
- 441 Sumber: data Bloomberg
- 442 Lihat situs RSP0, 'Anggota'
- 443 Lembaga keuangan anggota RSP0 (2016)

15 Juli 2013, Manokwari:
Seekor katak pohon Papua duduk
di atas tanaman Suplir di hutan
sekitar Manokwari.
©HILTON/GREENPEACE





AKRONIM

AAK	AarhusKarlshamn	MT	Million metric tonnes (juta metric ton)
ACOP	Annual Communication of Progress (from companies to the RSPO) Komunikasi perkembangan tahunan (dari perusahaan ke RSPO)	NDPE	No Deforestation, No Peat, No Exploitation (Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi)
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	NGO	Non-governmental organisation (Organisasi non-pemerintah/LSM)
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup	NPP	New Planting Procedure (report to RSPO) (Prosedur Penanaman Baru – laporan ke RSPO)
APL	Areal Penggunaan Lain	P&C	Principles and Criteria (RSPO) Prinsip & Kriteria (RSPO)
BAL	Bumitama Agri Ltd	PKO	Palm kernel oil (minyak inti sawit)
BN	Milyar	PT	Perseroan Terbatas
BPN	Badan Pertanahan Nasional	PT ASMR	PT Andalan Sukses Makmur
CPO	Crude palm oil (minyak sawit mentah)	PT AWP	PT Andhika Wahana Putra
DR	Dana Reboisasi	PT BIA	PT Bio Inti Agrindo
FFB	fresh fruit bunches (tandan buah segar/TBS)	PT BNS	PT Berkat Nabati Sejahtera
FOE	Friends of the Earth	PT BSS	PT Bumi Sawit Sejahtera
FPIC	Free, prior and informed consent (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/PADIATAPA)	PT DRM	PT Duta Rendra Mulya
FPP	Forest Peoples Programme	PT GS	PT Gunta Samba
GAR	Golden Agri-Resources	PT GSJ	PT Gunta Samba Jaya
GHG	Greenhouse gas (gas rumah kaca/GRK)	PT HIP	PT Henrison Inti Persada
HA	Hektar	PT HKI	PT Hutan Ketapang Industri
HCS	High carbon stock (Stok Karbon Tinggi/SKT)	PT KBAS	PT Karya Bakti Agro Sejahtera
HCV	High conservation value (Nilai Konservasi Tinggi/NKT)	PT KSL	PT Ketapang Sawit Lestari
HGU	Hak Guna Usaha	PT LONSUM	PT PP London Sumatra Indonesia
IDR	Mata uang rupiah Indonesia	PT LSM	PT Ladang Sawit Mas
IL	Izin Lokasi	PT MIU	PT Mega Inti Usaha
ILO	International Labour Organisation (Organisasi Buruh Internasional)	PT NB	PT Nabire Baru
ILRF	International Labor Relations Forum (Forum Hubungan Buruh Internasional)	PT PAL	PT Pusaka Agro Lestari
IPK	Izin Pemanfaatan Kayu	PT RTC	PT Rahmat Timur Cemerlang
IPO	Initial public offering (Penawaran Saham Perdana)	PT SAP	PT Sariwana Adi Perkasa
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil (Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia)	PT SKS	PT Sukses Karya Sawit
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Uni Konservasi Alam Internasional)	PT UAS	PT Unitama Adiusaha Shipping
IUP	Izin Usaha Perkebunan	RAN	Rainforest Action Network (Jaringan Aksi Hutan Hujan)
KLK	Kuala Lumpur Kedang	RKL	Rencana Kerja Lingkungan Hidup
KM	Kilometer	RP	rupiah
M	Juta	RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
M3	Meter kubik	RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil (Forum Minyak Sawit Berkelanjutan)
MOEF	Ministry of Environment and Forestry, Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia)	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama
		UK	United Kingdom (Inggris)
		UN	United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB)
		US	United States (Amerika Serikat/AS)

METODOLOGI

Analisis pemetaan: selain yang tidak dirujuk dalam laporan dilakukan dengan menggunakan platform daring publik milik Greenpeace 'Kepo Hutan' dan penilaian visual atau alat analisis. Sumber data utama termasuk:

Tutupan hutan: KLHK (2015a)

Wilayah gambut: Ritung S et al (2011) Perhatikan bahwa penggunaan peta ini tidak menyiratkan akurasi, namun hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah peta yang tersedia saat ini yang digunakan pada platform daring publik.

Konsesi kelapa sawit 2016: Disusun oleh Greenpeace berdasarkan peta perkebunan pertanian yang disediakan oleh Departemen Perencanaan Kementerian Kehutanan, Indonesia, yang diunduh pada tanggal 29 Juli 2010 (<http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx>), ditambah dan diperbarui oleh Greenpeace di beberapa provinsi dengan data yang dikumpulkan dari lembaga tingkat provinsi (BPN/BAPPEDA) dan dokumen yang diajukan perusahaan misalnya kepada RSPO.

Peringatan GLAD: Kumpulan data ini, dibuat oleh laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) di Universitas Maryland yang didukung oleh Global Forest Watch, adalah sistem peringatan berbasis Landsat pertama untuk mendeteksi hilangnya tutupan pohon. Sementara sebagian besar produk penurunan peringatan yang ada menggunakan citra MODIS dengan resolusi 250 meter, sistem ini memiliki resolusi 30 meter dan karenanya dapat mendeteksi hilangnya tutupan hutan pada skala spasial yang jauh lebih rinci. Sistem ini digunakan saat ini di Peru, Republik Kongo, dan Kalimantan di Indonesia, dan pada akhirnya akan diperluas ke seluruh kawasan tropis yang lembab. Sumber: GLAD/UMD, diakses lewat Global Forest Watch. Hansen MC et al (2016)

Titik api kebakaran: NASA (2016)

FORMA: Data FORMA menunjukkan jumlah areal yang memiliki kemungkinan hilangnya tutupan pohon lebih dari 50% di resolusi 500m x 500m. Peringatan ini bukanlah pengukuran deforestasi berdasarkan daerah. Sensitivitas deteksinya dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk awan yang terus-menerus menghalangi dan banjir. Untuk penjelasan selengkapnya tentang data-data ini, lihat http://data.globalforestwatch.org/datasets/550bd7fc2c5d45418e5e515ce170da22_3.

Pabrik: Greenpeace memperoleh data traceability IOI Loders Croklaan dari dashboard perusahaan di situsnya. (<http://europe.ioiloders.com/taking-responsibility/list-of-mills/>). Dashboard ini dapat dilihat jika telah mendaftar, yang diperoleh dengan alamat surel dan informasi pribadi Greenpeace. Informasi yang disediakan menunjukkan untuk setiap pabrik perusahaan induk dari pabrik tersebut, status sertifikasi RSPO dan model rantai pasok, dan lokasi sumber, yang berisi nama pedagang dan kategori tempat pengumpulan yang tidak baku. Data ini mencakup periode dari kuartal ke-2 tahun 2015 sampai kuartal ke-1 tahun 2016 dan mewakili, hingga bulan April 2016, 95% dari volumenya. Greenpeace tidak mengklaim bahwa data ini mencerminkan pola pembelian saat ini, hanya menunjukkan hubungan pengadaan bahan baku hingga bulan April 2016. Setiap kesalahan dalam data tersebut adalah tanggung jawab IOI Loders Croklaan. Peta lain: Peta interaktif Global Forest Watch (<http://www.globalforestwatch.org>), termasuk data perkebunan dari Transparent World (2015).

Catatan: Untuk keperluan laporan ini, Greenpeace adalah Greenpeace International kecuali dinyatakan lain. Versi Indonesia dari laporan ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris dan bertujuan untuk informasi saja. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka merujuk ke versi bahasa Inggris.



15 Juli 2013, Manokwari:
Sebuah pohon dengan hutan
pegunungan di pinggiran
Manokwari, Papua.
©HILTON/GREENPEACE



REFERENSI

- AAA Guntá Samba Group (2013) 'Wilayah Kerja Staff AAA' <https://guntasamba-aaa.blogspot.de/2013/02/wilayah-kerja-profil-staff-aaa-2013.html>
- ABN AMRO (undated) 'Sustainability sector policy for agri-commodities' https://www.abnamro.com/en/images/Documents/040_Sustainable_banking/070_Sustainability_policy/ABN_AMRO_Summary_agri-commodities_policy.pdf
- Accreditation Services International (2016) 'ASI final assessment report RSP0 accreditation program' 5 September 2016 <http://www.accreditation-services.com/document/asi-rspo-sai-pc-compliance-indonesia-2016/>
- Aidenvironment (2015) 'Palm oil sustainability assessment of Indofood Agri Resources' September 2015 https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/14786/attachments/original/1442856231/Full_Report_Palm_Oil_Sustainability_Assessment_of_Indofood_Agri_Resources.pdf?1442856231
- Aidenvironment (2016a) 'Burning paradise: The oil palm practices of Korindo in Papua and North Maluku' 1 September 2016, ditugaskan oleh Mighty, the Korea Federation for Environmental Movements, SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-08-25-FINAL-Korindo-report-English.pdf>
- Aidenvironment (2016b) 'Update on the IOI Ketapang complaint case' 3 November 2016 <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/11/2016-Nov-3-Aidenvironments-Update-on-IOI.pdf>
- Aksénta (2015) 'Talking sustainability: Seeking the truth' Mei 2015 <http://www.rspo.org/files/download/a978f9c551ee78d>
- Aksénta (2016) 'Public summary, high conservation value assessment, PT Karya Bakti Agro Sejahtera 3 (PT KBAS 3)' 18 Mei 2016 https://www.hcvnetwork.org/als/sites/default/files/sites/default/files/documents/pt_kbas_3_public_summary7.pdf
- Amnesty International (2016) 'Indonesia: The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names' 30 November 2016 <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/>
- Ancrenaz et al (2016) 'Pongo pygmaeus (Bornean Orangutan)' <http://www.iucnredlist.org/details/17975/0>
- Antara Papua (2014) 'Bupati Mimika resmi hentikan operasional perkebunan sawit PT PAL' 17 Desember 2014 (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1113>)
- awasmifee (2014) 'Violence and intimidation from PT Nabire Baru's Brimob guards continues' 10 August 2014 <https://awasmifee.potager.org/?p=1025>
- awasmifee (2015) 'Merauke burns – but were the plantations to blame?' 20 November 2015 <https://awasmifee.potager.org/?p=1346>
- Bankrupt.com (undated) 'Holdiko Perkasa's asset sales' http://bankrupt.com/misc/TCRAP_Holdiko0404.doc
- BankTrack (2016) 'Human rights impact briefing no. 1: Labour standards violations in IOI Corporation's Malaysian plantations' Februari 2016 http://www.banktrack.org/ems_files/download/ioi_corporation_human_rights_impact_briefing_160216_pdf/ioi_corporation_human_rights_impact_briefing_160216.pdf
- Bloomberg website 'Phiong Phillipus Darma' <http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=36375783&privcapId=31250831> diakses pada 13 Januari 2017
- Bloomberg website 'Soenardi Winarto' <https://www.bloomberg.com/profiles/people/17304138-soenardi-winarto> diakses pada 12 Januari 2017
- BSI Group (2010) 'BSI-CUC verifying Greenpeace claims case: PT SMART Tbk' Agustus 2010 <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/IVEX%20Report%20100810.pdf>
- BSI Management Systems (2011) Public Summary Report 'New Plantings Assessment: PT Nabire Baru, Papua, Indonesia' Juli 2011
- Bukit Darah PLC (2015) 'Annual report 2014/15' http://www.carsoncumberbatch.com/investor_information/annual_reports_2014_2015/bukit_darah_ar_2014_15.pdf
- Bumitama Agri Ltd (2012) 'Prospektus tertanggal 3 April 2012' http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-WWON6/0x0x663207/8E4A2D0B-7CB0-4B7E-BD70-43C682510F24/Bumitama_Agri_Ltd_Prospectus.pdf
- Bumitama Agri Ltd (2013a) 'Annual report 2012' <http://ir.bumitama-agri.com/annuals.cfm>
- Bumitama Agri Ltd (2013b) Surat kepada Greenpeace SE Asia, 15 November 2013
- Bumitama Agri Ltd (2013c) Surat kepada RSP0, 22 November 2013 (dokumen saat ini tidak tersedia di laman RSP0)
- Bumitama Agri Ltd (2015a) 'RSP0 Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/bumitama%20agri%20Ltd-ACOP2015.pdf>
- Bumitama Agri Ltd (2015b) 'Sustainability policy' 13 Agustus 2015 http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-WWON6/3522368043x0x846020/77847980-62D3-4B91-BAE4-E49BCE53FFB0/Bumitama_-_Sustainability_Policy.pdf
- Bumitama Agri Ltd (2016) 'Annual report 2015' <http://ir.bumitama-agri.com/annuals.cfm>
- Burrows D (2016) 'Major brands dump palm oil supplier IOI following RSP0 suspension' 7 April 2016 FoodNavigator <http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Major-brands-dump-palm-oil-supplier-IOI-following-RSP0-suspension>
- Carson Cumberbatch PLC (2015) 'Annual report 2014-15' http://www.carsoncumberbatch.com/investor_information/annual_reports_2014_2015/carson_cumberbatch_plc_ar_2014-15.pdf
- Carson Cumberbatch website <http://www.carsoncumberbatch.com>
- Carson Cumberbatch website 'Our history' http://www.carsoncumberbatch.com/about_us/our_history.php diakses pada 27 Desember 2016
- Centre for Orangutan Protection (2013) 'Complaint to RSP0 regarding PT Guntá Samba Jaya/Salim Ivomas Pratama Tbk' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/30>
- Channel News Asia (2010) 'Noble Group invests in Indonesian palm oil producer' 15 Juni 2010 <http://www.thisisnoble.com/in-the-press/285-noble-group-invests-in-indonesian-palm-oil-producer.html>
- Chow E (2016) 'Palm oil's green body comes under fire from activists' Reuters 7 November 2016 <http://www.reuters.com/article/us-palmoil-sustainable-idUSKBN13213S>
- Consortium to Revise the HCV Toolkit for Indonesia (2008) 'Toolkit for identification of High Conservation Values in Indonesia' <https://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/HCV%20Toolkit%20for%20Indonesia-Engversion-final.pdf>
- Cooper G (2015) 'Norway's oil fund divests from Korea's Posco and Daewoo' Environmental Finance 18 Agustus 2015 <https://www.environmental-finance.com/content/news/norways-oil-fund-divests-from-koreas-posco-and-daewoo.html>
- Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2014) 'Annual report 2014' <http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf>
- Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015) 'Recommendation to exclude Daewoo International Corporation and POSCO from the Government Pension Fund Global' 27 Maret 2015 (unofficial English translation) <http://etikkradet.no/files/2015/08/Recommendation-Daewoo-270315.pdf>
- Daemefer (2016) 'Review of HCV report for PT Bumi Sawit Sejahtera' 18 April 2016, salinan yang dimiliki oleh Greenpeace
- Daewoo International Corporation (2015) 'Separate financial statements for the years ended December 31, 2013 and 2014 with independent auditors' report' 4 Maret 2015 https://www.daewoo.com/inc/download2.jsp?destFileName=2014_DWIC_Seperate_Audit%20Reports.pdf&filepath=/downFiles/investment_eng/2014/
- Daewoo International Corporation (2016a) 'Consolidated financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2015 with independent auditors' report' 3 Maret 2016 https://www.daewoo.com/inc/download2.jsp?destFileName=2015_DWIC_Consolidation_report_eng.pdf&filepath=/downFiles/investment_eng/2015/
- Daewoo International Corporation (2016b) 'Separate financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2015 with independent auditors' report' 3 Maret 2016 https://www.daewoo.com/inc/download2.jsp?destFileName=2015_DWIC_Seperate_Audit_Reports.pdf&filepath=/downFiles/investment_eng/2015/
- Deltares (2015) 'Assessment of impacts of plantation drainage on the Kampar Peninsula peatland, Riau' <https://www.deltares.nl/en/projects/impact-assessments-for-pulp-and-oil-palm-plantations-in-the-kampar-peninsula-peatlands-riau-indonesia/>
- Endgame (2002) 'U.S. imports of Indonesian paper and

- wood products' <http://www.endgame.org/gft-indo-imports.html>
- Environmental Investigation Agency (2016) 'Noble savages HSBC's Noble intentions' 7 April 2016 <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Noble-Savages-HSBC%E2%80%99s-Noble-Intentions-FINAL.pdf>
- Environmental Investigation Agency and Telepak (2009) 'Up for Grabs: Deforestation and exploitation in Papua's plantations boom' Desember 2009 <https://eia-international.org/wp-content/uploads/up-for-grabs.pdf>
- Environmental Investigation Agency and Telepak (2012) 'Clear-cut exploitation' Mei 2012 <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Clear-Cut-Exploitation-FINAL-v2.pdf>
- Equator Principles III (2013) http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
- Esselemt T (2016) 'Malaysia palm oil giant says used as "scapegoat" as green standards ramp up' 7 Juni 2016 Reuters <http://uk.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil-forests-idUKKCN0YT2HZ>
- Financial Institution Members of the RSPO (2016) 'Statement by the financial institution members of the RSPO on the importance of transparency and disclosure of concession maps' Agustus 2016 <http://www.rspo.org/news-and-events/announcements/statement-by-the-financial-institution-members-of-the-rspo-on-the-importance-of-transparency-and-disclosure-of-concession-maps>
- First Pacific (2006) 'Abridged circular' 15 September 2006 http://www.firstpacific.com/media/normal/16358_ea060915.pdf
- Forbes (2016a) 'The world's biggest public companies' <http://www.forbes.com/global2000/#/page:2>
- Forbes (2016b) 'The world's largest banks in 2016: China keeps top three spots but JPMorgan rises' 25 Mei 2016 <http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/05/25/the-worlds-largest-banks-in-2016-china-keeps-top-three-spots-but-jpmorgan-rises/#3b9218cd6230>
- Friends of the Earth Europe et al (2013) 'Commodity crimes: Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans' 21 November 2013 http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/commodity_crimes_nov13.pdf
- Global Canopy Programme (2016a) 'Forest 500 project 2016 rankings' <http://forest500.org/#financial-institutions-tab>
- Global Canopy Programme (2016b) 'Sleeping giants of deforestation: The companies, countries and financial institutions with the power to save forests. The 2016 Forest 500 results and analysis' http://forest500.org/sites/default/files/sleeping_giants_of_deforestation_-_2016_forest_500_results.pdf
- Global Forest Watch interactive map <http://www.globalforestwatch.org>
- Global Reporting Initiative (2015) 'G4 sustainability reporting guidelines' <https://www.globalreporting.org/resource/library/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf>
- GM (2016) General Mills statement on palm oil supplier, News Release, 3 Juni 2016 <http://www.generalmills.com/en/News/NewsReleases/Library/2016/June/palm-oil-statement63/278f1194-f8f7-448a-bcf9-bbb09cfae997>
- Gobai J (2016) 'Siaran pers: Koalisi peduli korban sawit Nabire' 25 Maret 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria <http://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-koalisi-peduli-korban-sawit-nabire/>
- Goodhope Asia Holdings Ltd (2013) 'Conservation and new development policy' 4 Mei 2013, salinan dimiliki oleh Greenpeace
- Goodhope Asia Holdings Ltd (2015) 'RSPO Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/goodhope%20asia%20holdings%20Ltd.-ACOP2015.pdf>
- Goodhope Asia Holdings Ltd (2016) 'Catatan pertemuan' dengan Greenpeace pada 22 September 2016, dibagikan pada 23 September 2016
- Goodhope Asia Holdings Ltd website 'Edible oils & fats' <http://www.goodhopeholdings.com/business-sectors/edible-oils-and-fats> diakses pada 27 Desember 2016
- Goodhope Asia Holdings Ltd website 'Environment' <http://www.goodhopeholdings.com/sustainability/environment#project1> diakses pada 27 Desember 2016
- Goodhope Asia Holdings Ltd website 'Subsidiaries' <http://www.goodhopeholdings.com/about-us/subsidiaries> diakses pada 27 Desember 2016
- Government of Indonesia (2009) 'Peta penutupan lahan Indonesia tahun 2009 / Land cover survey 2009' <http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-cetak/59-peta-cetak/268-peta-penutupan-lahan-indonesia-tahun-2009>
- Greenpeace International (2008) 'How Unilever palm oil suppliers are burning up Borneo' April 2008 <http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/24549/how-unilever-palm-oil-supplier.pdf>
- Greenpeace International (2014) 'P&G's Dirty Secret' Februari 2014 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2014/ProcterGambleDS_MediaBriefing_Final.pdf
- Greenpeace International (2015) 'Indonesia's forests: Under fire' November 2015 <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-Fire-Eng.pdf>
- Greenpeace International (2016a) 'A deadly trade-off: IOI's palm oil supply and its human and environmental costs' September 2016 <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Forests-Reports/A-Deadly-Trade-off/>
- Greenpeace International (2016b) 'Why IOI's destruction in Ketapang is a burning issue for the RSPO and the palm oil plantation sector' Juni 2016 <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/Burning%20Issue.pdf>
- Hanebora R (2014) 'Mengenal suku Yerisiam dan investasi sawit yang hadir di ulayatnya' 26 November 2014, di update pada 17 Juni 2015 http://www.kompasiana.com/robertinohanebora/mengenal-suku-yerisiam-dan-investasi-sawit-yang-hadir-di-ulayatnya_54f93604a3331169018b4a25
- Hanebora S (2013) 'Bekerja tanpa AMDAL dan lecehkan hak adat' 14 Oktober 2013 Yerisiam News <http://sukuyerisiam.blogspot.com/2013/10/bekerja-tanpa-amdal-dan-lecehkan-hak.html>
- Hansen MC et al (2016) 'Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data' Environmental Research Letters 11(3) 2 Maret 2016 <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/3/034008>
- Harris, N, S Minnemeyer, F Stolle, OA Payne (2015) 'Indonesia's fire outbreaks producing more daily emissions than entire US economy' World Resources Institute' 16 Oktober 2015 <http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy>
- HCS Approach Steering Group (2015) The HCS Approach toolkit, version 1.0 <http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>
- HSBC (2008) 'Forest land and forest products sector policy' http://assets.panda.org/downloads/forestry_policy_summary_sep08.pdf
- HSBC (2014a) 'Agricultural commodities policy' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/citizenship/sustainability/pdf/hsbc-agricultural-commodities-policy-march-2014.pdf>
- HSBC (2014b) 'Forestry policy' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/citizenship/sustainability/pdf/hsbc-forestry-policy-march-2014.pdf>
- HSBC (2014c) 'World Heritage Sites and Ramsar Wetlands policy' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/citizenship/sustainability/pdf/hsbc-world-heritage-sites-and-ramsar-wetlands-policy-march-2014.pdf>
- HSBC (2016a) '3Q 2016 earnings release' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/investorrelationsassets/hsbc-results/2016/3q-results/hsbc-holdings-plc/3q-2016-earnings-release.pdf>
- HSBC (2016b) 'Mining and metals policy' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/citizenship/sustainability/pdf/161028-mining-and-metals-policy.pdf>
- HSBC (2016c) 'Statement on climate change' <http://www.hsbc.com/~media/hsbc-com/our-approach/sustainability/pdf/hsbc-statement-on-climate-change-oct16.pdf>
- HSBC website <http://www.hsbc.com>
- HSBC website 'HSBC in numbers' <http://www.hsbc.com/about-hsbc/hsbc-in-numbers> diakses pada 13 Desember 2016
- HSBC Global Research (2013) 'Consumer & Retail Consumer Staples: Asian palm oil' 12 November 2013
- IndoAgri (2013) 'IndoAgri sustainable palm oil policy' [http://www.indofoodagri.com/misc/B.Sustainable-Palm-Oil-Policy\(F\).pdf](http://www.indofoodagri.com/misc/B.Sustainable-Palm-Oil-Policy(F).pdf) diakses pada 30 Desember 2016
- IndoAgri (2014) 'Palm oil sourcing policy' <http://www.indofoodagri.com/misc/C.Palm-Oil-Sourcing-Policy.pdf> diakses pada 30 Desember 2016
- IndoAgri (2016) 'Annual report 2015' <http://indofoodagri.listedcompany.com/misc/ar2015.pdf>
- IndoAgri website <http://www.indofoodagri.com>

- Indofood (2014) 'Annual report 2014' http://www.indofood.com/uploads/annual/ISM_2014_website.pdf
- Indofood (2015) 'Annual report 2015' http://www.indofood.com/uploads/annual/INDF_AR%202015_LOW%20RES%20UPDATE.pdf
- Indofood website <http://www.indofood.com>
- Indofood website 'Consumer branded products' <http://www.indofood.com/business/consumer-branded-products> diakses pada 27 Desember 2016
- Indofood website 'Shareholders composition' <http://www.indofood.com/page/shareholders-composition> diakses pada 27 Desember 2016
- Indomaret (2016) 'Indomaret raih juara pertama perusahaan waralaba utama' 28 November 2016 <http://indomaret.co.id/main-content/berita-and-kegiatan/2016/11/28/indomaret-raih-juara-pertama-perusahaan-waralaba-utama/>
- Indoritel Makmur International (2013) 'Company update 30 Juni 2013' http://www.indoritel.co.id/uploads/Indoritel%20_Company_Update_June2013.pdf
- IOI Group (2014) 'RSPO Notification of ongoing planting' 27 Februari 2014, tersedia di: <http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/ioi-group-pt.-bumi-sawit-sejahtera-bss>
- IOI Group (2015a) 'Annual report 2015' https://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf
- IOI Group (2015b) 'RSPO Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/ioi%20group-ACOP2015.pdf>
- IOI Group (2016a) 'IOI withdraws legal challenge against RSPO board's decision' 6 Juni 2016 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=804>
- IOI Group (2016b) 'Sustainability implementation plan' 25 Agustus 2016 <http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/SustainabilityImplementationPlan.pdf>
- IOI Group (2016c) 'Sustainable palm oil policy' (revised July 2016) <http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/Sustainability%20Palm%20oil%20Policy.pdf>
- IOI Group (2016d) 'Update on sustainability' 17 April 2016 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=781>
- IOI Group website 'Group structure' http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp_Structure diakses pada 27 Desember 2016
- IOI Group and Aidenvironment (2016) 'Joint-statement on closure of the Ketapang complaint' 1 Desember 2016 <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/12/Joint-statement-on-Ketapang-Complaint-Aidenviroment-IOI-Final-20161201.pdf>
- Jacobson, P (2016a) 'Company ordered to pay record \$76m over fires in Sumatra' Mongabay.com 12 Agustus 2016 <https://news.mongabay.com/2016/08/company-ordered-to-pay-record-76m-over-fires-in-sumatra/>
- Jacobson, P (2016b) 'Indonesia's forestry ministry follows through on palm oil permit freeze' Mongabay.com 23 Mei 2016 <https://news.mongabay.com/2016/05/indonesias-forestry-ministry-follows-palm-oil-permit-freeze/>
- Jacobson, P (2016c) 'Indonesia's palm oil permit moratorium to last five years' Mongabay.com 18 July 2016 <https://news.mongabay.com/2016/07/indonesias-palm-oil-permit-moratorium-to-last-five-years/>
- Jakarta City News (2010) 'Interpol investigating Indosiar Director' Desember 2010 <https://jakartacitynews.blogspot.com/2010/12/interpol-investigating-indosiar.html>
- Jayapura State Administrative Court (2016) 'Decision 22/G/2015/PTUN.JPR' 5 April 2016 <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/3b7b9d7462ce23e0a514388dc98946a1/pdf>
- Jong HN (2016) '5 palm oil firms face lawsuit over forest fires' Jakarta Post 28 Juni 2016 <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/28/5-palm-oil-firms-face-lawsuit-over-forest-fires.html>
- Kalimantan-News.com (2013) 'Investor sawit, terus Lirik Kefungau' 25 November 2013 <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=23441>
- Ketapang District Court (2014) 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 124/Pid.Sus/2014/PN.KTP' <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/7906f42f9697bd799b5b91af15a8d718/pdf>
- KLP (2015) 'Decision to exclude from investment' 1 Juni 2015 http://english.klp.no/polopoly_fs/1.31196.1434009821!/menu/standard/file/Noble%20Group%20Ltd%20%20beslutning%20om%20uttrekk%201062015%20ENG.pdf
- Koplitz S et al (2016) 'Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015' Environmental Research Letters 11(9) 19 September 2016 <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094023>
- Korea Herald (2008) 'Daewoo International buys Indonesian palm oil firm' 8 September 2008 <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110908000941>
- Lentera Papua Barat (2012) 'Sepakat 1,7 milyar, palang di kelapa sawit akhirnya di buka' 8 Desember 2012 http://www.lenterapapuarabar.com/front/index.php?option=com_content&view=article&id=895:sepakat-1-7-milyar-palang-di-kelapa-sawit-akhirnya-di-buka&catid=37:peristiwa&Itemid=53
- LinkedIn website 'andree hendrawan' <https://www.linkedin.com/in/andree-hendrawan-993a6331>, accessed 13 Januari 2017
- Mawel B (2015) 'Izin usaha perusahaan sawit PT Nabire Baru sepihak' 4 Desember 2015 Tabloid Jubi <http://tabloidjubi.com/16/2015/12/04/izin-usaha-perusahaan-sawit-pt-nabire-baru-sepihak/>
- Minister of Agriculture (1993) 'Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993' 23 Oktober 1993 <http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNewsDocumentDownloadashx?portalid=0&moduleid=1678&articleid=1540&documentid=1690>
- Minister of Agriculture (1999) 'Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999' 10 Februari 1999 <http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1676&articleid=1067&documentid=1150>
- Minister of Agriculture (2007) 'Peraturan Menteri Pertanian No.: 26/Permentan/OT.140/2/2007' 28 Februari 2007 <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-26-07.pdf> ('Licensing guidance for plantation business', Terjemahan bahasa Inggris tersedia di: <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins72955.pdf>)
- Minister of Agriculture (2013) 'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013' 30 September 2013 <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymce/gambar/file/Permentan%2098-2013.pdf>
- MoEF (2015a) National Forest Monitoring System (NFMS), Ministry of Environment and Forestry, Indonesia nfm.dephut.go.id/ArcGIS/rest/services/LandcoverRC_Upd/LandcoverRC_2013_Upd/MapServer diakses pada September 2015
- MoEF (2015b) 'Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan' Siaran Pers 21 Desember 2015 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/207
- Mongabay Indonesia (2013) 'Sawit masuk Nabire proses AMDAL mulai kala hutan sudah terbabat' 31 Mei 2013 <http://www.mongabay.co.id/2013/05/31/sawit-masuk-nabire-proses-amdal-mulai-kala-hutan-sudah-terbabat-bagian-3/>
- NASA (2016) Fire Information for Resource Management System (FIRMS) <https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms>
- Noble Group (2012) 'Non-material acquisitions and disposal' 26 Maret 2012 http://www.finanznachrichten.de/pdf/20120326_222152_N21_24B97E4F5838B0A8482579CD0034CB18.1.pdf
- Noble Group (2014) 'RSPO notification of proposed new planting' 28 Mei 2014, tersedia di: <http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/noble-plantation-pt-henrison-inti-persada>
- Noble Group (2015a) 'Annual report 2014' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2014.pdf>
- Noble Group (2015b) 'RSPO Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rspo.org/file/acop2015/submissions/noble%20plantations%20pt.e%20Ltd-ACOP2015.pdf>
- Noble Group (2015c) 'SGX announcement by Noble Group' 17 Februari 2015 <http://www.thisisnoble.com/newsroom/939-sgx-announcement-by-noble-group.html>
- Noble Group (2016a) '2016 communication on progress' 27 Juni 2016 http://www.thisisnoble.com/images/responsibility/Noble_COP2016.pdf

Noble Group (2016b) 'Annual report 2015' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2015.pdf>

Noble Group (2016c) 'SGX announcement by Noble Group – Disposal of Noble Agri' 3 Maret 2016 <http://www.thisisnoble.com/newsroom/1096-sgx-announcement-by-noble-group-disposal-of-noble-agri.html>

Noble Group website 'Our approach to sustainability' <http://www.thisisnoble.com/corporate-csr.html> diakses pada 27 Desember 2016

OPPUK, Rainforest Action Network and International Labor Relations Forum (2016) 'The human cost of conflict palm oil: Indofood, PepsiCo's hidden link to worker exploitation in Indonesia' Juli 2016 <http://www.ran.org/indofood>

Pogau O (2013) 'Tuntut pembayaran gaji ke perusahaan, Brimob aniaya warga sipil' 28 Juni 2013 Suara Papua <http://suarapapua.com/2013/06/tuntut-pembayaran-gaji-ke-perusahaan-brimob-aniyai-warga-sipil/> (no longer online at original URL, Terjemahan bahasa Inggris tersedia di: <http://westpapuamedia.info/2013/06/30/nabire-brimob-assaults-a-civilian-due-to-wage-demands/>)

POSCO Daewoo (2016a) 'POSCO and subsidiaries consolidated financial statements, 31 Desember, 2015 dan 2014' 25 Februari 2016 <http://www.posco.com/homepage/servlet/FileDownload?fileCategory=en/irReport01&fileNum=776>

POSCO Daewoo (2016b) 'POSCO Daewoo Corporation - Agustus 2016' http://www.daewoo.com/inc/download2.jsp?destFileName=IR_Material_August_2016+%28Eng%29.pdf&filepath=/upimg/board_table/5545/

POSCO Daewoo (2016c) 'POSCO report 2015' April 2016 https://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng5/dn/sustain/customer/2015_POSCO_Report_EN.pdf

POSCO Daewoo website 'Business information' <https://www.daewoo.com/eng/company/introduce/intro.jsp> diakses pada 27 Desember 2016

POSCO Daewoo website 'Resource development' <https://www.daewoo.com/eng/business/resources/submain.jsp> diakses pada 27 Desember 2016

POSCO Daewoo website 'Rules of Conduct' <https://www.daewoo.com/eng/ethical/rule01.jsp> diakses pada 27 Desember 2016

PT Bio Inti Agrindo website 'Oil palm plantation' <http://www.ptbia.co.id/en/business/oil-palm-plantation> diakses pada 27 Desember 2016

PT Gunta Samba (2015) 'Lowongan kerja' 15 Agustus 2015 <http://me.unram.ac.id/en/2015/08/lowongan-pt-gunta-samba/>

PT Indofood Sukses Makmur (2016) 'Laporan keuangan gabungan 31 Maret 2016 dan untuk periode 3 bulan kemudian berakhir (tidak diaudit)' 28 April 2016 http://www.indofood.com/uploads/statement/INDF_FullNote_Bilingual_31_Mar%202016%20Released.pdf

PT PP London Sumatra Indonesia (2014) 'RSPO Notification of Proposed New Planting, Wilaya Pahu Makmur Estate and Kedang Makmur Estate' 22 Desember 2014, tersedia di: <http://www.rsपो.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/pt-pp-london-sumatra-indonesia-wilayah-pahu-makmur-estate-and-kedang-makmur-estate>

PT PP London Sumatra Indonesia (2015) 'RSPO Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rsपो.org/file/acop2015/submissions/pt.%20pp%20london%20sumatra%20indonesia%20fbk-ACOP2015.pdf>

PT Salim Ivomas Pratama (2014) '2014 annual report' tersedia di: <http://www.simp.co.id/InvestorRelation/AnnualReport.aspx>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015) 'RSPO Annual Communications of Progress 2015' <http://www.rsपो.org/file/acop2015/submissions/pt.%20salim%20ivomas%20pratama%20fbk-ACOP2015.pdf>

PT Salim Ivomas Pratama website <http://www.simp.co.id>

PT Salim Ivomas Pratama website 'About SIMP' <http://www.simp.co.id/AboutSIMP/BOD.aspx> diakses pada 16 Desember 2016

Pulse News (2016) 'S. Korea's Daewoo International renamed to Posco Daewoo after 16 years in business' 14 Juni 2016 <http://pulsenews.co.kr/view.php?year=2016&no=193943>

Radarsorong (2015) '9 marga tuntutan ganti rugi tanaman dan sewa lahan' 8 September 2015 <http://www.radarsorong.com/read/2015/09/08/39997/9-Marga-Tuntut-Ganti-Rugi-Tanaman-dan-Sewa-Lahan>

Ramsar Sites Information Service website <https://rsis Ramsar.org> diakses pada 29 November 2016

Ramsar Sites Information Service website 'Tanjung Puting National Park' <https://rsis Ramsar.org/ris/2192> diakses pada 27 Desember 2016

Reuters (2016) 'Noble Group launches \$1 bln loan facility' 5 April 2016 <http://www.reuters.com/article/noble-group-debt-idUSL3N1782KT>

Reuters website 'People: Indofood Sukses Makmur Tbk PT (INDFta.JK)' <http://www.reuters.com/finance/stocks/officerProfile?symbol=INDFta.JK&officerId=556316> diakses pada 13 Januari 2017

Ritung S et al (2011) 'Peta lahan gambut Indonesia. Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian' prepared for online use by World Resources Institute

RSPO (2010) Letter from RSPO Grievance Panel to Bapak Daud Dharsono of PT SMART, 21 September 2010 <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2010/Letter-to-PT-SMART-dated-21092010.pdf>

RSPO (2011) 'Summary report of identification and analysis of HCV and SEIA PT. Pusaka Agro Lestari' Desember 2011 http://www.rsपो.org/sites/default/files/2%20RSPO%20NPP_SEIA_HCV%20Summary%20Report_PT%20PAL_December%20'11_revisi%203-final-signed.pdf

RSPO (2012a) Letter from RSPO to IOI and complainants, 3 Mei 2012 <http://www.rsपो.org/file/RSPO%20letter%20to%20IOI%20LTK%20NGO%20120503.pdf>

RSPO (2012b) 'Noble Plantation Pte Ltd (PT Pusaka Agro Lestari, Papua Province, Indonesia) new planting assessment' 6 Maret 2012 <http://www.rsपो.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/noble-plantation-pte-ltd-pt-pusaka-agro-lestari-papua-province-indonesia-new-planting-assessment>

RSPO (2013a) Letter from Ravin Krishnan, RSPO Secretariat Complaints Coordinator, to Michael Raben, PT Bumitama Gunajaya Agro, 1 Juli 2013 http://www.rsपो.org/file/LSM_Final_Decision_CP1July2013.pdf

RSPO (2013b) Letter from Ravin Krishnan, RSPO Secretariat Complaints Coordinator, to Michael Raben, PT Bumitama Gunajaya Agro, 10 Oktober 2013 http://www.rsपो.org/file/Letter_PT_Andalan_Sukses_Makmur.pdf

RSPO (2013c) 'Principles and Criteria' <http://www.rsपो.org/resources/key-documents/certification/rsपो-principles-and-criteria>

RSPO (2013d) 'RSPO response – PT Salim Ivomas Pratama Tbk' Suren Juni 2013 <http://www.rsपो.org/publications/download/72cf4ef9466e827>

RSPO (2016a) 'Complaints panel meeting minutes - Meeting No. 5/2016' 7 Juni 2016 <http://www.rsपो.org/publications/download/5ef53fed860442b>

RSPO (2016b) 'Complaints panel meeting minutes - Meeting No. 6/2016, 30 Juni 2016' <http://www.rsपो.org/publications/download/500c14436a2bf80>

RSPO (2016c) 'Final decision on IOI Ketapang complaint case' 14 Maret 2016 <http://www.rsपो.org/files/download/0dcb9a6ef48b639>

RSPO (2016d) Letter from Datuk Darrel Webber, RSPO CEO, to Dr Surina Ismail, IOI Corporation Berhad, 5 Agustus 2016 <http://www.rsपो.org/files/download/b303058019c8757>

RSPO (2016e) 'Notice to RSPO members on the suspension of IOI Group's certification' 1 April 2016 <http://www.rsपो.org/news-and-events/announcements/notice-to-rsपो-members-on-the-suspension-of-ioi-groups-certification>

RSPO (2016f) 'Update on the status of IOI Group's certification' 5 Agustus 2016 <http://www.rsपो.org/news-and-events/announcements/update-on-the-status-of-ioi-groups-certification>

RSPO website <http://www.rsपो.org>

RSPO website 'Case tracker | Bumitama Gunajaya Abadi' <http://www.rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/91> diakses pada 27 Desember 2016

RSPO website 'Case tracker | IOI - IOI Pelita Sdn Bhd' <http://www.rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/4> diakses pada 27 Desember 2016

RSPO website 'Case tracker | PT Andalan Sukses Makmur (a subsidiary of Bumitama Agri Ltd.)' <http://www.rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/40> diakses pada 27 Desember 2016

RSPO website 'Case tracker | PT Gunta Samba Jaya/Salim Ivomas Pratama Tbk' <http://www.rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/30> diakses pada 10 Januari 2017

- RSP0 website 'Case tracker | PT Hati Prima Agro (a subsidiary of Bumitama Agri Ltd.)' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/23> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Case tracker | PT Henrison Inti Persada subsidiary of RSP0 member Noble Plantation Pte Ltd' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/73> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Case tracker | PT Ladang Sawit Mas (a subsidiary of Bumitama Agri Ltd.)' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/31> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Case tracker | PT Nabatindo Karya Utama (a subsidiary of Bumitama Agri Ltd.)' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/32> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Case tracker | PT Nabire Baru' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/94> diakses pada 10 Januari 2017
- RSP0 website 'Case tracker | PT Sukses Karya Sawit (SKS), PT Berkat Nabati Sawit (PT BNS), PT Bumi Sawit Sejahtera (PT BSS) subsidiary of PT Sawit Nabati Agro (PT SNA), IOI Group' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/80> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Certified growers' <http://www.rspo.org/certification/certified-growers> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Members' http://www.rspo.org/members?keywords=&member_type=&member_category=Banks+and+Investors&member_country=All diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website members page 'Goodhope Asia Holdings Ltd' <http://www.rspo.org/members/3466/Goodhope-Asia-Holdings-Ltd> diakses pada 27 Desember 2016
- RSP0 website 'Status of complaints - Case tracker' <http://www.rspo.org/members/status-of-complaints/> diakses pada 27 Desember 2016
- Salam Papua (2016) 'PT PAL paparkan kinerja kepada pemkab Mimika' 14 Juli 2016 <http://www.salampapua.com/2016/07/pt-pal-paparkan-kinerjanya-kepada.html>
- Singapore Stock Exchange website 'Company announcements' http://sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/company_disclosure/company_announcements diakses pada 13 Desember 2016
- Studwell J (2007) *Asian Godfathers: Money and Power in Hong Kong and South East Asia*, Profile Books Ltd, London
- Suara Papua (2014) 'Uskup Timika - perkebunan kelapa sawit di Timika ancaman bagi masyarakat pesisir' 25 November 2014 <http://suarapapua.com/2012/11/06/uskup-timika-perkebunan-kelapa-sawit-di-timika-ancaman-bagi-masyarakat-pesisir/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1105>)
- Suara Pusaka (2014a) 'Brimob Nabire Baru intimidasi ketua koperasi bumiowi' 1 September 2014 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/brimob-nabire-baru-intimidasi-ketua-koperasi-bumiowi/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1058>)
- Suara Pusaka (2014b) 'PT. BIA tidak memenuhi kewajibannya' 4 Agustus 2014 <http://pusaka.or.id/pt-bia-tidak-memenuhi-kewajibannya/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1019>)
- Suara Pusaka (2015a) 'Koalisi peduli korban sawit di Nabire desak bupati cabut ijin PT Nabire Baru' 2 Februari 2015 <http://pusaka.or.id/koalisi-peduli-korban-sawit-di-nabire-desak-bupati-cabut-ijin-pt-nabire-baru/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1144>)
- Suara Pusaka (2015b) 'Mempertahankan hutan untuk kemanusiaan' 26 November 2015 <http://pusaka.or.id/mempertahankan-hutan-untuk-kemanusiaan/>
- Suara Pusaka (2015c) 'Suku Yerisiam Gua gugat PT Nabire Baru dengan cara adat dan gugatan hukum' 30 Oktober 2015 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/suku-yerisiam-gua-gugat-pt-nabire-baru-dengan-cara-adat-dan-gugatan-hukum/>
- Suara Pusaka (2016) 'Brimob dan pembongkaran dusun sugu suku besar Yerisiam Gua' 13 May 2016 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/brimob-dan-pembongkaran-dusun-sugu-suku-besar-yerisiam-gua/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1409>)
- Supriyadi W (2016) 'Perkebunan sawit penyebab banjir di Kampung Sima dan Wauri' 7 April 2016 JERAT Papua <http://www.jeratpapua.org/2016/04/07/perkebunan-sawit-penyebab-banjir-di-kampung-sima-dan-wauri/>
- Tabloid Jubi (2012) 'The impact of MIFEE presence at Bian River and Maro River, West Papua' 21 Desember 2012 <http://tabloidjubi.com/16/2012/12/21/the-impact-of-mifee-presence-at-bian-river-and-maroriver/>
- Tabloid Jubi (2014) 'Korban banjir di Mimika Tengah butuh bantuan' 7 Oktober 2014 <http://tabloidjubi.com/16/2014/10/07/korban-banjir-di-mimika-tengah-butuh-bantuan/>
- Tabloid Jubi (2015a) 'Dishut Mimika siapkan aturan pengawasan perusahaan sawit' 7 April 2015 <http://tabloidjubi.com/16/2015/04/07/dishut-mimika-siapkan-aturan-pengawasan-perusahaan-sawit/> (Terjemahan bahasa Inggris tersedia di <https://awasmifee.potager.org/?p=1186>)
- Tabloid Jubi (2015b) 'Empat tahun, Brimob Seabkan 15 kasus kekerasan di area kelapa sawit Nabire' 15 November 2015 <http://tabloidjubi.com/16/2015/11/15/empat-tahun-brimob-seabkan-15-kasus-kekerasan-di-area-kelapa-sawit-nabire/>
- Tekege S (2015) 'How oil palm companies are threatening the livelihood of the Kamoro and Amungme indigenous peoples in Timika' awasMifee 23 Agustus 2015 <https://awasmifee.potager.org/?p=1297>
- Thomas R (2001) 'Korea and Daewoo's woes' The Globalist 22 Oktober 2001 <http://www.theglobalist.com/korea-and-daewoos-woes/>
- Thoumi G (2016) 'Noble Group: Costs of capital and deforestation risks underpriced' 25 Agustus 2016 <http://seekingalpha.com/article/4002214-noble-group-cost-capital-deforestation-risks-underpriced?page=2#>
- TUVRheinland Indonesia (2014) 'RSP0 new planting procedure assessment report: PT Henrison Inti Persada - West Papua, 26 Mei 2014' <http://www.rspo.org/files/download/4e6225b11f8d321>
- TUVRheinland Indonesia (2016) 'RSP0 new planting procedure assessment report: PT Karya Bakti Agro Sejahtera-3 - West Kalimantan, 12 Agustus 2016' <http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/bumitama-agri-ltd-pt-karya-bakti-agro-sejahtera-3>
- UNEP (2015) 'Bank and investor risk policies on soft commodities' Juli 2015 [http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/documents/wgi/NCD%20-%20SOFT%20COMMODITIES%20RISK%20\(FULL\).pdf](http://www.naturalcapitalfinancealliance.org/documents/wgi/NCD%20-%20SOFT%20COMMODITIES%20RISK%20(FULL).pdf)
- Vaughan A (2016) 'Top palm oil producer sues green group over deforestation allegations' The Guardian 9 Mei 2016 <http://www.theguardian.com/environment/2016/may/09/top-palm-oil-producer-sues-green-group-over-deforestation-allegations>
- Watchdoc (2015) 'The Mahuzes (full video)' Agustus 2015 <http://watchdoc.co.id/2015/08/the-mahuzes-full-movie/>
- WeLands International (2006) 'Peta-peta sebaran lahan gambut, luas dan kandungan karbon di Papua / Maps of peatland distribution area and carbon content in Papua, 2000-2001' WeLands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) <http://wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Papua.pdf>
- Wilmar (2013) 'No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy' <http://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/themes/wilmar/sustainability/assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-%20FINAL%20-%205%20Dec%202013.pdf>
- Winarni RR and JW van Gelder (2014) 'Tycoon-controlled oil palm groups in Indonesia' TUK Indonesia/Profundo <http://www.profundo.nl/files/download/TuK140828Summary.pdf>
- World Bank (2016) 'The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis' Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note, Februari 2016 <http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf>
- Yayasan Pusaka (2016) 'Pusaka PT Nabire Baru RSP0 complain' 19 April 2016 <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2016/04/Pusaka%20PT%20Nabire%20Baru%20RSP0%20complaint%20-%20Eng%20Vrs.pdf>
- Yun M and Y Humber (2014) 'Cofco buys Noble Agri unit stake as China seeks food supply' Bloomberg Business, 2 April 2014 <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-01/cofco-to-pay-1-5-billion-for-stake-in-noble-s-agriculture-unit>.ashx?portalid=0&moduleid=1676&articleid=1067&documentid=1150



16 Juli 2013, Manokwari:
Seekor Nuri Kepala Hitam
di hutan di pinggiran
Manokwari, Papua.
©HILTON/GREENPEACE



GREENPEACE

Januari 2017
Diterbitkan oleh Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands
enquiries@greenpeace.org
www.greenpeace.org

